



**FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN  
DALAM BIDANG PERDATA**

**THESIS**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :  
ELY KUSUMASTUTI, SH  
NIM : B 4A. 000. 025**

**Pembimbing :  
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



## FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PERDATA

Disusun Oleh :  
**ELY KUSUMASTUTI, SH**  
NIM : B 4A. 000. 025

Telah Dipertahankan di Depan Dosen Penguji  
Pada Tanggal

Tesis Tersebut Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Derajat Magister  
Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing Thesis



2002

Universitas Diponegoro  
Kantor Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH      Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



## **FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PERDATA**

**Disusun Oleh :  
ELY KUSUMASTUTI, SH  
NIM : B 4A. 000. 025**

### **MOTTO :**

Percayalah Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar  
pada pengertianmu sendiri, Akuilah Dia dalam segala lakumu,  
maka Ia akan meluruskan jalanmu.  
(Amsal 3 :5-6)

### **PERSEMBAHAN :**

Kupersembahkan Kepada Suamiku Tersayang :  
**AKP. Drs. Sugeng Irianto, MM**  
Hadiah Ulang Tahun Perkawinan Ke-1  
10 Nopember 2001 – 10 Nopember 2002  
Semoga Tuhan Memberkati Selamanya  
Amien.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan maha Penyayang, karena berkat karuniaNya, Tesis yang berjudul “Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata”, dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulisan tesis inni merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjananya.

Penulisan Thesis ini mendapat bimbingan secara intensif dari Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, yang telah mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berharga dan bermanfaat bagi penulis dan semoga Allah Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada Beliau.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bapak Budiharto, SH, MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak membimbing penulis dalam penyusunan thesis;
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara RI beserta staff, yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan thesis ini;
5. Bapak Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan thesis ini;
6. Ibu PINDO KARTIKANI, SH, MH, selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Semarang, yang telah banyak membimbing Penulis dalam menyelesaikan Thesis Penulis.
7. Para JPN dilingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Semarang, yang berkenan memberikan informasi yang diperlukan bagi penulis dalam penyusunan thesis ini.
8. Suamiku tercinta, AKP. Drs. Sugeng Irianto, MM, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyusun thesis ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril dalam penulisan thesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan thesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

## ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakkan hukum, yang tidak hanya mengemban tugas-tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan dibebani juga tugas-tugas lain dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik mewakili kepentingan pemerintah maupun kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 UU No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dari hasil penelitian, kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, sama sekali belum difungsionalisasikan, dikarenakan berbagai kendala, baik dari Intern lembaga Kejaksaan sendiri, maupun ekstern lembaga Kejaksaan. Kendala dari Intern Kejaksaan meliputi SDM dari Kejaksaan sendiri, sedangkan kendala dari Ekstern Kejaksaan meliputi kendala peraturan perundang-undangnya dan kendala budaya hukum dari pemerintah atau BUMN/BUMD sebagai pengguna jasa Jaksa Pengacara Negara.

Kewenangan Kejaksaan sangat penting difungsionalisasikan, karena belum dilaksanakan secara maksimal, serta belum dilaksanakannya hubungan kerjasama antara Kejaksaan dengan BPKP serta tugas Kejaksaan dalam PUPN yang perlu direfungsionalisasi.

Diharapkan dengan fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan, akan dapat dicapai sasaran pemulihan keuangan negara dan penyelamatan asset-asset negara.

## ABSTRACT

Research on "The Fungsionalism of Public Prosecution Service Power for Civil law" is a normative study of law. The Purpose of this reserch is to understand matters Fungsionalism of Public Prosecution Service Power for Civil law and more specifically on the Important reason Fungsionalism of Public Prosecution Service Power for Civil law and a barrier to Fungsionalism of Public Prosecution Service Power for Civil law.

Public Prosecution Service of The Republic of Indonesia are one of Public official of law, who not only have a duty as Public Prosecutor in general crime case, but have another duty for Civil Cases and Administrative Affairs, as a emissary of government or as a legal standing, from UU No. 5 tahun 1991 About Public Prosecution Service of The Republik of Indonesia, UU No. 1 tahun 1995 About Limitied Company dan UU No. 4 Tahun 1998 About Failisment.

The power of Public Prosecution Service In Civil Law, is very Important to fungsionalism. With The Fungsionalism of Public Prosecution Service Power in Civil Law, we can get The target to help out the economic condition of our country.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Teknik Penentuan Sampel.....	12

5.	Teknik Pengumpulan Data.....	13
6.	Analisis Data.....	14
F.	Kerangka Pemikiran.....	15
G.	Sistematika Penelitian.....	20

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PERDATA.....

22

### A. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan

Kejaksaan Dalam Bidang Perdata..... 22

#### 1. Sejarah Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang

Perdata..... 22

##### a. Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Perdata

Zaman Hindia Belanda..... 22

##### b. Kewenangan Kejaksaan Di bidang Perdata

Zaman Pendudukan Bala Tentara jepang..... 27

##### c. Eksistensi Kewenangan Kejaksaan di bidang

Perdata pada zaman Republik Indonesia

Proklamasi..... 28

#### 2. Dasar Hukum Fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata

a. Dalam Mewakili Kepentingan Pemerintah..... 31

b. Dalam Mewakili Kepentingan Umum..... 39

#### 3. Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata..... 42

a. Penegakkan Hukum.....	42
b. Bantuan Hukum.....	48
c. Pelayanan Hukum.....	58
d. Pertimbangan Hukum.....	59
e. Tindakan Hukum lain.....	61
4. Instrumen Perdata sebagai tindak lanjut penanganan kasus pidana. ....	62
a. Berdasarkan jabatan.....	62
b. Berdasarkan SKK.....	63
 B. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jam Datun..	64
1. Hubungan Datun Kejaksaan dengan Instansi lain....	64
a. Hubungan DATUN Kejaksaan dengan BPKP....	64
b. Hubungan DATUN Kejaksaan dengan PUPN...	68
2. Lingkup Kegiatan.....	72
a. Di dalam Pengadilan (litigasi).....	72
b. Diluar Pengadilan (Non litigasi).....	75
3. Dalam mewakili kepentingan Pemerintah/BUMN/ BUMD atau lembaga Negara.....	80
a. Pelaksanaan Penanganan Kredit Macet.....	80
b. Pelaksanaan dalam mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.....	90

c. Pelaksanaan Gugatan Ganti Kerugian yang merugikan Negara.....	93
4. Dalam mewakili kepentingan masyarakat.....	97
a. Pengertian Kepentingan Umum.....	97
b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perdata Kejaksaan dalam mewakili Kepentingan Umum .....	103
c. Kewenangan Kejaksaan dalam UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas...	103
d. Kewenangan Kejaksaan dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.....	108
 C. Kebijakan Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Di Indonesia.....	110
1. Fungsi Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara.....	110
a. Fungsi Eksternal.....	110
b. Fungsi Internal.....	114
2. Dasar Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata.....	115
a. Surat Kuasa Khusus.....	115
b. Peraturan Perundang-Undangan.....	118
c. Penetapan Hakim.....	119

3. Pengertian dan Konsep Fungsionalisasi.....	121
a. Pengertian Fungsionalisasi dan Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata...	121
b. Tujuan dilaksanakannya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata..	123
4. Kebijakan Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dalam penyelesaian masalah tindakan yang merugikan keuangan negara.....	124
a. Fungsi Preventif.....	128
b. Fungsi Represif .....	130
 <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA .....</b>	<b>134</b>
A. Hasil Penelitian .....	134
1. Alasan pentingnya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai. ....	134
a. Belum Dilaksanakannya Secara Maksimal Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata .....	134
b. Belum Dilaksanakannya Hubungan Kerjasama Antara Kejaksaan dengan BPKP.....	152
b. Perlunya Refungsionalisasi Tugas & Kewenangan Kejaksaan Dalam PUPN. ....	156

2. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam	
Bidang Perdata.....	160
a. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di	
bidang Perdata Dalam Upaya Pemulihan Keuangan	
Negara dan Penyelamatkan Asset-Asset Negara....	160
b. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di	
Bidang Perdata Sebagai Tindak Lanjut Penanganan	
Kasus Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara ...	173
c. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di	
bidang Perdata Sebagai Upaya Pengawasan	
Terhadap Asset-Asset Negara. ...	178
3. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi	
Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan	
Upaya Mengatasinya.....	185
a. Kendala Yang Berasal Dari Intern Lembaga	
Kejaksaan Sendiri.....	185
b. Kendala Yang Berasal Dari Ekstern Lembaga	
Kejaksaan .....	187

B. Analisa Hasil Penelitian.....	194
1. Alasan pentingnya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai. ....	194
a. Belum Dilaksanakannya Secara Maksimal Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata .....	195
b. Belum Dilaksanakannya Hubungan Kerjasama Antara Kejaksaan dengan BPKP.....	197
c. Perlunya Refungsionalisasi Tugas & Kewenangan Kejaksaan Dalam PUPN. ....	199
2. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata.....	200
a. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di bidang Perdata Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara dan Penyelamatkan Asset-Asset Negara....	200
b. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Sebagai Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara ...	219

c. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Di bidang Perdata Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Asset-Asset Negara. ... ..	224
3. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Upaya Mengatasinya.....	232
a. Kendala Yang Berasal Dari Intern Lembaga Kejaksaan Sendiri.....	
b. Kendala Yang Berasal Dari Ekstern Lembaga Kejaksaan .....	235
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>251</b>
A. Kesimpulan.....	251
B. Saran.....	254



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Bantuan Hukum Perdata yang masuk bulan Mei 1999 s/d 2000.
- Tabel 2 : Perincian Per-Kejaksaan Tinggi/Wilayah
- Tabel 3 : Perincian Per Departemen
- Tabel 4 : Rincian Per Kejaksaan Dalam Pelayanan Hukum Perdata
- Tabel 5 : Rincian Per Kejaksaan Dalam Pertimbangan Hukum Perdata
- Tabel 6 : Jumlah Kekayaan Negara Yang berhasil dipulihkan
- Tabel 7 : Perincian Per Kejaksaan Perkara Bantuan Hukum Yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- Tabel 8 : Perincian Per Departemen Pengguna Bantuan Hukum TUN.

# **FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PERDATA**

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakkan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani tugas-tugas lain dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal 27 mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan : <sup>1)</sup>

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- (a) melakukan penuntutan dalam bidang pidana;
- (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;

---

<sup>1)</sup> Achmad Busro, *"Eksistensi Kantor Pegacara Negara dalam Menghadapi Era Globalisasi,"* Masalah-masalah Hukum No. 5 Tahun 1997.

- (c) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - (b) pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
  - (c) pengamanan peredaran barang cetakan;
  - (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Fungsi keperdataan sebenarnya telah dimiliki Kejaksaan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, yaitu berdasarkan Koninklijk Besluit yang dimuat dalam S.1912/522 tentang Vertegenwoordiging van den landen in Rechten (wakil negara dalam hukum).<sup>2)</sup> Kewenangan Kejaksaan di bidang perdata semakin jelas bila kita melihat dalam penjelasan umum UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan.”

---

<sup>2)</sup> Bintoro, SH, *“Perlu Penegasan Lembaga Kejaksaan Sebagai Kantor Pengacara Negara”* Medikom Adhyaksa 22-1-1997, hal. 12.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa Jaksa dalam hal ini selaku wakil negara atau wakil pemerintah baik dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung bahkan diluar pengadilan dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat atau tergugat. Tugas dalam perkara perdata maupun dalam perkara Tata usaha negara berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk didalamnya badan usaha milik pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata tidak hanya dalam mewakili kepentingan pemerintah atau negara, tetapi juga dalam status hukum mewakili kepentingan umum. Hal ini jelas disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana Kejaksaan dengan status hukum mewakili kepentingan umum bisa :

- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dilakukan pemeriksaan (pasal 110);
- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dibubarkan (Pasal 117);
- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar likuiditor suatu PT diberhentikan dan diangkat likuiditor baru (pasal 123).

Kewenangan lain yang dimiliki Kejaksaan di bidang perdata dalam status hukum mewakili kepentingan umum adalah dalam hal kepailitan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, menyebutkan bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Kejaksaan memiliki wewenang yang sangat luas dan vital dalam bidang keperdataan baik dalam mewakili kepentingan negara maupun mewakili kepentingan umum. Dalam situasi keterpurukan perekonomian dan keuangan negara yang menimpa negara kita seperti saat ini maka sangat tepat untuk meningkatkan Peran Kejaksaan di bidang perdata dalam upaya pemulihan dan atau pengembalian keuangan negara. Misalnya saja dalam penyelesaian kredit-kredit macet yang telah dikucurkan oleh Bank-Bank Negara atau KUD, ternyata memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Kasus lain misalnya kasus Nagasaki Spirit pada tahun 1992, dimana terjadi tabrakan kapal di wilayah ZEE Indonesia antara kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Kapal Cargo Ocean Blessings. Negara Indonesia dirugikan karena tumpahan minyak sekitar 5000 ton yang keluar dari kapal Nagasaki Spirit tersebut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar pantai. Dalam hal ini Kejaksaan setelah mendapat Surat Kuasa Khusus dari Menteri Perhubungan RI dan Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan negosiasi dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil negosiasi ini mengakibatkan pihak perusahaan Asuransi bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah RI sejumlah US \$ 400.000,-.<sup>3)</sup> Kemudian dalam kasus yang berhubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BPK dan BPKP beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa perposisi tanggal 29 Januari 1999 jumlah BLBI yang disalurkan mencapai Rp. 144, 536 Trilyun. Dari jumlah tersebut sejumlah Rp. 138, 442 trilyun atau sekitar 95,78% telah digunakan secara menyimpang sehingga

---

<sup>3)</sup> Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Himpunan Informasi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara" buku XVII, Jakarta, 2000, hal. 138.

pembayaran kembali BLBI oleh bank mengalami kemacetan. Kejaksaan kemudian diminta untuk ikut menangani masalah ini. Guna melaksanakan isi Letter of Intent (LoI) yang sudah ditandatangani bersama oleh pemerintah RI dan IMF, pada tanggal 27 Juli 2000 Kejaksaan sebagai kuasa Hukum BPPN sudah mengajukan tegoran (somasi) lewat pengadilan terhadap Bank Deka, Bank Pelita, Bank Istimarat dan Bank Centris beserta para direksinya, komisarisnya, dan pemegang sahamnya.<sup>4)</sup>

Fungsi dan peran Kejaksaan di bidang perdata sebenarnya sangat tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dan merugikan kepentingan umum, serta sangat tepat sebagai upaya untuk pengamanan aset negara. Namun yang terlihat sepertinya fungsi dan peran Kejaksaan di bidang Perdata belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal beberapa kasus perdata yang ditangani kejaksaan terbukti memperoleh hasil yang memuaskan. Keberhasilan Kejaksaan dalam usaha ini sangat membantu dalam program pemulihan perekonomian nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Disamping itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan akan mendorong para pelaku ekonomi untuk benar-benar bertindak secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas mana penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata”**.

---

<sup>4)</sup> Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
“*Himpunan Informasi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*” buku XVII, Jakarta, 2000,  
hal 147.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang tersebut di atas, dengan mengingat situasi keterpurukan perekonomian dan keuangan negara kita maka sangat tepat jika diberdayakan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata untuk mengatasinya.

Untuk itu pada penulisan thesis ini hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- <sup>Apa ?</sup> Mengapa Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata sangat penting untuk difungsionalisasikan dan sasaran apakah yang ingin dicapai oleh lembaga Kejaksaan dengan adanya kewenangan di bidang Perdata ?
- Bagaimana Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata, Apakah sejauh ini sudah bisa difungsionalisasikan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada ?
- Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan dan bagaimana upaya mengatasinya agar fungsi dan peran kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang perdata.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang sebab-sebab, latar belakang dan alasan pentingnya fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata

dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga Kejaksaan dengan adanya kewenangan di bidang Perdata .

2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan dan bagaimana upaya mengatasinya agar fungsi dan peran kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **D. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sisi teoritis dan sisi praktis.

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah informasi tentang pentingnya peran dan fungsi Kewenangan Kejaksaan di dalam bidang Perdata baik dalam mewakili kepentingan negara maupun kepentingan umum terutama bagi pemulihan ekonomi saat ini, sehingga dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu Hukum, khususnya Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi terutama berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata.



## 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pembuat Undang-Undang dalam menyusun perundangan yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata baik dalam mewakili kepentingan negara maupun kepentingan umum dalam area hukum perdata yang lain.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Jaksa selaku Pengacara Negara agar lebih produktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

## E. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis yang berjudul “Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang perdata” membutuhkan data yang akurat yang dititik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder. Dengan cara ini permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yang lebih menekankan kepada segi abstraksi dan

pendekatan empiris yang lebih menekankan kepada segi observasi.<sup>6)</sup> Hal ini dikarenakan permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan non yuridis mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata. Pendekatan yuridis normatif mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum dari kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.<sup>7)</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengamati aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan institusi melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.

Sebagai penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat kaidah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata .

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai sudut pandang dari institusi Kejaksaan, yaitu Aspek Hukumnya, Sasaran Lembaga Kejaksaan dalam Tugas dan Kewenangannya di bidang Perdata, Pelaksanaan tugas dan Kewenangannya dalam bidang Perdata baik dalam mewakili kepentingan

---

<sup>6)</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (tanpa nama penerbit), Yogyakarta, 1989, hal. 7.

umum maupun dalam mewakili kepentingan Negara, kendala-kendala pelaksanaan tugas dan upaya mengatasinya. Dengan demikian dari analisis dapat diperoleh suatu kesimpulan umum mengenai eksistensi dan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata di Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: <sup>8)</sup>

- 1) Data sekunder yang bersifat publik, yaitu berupa data resmi yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata, yang dikeluarkan oleh Instansi Kejaksaan, misalnya data kinerja DATUN KEJAKSAAN, laporan, pengumuman, buku-buku dan dokumen publik lain yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.
- 2) Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi Kejaksaan dalam tugas dan Kewenangannya di bidang Perdata, yang terdiri dari :

---

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995, hal. 14.

<sup>8)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10.

- a) Undang-Undang No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
  - d) Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.
  - e) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum oleh Kejaksaan.
  - f) Peraturan Pemerintah lainnya.
  - g) Keputusan Presiden
  - h) Keputusan Jaksa Agung
  - i) Instruksi Jaksa Agung
- 3) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian, karya ilmiah, disertasi, literatur yang berhubungan erat dengan institusi Kejaksaan, Tugas dan Kewenangannya di bidang Perdata.
- 4) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, majalah, surat kabar.

Sedangkan data primer atau data yang diperoleh dari narasumber yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam mengkaji data sekunder diperoleh melalui penelitian di lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari nara sumber dan responden yang diarahkan kepada pendapat atau pandangan dari para pelaku dan praktisi di dalam Pelaksanaan tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.

b. Sumber data

Guna memperoleh data tersebut di atas, penentuan sumber data adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung sebagai Pelaksana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.
- 2) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata di wilayah Jawa Tengah.
- 3) Beberapa Kejaksaan Negeri di Wilayah Jawa Tengah.

#### 4. Teknik Penentuan Sampel

Untuk memperoleh data primer tidak didasarkan pada besarnya populasi, melainkan hanya merupakan data penunjang untuk melengkapi informasi data sekunder, sehingga sample dipilih secara purposive.<sup>9)</sup> Oleh karena itu ditetapkan responden yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan dan pelaksana Tugas Kejaksaan di bidang Perdata, yaitu pertama, institusi yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan Pelaksanaan Tugas Kejaksanaan di bidang Perdata, dan kedua institusi pelaksana operasional Wewenang Kejaksaan di bidang Perdata.

---

<sup>9)</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Satasin, Yogyakarta, 1998, hal. 10.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, disamping mempelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah :

- a. Dokumen dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Mengingat masih sedikitkan kajian hukum terhadap Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata, maka untuk memperoleh kejelasan atas dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan, diperlukan juga pendapat para ahli atau pakar guna melengkapi kajian terhadap bahan-bahan hukum tersebut, seperti telaah terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata.
- b. Wawancara, khususnya dilakukan terhadap nara sumber atau responden atau Institusi Kejaksaan dan institusi pemerintah. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur maupun wawancara bebas dan mendalam dengan informan terpilih untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti. Wawancara terstruktur dengan pemegang otoritas kebijakan operasional tugas dan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata, khususnya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata, dimaksudkan untuk

memperoleh data mengenai Sasaran lembaga Kejaksaan dengan adanya tugas dan kewenangannya di bidang Perdata, Operasional pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Wawancara mendalam, melalui informan kunci di kantor Kejaksaan Agung, dalam hal ini dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, ditujukan untuk memperoleh data mengenai Sasaran Lembaga Kejaksaan dengan adanya Tugas dan Kewenangan di bidang Perdata dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang Perdata. Untuk mendukung pelaksanaan wawancara, digunakan tape recorder dan catatan harian lapangan.

- c. Kuisisioner atau daftar pertanyaan yang dalam banyak hal dibuat dalam bentuk kombinasi antara terbuka dan tertutup. Kuisisioner tersebut ditujukan kepada institusi Kejaksaan yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang perdata, baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukum primer sekunder dan tersier, maupun data dari hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan, Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung oleh data primer dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan

metode pendekatan penelitian hukum yang normatif yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analitis normatif kualitatif.<sup>10)</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, setelah dilakukan kategorisasi masalah atau temuan, selanjutnya ditelaah dan dibahas dengan menggunakan pola pikir kontekstual sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Data yang berwujud angka, seperti misalnya pengembalian piutang negara yang berhasil diperoleh oleh Kejaksaan, jumlah Bank-bank negara yang bekerjasama dengan Kejaksaan dan lain-lain, akan di edit, diberi kode dan dikategorikan terlebih dahulu, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekunder. Terhadap data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata.

## G. KERANGKA PEMIKIRAN

GBHN tahun 1999 telah menentukan bahwa untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan dalam salah satu misinya, untuk mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif dan transparan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang merupakan unsur aparatur negara berkewajiban untuk mewujudkan isi GBHN, khususnya yang berisi pengarahan bagi kegiatan penegakan hukum.

---

<sup>10)</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *op cit*, hal 35.



Pasal 27 UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan bukan saja di bidang hukum pidana, melainkan juga di bidang Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung JAM DATUN lahir berdasarkan UU No 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 dan Keputusan Presiden No. 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Apabila dirinci, tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam operasionalnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi : <sup>5)</sup>

1. Penegakkan hukum ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Perdata dan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.
2. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau Lembaga negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata atau Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata atau Tata Usaha Negara, berdasarkan surat kuasa khusus.

---

<sup>5)</sup> Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara" buku I, Jakarta, 1992, hal 68.

3. Pelayanan hukum adalah pemberian jasa kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah perdata maupun tata usaha negara, diluar proses pengadilan.
4. Pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau pejabat tata usaha negara BUMN atau pejabat Tata Usaha Negara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media masa lainnya, diluar proses peradilan.
5. Tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum dibidang perdata atau Tata Usaha Negara di luar penegakkan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan mengakkan kewibawaan pemerintah.

Dalam penjelasan umum juga telah ditekankan bahwa Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Dalam lingkup disiplin perdata tentunya kalimat itu bermakna “melindungi kepentingan keperdataan rakyat”.

Hal ini lebih dipertegas lagi dalam pasal 21 butir f Keppres RI No. 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

“Melaksanakan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan, mewakili **kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat** baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.”

Selain itu, pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dari pasal ini jelas bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang di area hukum perdata yang tersebut dalam pasal 27 ayat (2), namun hal itu harus diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa terbuka kemungkinan Kejaksaan akan memperoleh tugas dan wewenang lain, baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan negara, pemerintah dan masyarakat.

Di dalam Pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1991 yang bersifat antisipatif itu ternyata terbukti, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana didalamnya termuat kandungan tugas dan wewenang baru, dimana Kejaksaan bisa :

- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dilakukan pemeriksaan (pasal 110);
- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dibubarkan (Pasal 117);

- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar likuiditor suatu PT diberhentikan dan diangkat likuiditor baru (pasal 123).

Tugas dan wewenang tersebut diberikan kepada Kejaksaan dengan status hukum mewakili kepentingan umum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tersebut merupakan langkah baru dalam sistem hukum Indonesia, dimana Kejaksaan diberi status hukum mewakili kepentingan umum dalam kaitannya dengan PT, tidak ditutup kemungkinan kepercayaan kekuasaan legislatif terhadap Kejaksaan akan berkembang, sehingga Kejaksaan di area hukum perdata yang lain, ditunjuk juga mewakili kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, dinyatakan bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 1 PP Nomor 17 tahun 2000 dinyatakan bahwa Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum. Contohnya, kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain :

- a. Debitor melarikan diri;

- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, dan atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan Kepentingan Umum.

Pasal 2 ayat 2 PP No. 17 tahun 2000 menyatakan : Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila :

- a. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
- b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Penjelasan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, inisiatif pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

## **I. SISTIMATIKA**

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini berikut ini akan diuraikan secara garis besar sistematika penulisan tesis yang terdiri dari 4 bab. Pada bagian Pertama (Bab

I) dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan dan permasalahannya, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan kerangka pemikiran. Bagian berikutnya ,yaitu Bab II diketengahkan tinjauan pustaka mengenai Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata.

Setelah tinjauan pustaka, pada Bab III dituangkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran, yang dituangkan dalam Bab IV.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**FUNGSIONALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN**  
**DALAM BIDANG PERDATA**

**A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN KEJAKSAAN**  
**DALAM BIDANG PERDATA**

**1. Sejarah kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata**

**a. Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Perdata Zaman Hindia Belanda.**

Politik hukum pemerintah Belanda kepada daerah-daerah jajahannya di Indonesia dilandaskan kepada asas konkordansi, yaitu harus ada persamaan antara peraturan hukum yang berlaku di Negeri Belanda dengan di Hindia Belanda. Asas ini diterapkan terutama di bidang hukum pidana terhadap daerah-daerah yang langsung di perintah (*directbestuurde gebieden*) oleh pemerintah kolonial.<sup>6)</sup>

Pada tanggal 30 April 1847 diumumkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijakan Justisi atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie (R.O)* dengan S. 1847-23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 (S. 1848-57).

Semula R.O ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.

---

<sup>6)</sup> H.R. Sadili Sastrawijaya, SH, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 17 Oktober 1985, hal. 22.

Untuk daerah-daerah diluar Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dimuat dalam Rechtreglement Buitengewesten (S. 1927-277) disingkat RBG.

Menurut pasal 2 R.B.G., ketentuan pasal I. V. VI dan VII R.O. dinyatakan berlaku pula untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.

Pasal 1 R.O. menetapkan adanya 7 badan-badan peradilan umum yaitu :

1. districtgerechten (Pengadilan-pengadilan Distrik atau Kawedanan);
2. regentschapsgerechten (Pengadilan-pengadilan kabupaten);
3. lanraden (Pengadilan-pengadilan Negeri);
4. landgerechten (Pengadilan-pengadilan Kepolisian);
5. residengerechte (Pengadilan-pengadilan Karisidenan);
6. raden van justitie (Pengadilan-pengadilan Justisi);
7. hooggerechtshof (Mahkamah Agung).

Yang akan kita soroti dalam Sejarah Kejaksaan ini hanyalah Pengadilan Negeri (landraad), Pengadilan Justisi (Raad van Justitie) dan Mahkamah Agung (Hooggerechtshof) saja, sebab badan-badan peradilan lainnya kurang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan.



Landraad adalah pengadilan yang sehari-hari bagi penduduk Bumiputera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana (Pasal 94 R.O.).

Raad van Justitie (R.v.J.) adalah pengadilan sehari-hari bagi penduduk golongan Eropa (Pasal 129 R.O.) dan merupakan peradilan Banding bagi Landraad (Pasal 128 R.O.). Ia juga berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk mengadili (Jurisdictione geschillen) antara Landraad (pasal 127 R.O.).

Hooggerechtshof adalah pengadilan tertinggi yang antara lain berwenang untuk :

1. mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang diputus oleh R.v.J (pasal 169 R.O.).
2. memutus perkara-perkara yang diminta kasasi (Pasal 170 R.O.).
3. memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum privilegiatum (pasal 163 R.O.), seperti para pejabat tinggi tertentu, para sultan dsb, serta perselisihan-perselisihan wewenang mengadili (jurisdictione geschillen) antara pengadilan-pengadilan tingkat banding, antara pengadilan sipil dan militer, pengadilan swapraja, dsb.

Dalam ketiga jenis badan peradilan ini ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang untuk pengembalian tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara yang dinamakan Openbaar Ministerie (O.M.). Lembaga ini mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

1. Mempertahankan segala peraturan negara;
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
3. Melaksanakan putusan pidana yang berwenang.

Di Hindia Belanda perihal O.M. itu diatur dalam pasal 55 R.O., HIR dan Reglement op de Stafvordering (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain dalam penegakkan hukum pidana OM juga mempunyai kekuasaan dalam bidang hukum perdata. Wewenang OM di bidang hukum perdata meliputi antara lain<sup>7)</sup> :

1. OM dapat mewakili negara dalam perkara perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat (S.1922-522);
2. Karena jabatannya OM berwenang meminta kepada Hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat yang lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (Pasal 134, 135, 137 dan 137a RO)
3. OM berwenang untuk meminta kepada Hakim agar suatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (pasal 1 butir 6 RO).

---

<sup>7)</sup> Ibid, hal. 26

4. Demi kepentingan umum OM berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum dinyatakan Pailit (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Failisemen);
5. OM didengar pendapatnya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (pasal 13 dan 14 BW);
6. OM wajib menuntut pembatalan kepada Hakim atas sesuatu perkawinan sebagaimana termaksud dalam pasal 27 hingga 34 BW.
7. OM dapat menuntut kepada Hakim agar seseorang Bapak atau Ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua atau *ouderlijkemacht*nya (pasal 319 BW);
8. OM berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (pasal 381 BW);
9. OM dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (pasal 463 dan 468 BW);
10. OM berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dan sebagainya (pasal 983, 985 dll BW);
11. O.M. berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (pasal 170 butir 1 RO).

Selain dari pada itu OM masih memiliki wewenang-wewenang tertentu dalam urusan catatan sipil untuk orang-orang Eropa, Cina dan Kristen Indonesia dan yang melakukan perkawinan campuran, dan sebagainya seperti yang dimuat dalam S. 1849-25, S.1917-130 jo S.1919-81, S. 1920-517 jo S.197-564, S.,1933-74, 1904-279.<sup>8)</sup>

Yang melaksanakan tugas OM di Landraad ialah para Opsir Justisi (Officer van Justitie) atau Subtitutnya, magistraat-magistraat (magistraten) atau ajunnya (pasal 54 butir 3a dan b jo pasal 93a RO jo pasal 62 RO).

Di Raad van Justitie (RvJ) tugas OM itu dilakukan oleh Officer van Justitie (Opsor Justisi) atau subtitutnya, sedangkan di Hoogerechshof (HG) oleh PG atau subtitutnya yang dinamakan Advocaat Generaal (sama dengan Jaksa Agung Muda sekarang).

b. Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Perdata Zaman Pendudukan Bala tentara Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Bala Tentara Jepang. Selama rakyat Indonesia menderita dibawah telapak kaki penjajah Jepang tanggal 8 Maret 1942 hingga 1945 kekuasaan OM sebagaimana digariskan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Zaman Hindia Belanda tetap berlaku, kecuali yang

---

<sup>8)</sup> Djoko Prakoso, SH, I Ketut Murtika, SH, **Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 18.

dicabut, dirubah atau diganti oleh peraturan-peraturan pemerintah bala tentara Jepang.<sup>9)</sup> Dengan demikian, maka posisi OM dalam konstelasi kenegaraan di zaman pemerintahan balatentara pendudukan Jepang tetap sama dengan yang berlaku di zaman Hindia Belanda.

c. Eksistensi Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata pada Zaman Republik Indonesia Proklamasi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Menurut Fakta-fakta yang ada, sampai dengan tahun 1977, organisasi dan tata kerja serta kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia lebih banyak menekankan kepada penegakkan bidang hukum pidana, dan sangat kurang memanfaatkan dan melaksanakan berbagai kewenangannya di bidang hukum perdata<sup>10)</sup>

Kenyataan ini menimbulkan kesan seolah-olah penegakkan hukum di bidang hukum perdata kurang diperhatikan oleh Kejaksaan, padahal wewenang-wewenang yang diberikan oleh peraturan-peraturan-peraturan negara kepada Kejaksaan itupun adalah untuk mempertahankan kepentingan umum pula.

Menyadari akan kekurangan tadi, maka sejak tahun 1977 perhatian Kejaksaan Agung terhadap berbagai wewenanganya di bidang hukum perdata mulai ditingkatkan.

Perhatian ini tercantum dalam organisasi dan tata kerja Bidang Operasi Kejaksaan Agung pada waktu itu di mana dalam Direktorat

---

<sup>9)</sup> H.R. Sadili Sastrawidjaya, SH, op cit, hal 33.

<sup>10)</sup> Ibid, hal 227.

Khusus diadakan Sub Direktorat Hukum Perdata. Namun demikian kegiatannya masih terbatas kepada upaya untuk memanfaatkan wewenang Jaksa untuk mewakili negara dalam perkara Perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat, berdasarkan S.1922-522.

Dalam surat No. B-49/C.3/1977 tanggal 26 Januari 1977, Jaksa Agung Muda Bidang operasi H.R. Sadili Sastrawidjaya, SH telah memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal instansi-instansi pemerintah menghendaki agar Jaksa mewakili mereka dalam perkara perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat, supaya kepada Jaksa diberikan surat kuasa.

Dalam rangka menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tugas Jaksa tidak hanya terbatas sebagai Penuntut Umum dalam pidana saja akan tetapi juga mendapat tugas khusus lain sebagai Pengacara Wakil Negara (Lansadvocaat) atau Penggugat dalam perkara yang diadili menurut acara Perdata (stbl-1922 Nomor 522 jo pasal 123 ayat 2 HIR).

Bila disimak maka tentu dikatakan bahwa Koningklijke Besluit S.1922 No. 522 tersebut saat ini tidak cocok dengan konstelasi hukum kita sekarang ini dan dikatakan sebagai produk hukum kolonial, tetapi kehadirannya sampai saat ini tetap berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru.<sup>11)</sup>

---

<sup>11)</sup> B.A.B Tobing dan Team, **Wewenang dan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Keperdataan**, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1988, hal. 26.

Berarti bahwa Koningklijk Besluit tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku namun dengan sendirinya harus disesuaikan dengan konstelasi hukum nasional kita, Struktur Pengadilan Umum, maupun kedudukan Jaksa dalam struktur Organisasi Kejaksaan RI.

Istilah-istilah asing dalam bidang hukumnya harus dilakukan dengan bahasa hukum yang sudah baku seperti Hooggerechtshof van Nederlabdsch Indie adalah Mahkamah Agung RI, sedangkan Raden Van Justitie sekarang adalah Kajati untuk selauruh Kejaksaan Tinggi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi, begitu juga dengan dimaksud Inlandsche Officier van Justitie adalah Jaksa-jaksa.<sup>12)</sup>

Pada pasal 3 Stbl 1922-522 mencantumkan "offisieren van justitie en de Jaksa's, legeean geen machtiging over de bij besluit aangewezen ambenaren of Land advocaten leggen een ongezegeld uittreksel uit het bettreklelijke register van besluiten over.

Maka terjemahan dari kata lands Advocaat kedalam bahasa Indonesia tiada lain akan menjadi Pengacara Negara.

Pada R.O hanya disebutkan kata advocaat sedang pada K.B. S. 1922-522 jelas disebutkan Lands Advocaat, namun demikian sifat dari tampilnya Procereur General, Officer Van Justitie, Jaksa didepan Pengadilan dalam proses perdata sebagai advocaat tentulah akan berarti sebagai Pengacara Negara dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>12)</sup> Ibid, hal 26.

## 2. Dasar Hukum Fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata.

- a. Dalam mewakili Kepentingan Pemerintah/BUMN/BUMD atau lembaga Negara.

- 1) stb. 1922 No. 522

Dalam Staatblad 1922 No. 522 Rechtswezen Reglementen Koninklijk Besluit Van 27 April 1922 Nomor 72, Betreffende de Vertegenwoordiging. Nan. den Lande in Rechten (Peradilan Reglemen Putusan Kerajaan tanggal 27 April 1922 Nomor 72 mengenai mewakili negara didepan/didalam Pengadilan) khususnya pasal 2 disebutkan bahwa dalam sengketa yang diadili menurut acara Perdata, maka yang bertindak untuk dan atas nama negara (Pengacara wakil Negara) adalah Jaksa atau Pegawai Negeri yang menjalankan tugas penuntutan pada Pengadilan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 stbl 1922 nomor 522 tersebut, tampilnya Jaksa sebagai Pengacara Negara hanya dapat terjadi apabila telah ada kuasa khusus dari Pimpinan Departemen atau oeh Kepala Daerah yang dalam daerahnya diadakan persidangan oleh hakim, baik untuk perkara-perkara tertentu maupun untuk sebuah perkara tersebut.

Dari kata-kata "Perkara yang diadili menurut acara Perdata" tersimpul pengertian bahwa tugas wewenang Jaksa sebagai Pengacara Wakil Negara (Lands Advocaat) berarti :

- Menjadi Tergugat;



- Menjadi Wakil Penggugat;
- Melakukan tugas acara Perdata lainnya dalam rangka pengajuan permintaan kepada Pengadilan untuk eksekusi, dan sebagainya.<sup>13)</sup>

b. HIR pasal 123 ayat (2)

Dalam Pasal 123 (2) HIR disebutkan bahwa Pegawai Negeri yang karena vordering umum, menjalankan perkara untuk pemerintah sebagai wakil Negara, tidak perlu memakai surat kuasa yang teristimewa itu.

Akan tetapi Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 stbl 1922 nomor 522 , tampilnya Jaksa sebagai Pengacara Negara hanya dapat terjadi apabila telah ada kuasa khusus dari Pimpinan Departemen atau oeh Kepala Daerah yang dalam daerahnya diadakan persidangan oleh hakim, baik untuk perkara-perkara tertentu maupun untuk sebuah perkara tersebut.

2) UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, secara tegas disebutkan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata :

“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah”.

---

<sup>13)</sup> Ibid, hal 24.

Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata semakin jelas bila kita melihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan seagai tergugat maupun penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa selaku wakil negara atau wakil pemerintah baik dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung bahkan diluar Pengadilan dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat atau tergugat. Tugas dalam perkara perdata maupun dalam perkara Tata Usaha Negara berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Negara.<sup>14)</sup>

### 3) Keppres No. 86 Tahun 1999

---

<sup>14)</sup> I Ketut Murtika, SH, Djoko Prakoso, SH, **Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata**, Bina Aksara, Jakarta, Februari 1988, hal. 9.

Dalam BAB VII, Bagian Pertama Pasal 308 disebutkan tentang kedudukan, Tugas dan Wewenang Serta Fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 20 Keputusan Presiden No. 86 tahun 1999 disebutkan :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

Dalam pasal 21 Keppres No.86 tahun 1999 dirincikan tentang fungsi JAM DATUN, yaitu:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan

membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadminsitrasiannya;

- c. pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dn instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan tata usaha negara;
- d. pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian sarana pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait dipusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturny penidik serta penuntut umum dan penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan / perekonomian negara;
- f. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili **kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat** baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri;
- g. pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

- h. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan;
- i. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- j. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Sebagai pelaksanaannya, ditetapkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

#### 4) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/J.A/10/1999.

Pada BAB VII Bagian Pertama diatur mengenai kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung, pada pasal 308, 309, dan pasal 310, sebagai berikut :

Pasal 308 :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha negara”.

Pasal 309 :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

Pasal 310 :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadminsitrasiannya;
- c. pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dn instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun

- tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan tata usaha negara;
- d. pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian sarana pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait dipusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - e. pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dan penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan / perekonomian negara;
  - f. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili **kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat** baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri;
  - g. pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum;
  - h. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan;

- i. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sedangkan Susunan Organisasi JAM DATUN diatur dalam bagian Kedua , pada Pasal 311, yaitu :

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. Direktorat Perdata;
  - c. Direktorat Tata Usaha Negara;
  - d. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak;
  - e. Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dalam mewakili kepentingan Umum
- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum juga telah ditekankan bahwa Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan



menegakkan kewibawaan pemerintah serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Dalam lingkup disiplin perdata tentunya kalimat itu bermakna “melindungi kepentingan keperdataan rakyat”.

Selain itu, pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dari pasal ini jelas bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang di area hukum perdata yang tersebut dalam pasal 27 ayat (2), namun hal itu harus diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa terbuka kemungkinan Kejaksaan akan memperoleh tugas dan wewenang lain, baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan negara, pemerintah dan masyarakat.

## 2) UU Nomor 1 Tahun 1995.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana didalamnya termuat kandungan tugas dan wewenang baru, dimana Kejaksaan bisa :

- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dilakukan pemeriksaan (pasal 110);
- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dibubarkan (Pasal 117);
- Memohon kepada Pengadilan Negeri agar likuiditor suatu PT diberhentikan dan diangkat likuiditor baru (pasal 123).

Tugas dan wewenang tersebut diberikan kepada Kejaksaan dengan status hukum mewakili kepentingan umum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tersebut merupakan langkah baru dalam sistem hukum Indonesia, dimana Kejaksaan diberi status hukum mewakili kepentingan umum dalam kaitannya dengan PT, tidak ditutup kemungkinan kepercayaan kekuasaan legislatif terhadap Kejaksaan akan berkembang, sehingga Kejaksaan di area hukum perdata yang lain, ditunjuk juga mewakili kepentingan umum.

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, dinyatakan bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 1 PP Nomor 17 tahun 2000 dinyatakan bahwa Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum.

- 4) Keppres RI No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Daam pasal 1 butir f Keppres RI No. 86 tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Melaksanakan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.”

Dari ketentuan di atas jelas bahwa Kejaksaan di bidang Keperdataan mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan masyarakat.

### 3. Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata

#### a. Penegakan Hukum

Ada dua tugas berat yang kini diemban oleh Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakkan hukum dan melaksanakan Pembangunan di segala bidang. Kedua bidang tugas tersebut haruslah senantiasa selaras antara satu dengan lainnya. Kejaksaan sebagai Aparatur Penegak hukum, juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan

pemerintah serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum, baik dalam bidang pidana maupun perdata.

Usaha menegakkan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Negara kita sebagai sebuah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana Supremasi Hukum harus tetap dipegang teguh dan berada diatas segala-galanya. Menegakkan hukum adalah merupakan sebuah prasarat bagi sebuah negara hukum disamping jaminan dan pengakuan hak-hak asai manusia dan kebebasan peradilan.<sup>15)</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).<sup>16)</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada

---

<sup>15)</sup> Abdurrahman, SH, "Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia", Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 12.

<sup>16)</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Mengenal Hukum, Suatu Pengantar", Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1996, hal. 140.

dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ke tiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum harus adil.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan diatas, disamping tugas dalam penegakkan hukum pidana, Kejaksaan juga mempunyai tugas penegakkan hukum dalam bidang perdata.

Tugas keperdataan Kejaksaan dalam Penegakkan hukum ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan di dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.<sup>17)</sup>

Sebagai pelaksanaannya diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :INS-001/G/9/1994, tentang Tata Laksana Penegakkan Hukum.

Penegakkan hukum dalam kasus perdata dapat dilakukan Kejaksaan dalam kedudukannya selaku penggugat atau Pemohon.

Selaku Penggugat :

---

<sup>17)</sup> Tindak Lanjut Raker 1993/1994, JAM DATUN KEJAKSAAN AGUNG RI, Jakarta, hal 50.

Kejaksanaan karena jabatannya dapat melakukan penegakkan hukum dengan mengajukan gugatan perdata antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :<sup>18)</sup>

1. Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi. ✓
2. Tuntutan Jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan.
3. Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan tuntutan Jaksa dalam perkara pidana umum, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau diputus oleh Pengadilan.
4. Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya, tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.
5. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
6. Pengajuan permohonan kepailitan (menurut pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan No 4 tahun 1998).
7. Permohonan pembubaran PT (Pasal 17 UU No. 1 tahun 1995).

---

<sup>18)</sup> *ibid*, hal. 53.

8. Pembatalan pendaftaran merek dagang.
9. Meminta agar Balai harta Peninggalan diperintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
10. Menuntut agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
11. Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
12. Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

#### Selaku Pemohon :

Kejaksaaan karena jabatannya dapat melakukan penegakkan hukum dengan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, berupa pembatalan atau pencabutan izin yang diterbitkan oleh Insansi tersebut.

Dalam melakukan penegakkan hukum perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penguasaan kasus dengan mantap sehingga tidak terdapat keraguan terhadap keberhasilan gugatan atau permohonan yang dilakukannya.
- b. Kelengkapan alat-alat bukti (formil maupun materiil ) serta hal-hal yang relevant.



- c. Bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk konsultasi dengan instansi yang berwenang.

Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum, prosedur yang dilakukan adalah :

- a. Sebelum melakukan tindakan dalam rangka penegakkan hukum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri / Kepala Kejaksaan Negeri membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan atau petunjuk.
- b. Bila penegak hukum dimaksud dinilai berdampak luas atau menarik perhatian masyarakat, agar Kepala Kejaksaan Tinggi membuat laporan dan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada JAM DATUN, disertai alasan hukum tepat.
- c. Terhadap setiap tindakan penegakkan hukum, dibuat telaahan yang memuat analisa hukum yang tepat.

#### b. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu

dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya.<sup>21)</sup>

Menurut Dr. Capalleti, arti dan tujuan daripada program bantuan hukum di negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan jelas.<sup>22)</sup>

Meskipun demikian, kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Barry Metzger<sup>23)</sup> bahwa program bantuan di negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat, yang pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu , pertama bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan kedua bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa peri-kemanusiaan.

Bahkan lebih dari itu, Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain :

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.

---

<sup>21)</sup> Djoko Prakoso, SH, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 30 Juli 1985, hal. 44.

<sup>22)</sup> Dr. Mauro Cappaeti, Eral Johnson Jr. dan James GordLey "Toward Equal Justice : A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies" Dobbes Ferry, New York, 1975, hal.3.

<sup>23)</sup> Barry Metzger, "Legal Services to the Poor and National Development Objectives," dalam buku *Legal Aid and World Poverty* Prege Publishers, 1974.

3. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan
5. Untuk memperkuat profesi hukum.

Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.<sup>24)</sup>

Di Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum setidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Anggaran Dasar LBH menyebutkan tujuan LBH adalah :

1. memberikan pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
2. mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; terutama hak-haknya sebagai subyek hukum;
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

---

<sup>24)</sup> Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum Di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, Juni 1981, hal.2. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum ini tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti "Tjandra Naya: di Jakarta dan dan fakultas-fakultas Hukum Negeri dengan Biro-Biro konsultasi hukumnya dalam bentuknya yang sederhana sudah melakukannya sejak dulu. Hanya saja usaha itu pada waktu itu masih terbatas sekali, baik dalam arti orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja (*group ient*), ataupun terbatas pada pemberian nasehat hukum dan konsultasi saja.

Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di Asia, Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya.<sup>25)</sup>

Di samping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan yang menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga bantuan Hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Tentang bantuan hukum, di dalam KUHAP diatur di dalam Bab VII, yang terdiri dari pasal 69 sampai dengan pasal 74. Seperti yang diuraikan di atas, maka pasal-pasal itupun sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak-hak tersangka untuk atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Kehakiman.

Menurut Dr. Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum sebagai lembaga dan proses, sebetulnya, mencakup paling sedikit tiga faktor :<sup>26)</sup>

- (1) Bantuan keahlian atau bantuan dari ahli-ahli hukum;

---

<sup>25)</sup> Ibid, hal. 9.

<sup>26)</sup> Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA dan Mustafa Abdullah, "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat", Penerbit CV Rajawali, Jakarta 1980, hal. 131

- (2) Adanya suatu bentuk organisasi yang menyelenggarakan bantuan hukum;
- (3) Penerapan hukum terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan dan diatur oleh hukum tersebut.

Diantaranya, inti dari bantuan hukum adalah “bantuan keahlian atau bantuan dari ahli-ahli hukum”.

Pada umumnya dikenal beberapa bentuk bantuan hukum, sebagai berikut :<sup>27)</sup>

- (1) Bantuan Hukum preventif yang tujuannya memberikan penerangan atau penyuluhan tentang hak dan kewajiban subyek hukum, peristiwa hukum yang mungkin dialami subyek hukum, hubungan hukum yang menyangkut subyek hukum, peraturan perundang-undangan yang perlu difahami dan seterusnya secara umum kepada masyarakat;
- (2) Bantuan Hukum diagnosik yang tujuannya memberikan petunjuk/nasehat hukum mengenai peristiwa-peristiwa konkrit tertentu, bimbingan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, bagaimana mengatasi suatu sengketa, dan lain-lain.
- (3) Bantuan hukum untuk mengatasi sengketa misalnya bantuan hukum di dalam dan diluar proses peradilan.

---

<sup>27)</sup> Ibid, hal 132.

- (4) Bantuan hukum untuk membentuk hukum, misalnya memberikan bahan-bahan untuk menghasilkan yurisprudensi yang adil.
- (5) Bantuan hukum untuk mengadakan pembaharuan hukum.

Bantuan Hukum dapat diberikan oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, juga Lembaga Bantuan Hukum. Akan tetapi bantuan hukum bisa juga diberikan oleh seorang Sarjana Hukum yang diharapkan akan lebih peka terhadap masalah hukum si miskin dan mengambil bagian secara aktif dalam program bantuan hukum.<sup>28)</sup>

Di atas telah dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, negara juga memerlukan bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini dapat diwakilkan oleh Kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan :

“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah.”

---

<sup>28)</sup> Adnan Buyung Nasution, op cit, hal.83.

Tugas bantuan Hukum Kejaksaan dalam bidang Perdata adalah pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Dalam hal ini tugas bantuan hukum Kejaksaan dilakukan dalam mengatasi sengketa, baik di dalam maupun diluar proses pengadilan (litigasi maupun non litigasi) dan hanya dapat diberikan untuk Instansi Negara. Tugas Bantuan Hukum bertujuan untuk memulihkan kekayaan negara dan menyelamatkan asset-asset negara.

Kegiatan bantuan hukum merupakan kegiatan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum dapat diberikan oleh Kejaksaan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah atau sengketa perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD. Bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh Kejaksaan kepada :

- 1) Instansi pemerintah (baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah).
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari Negara/Pemerintah Republik Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah Bank Milik Pemerintah, seperti BNI 1946, BRI dan Bank Mandiri.

- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yaitu badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari Pemerintah Daerah di Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah anak Milik Pemerintah Daerah.

Bantuan hukum ini dapat dilaksanakan baik melalui pengadilan (litigasi) maupun tanpa melalui pengadilan (non litigasi). Bantuan hukum diluar pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan cara mewakili pihak Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD, dalam bernegosiasi guna menyelesaikan masalah atau sengketa perdata.

Contoh kasus :

- Kasus klaim Perusahaan Penerbangan Jerman Lufthansa

Kasus ini sebenarnya terjadi di Bali atau di lapangan terbang Ngurah Rai, Denpasar, sekaligus gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada sekitar tahun 1992 sebuah pesawat terbang milik Maskapai Penerbangan Lufthansa mengalami kerusakan mesin ketika melakukan pendaratan di Bandar Udara Ngurah Rai, karena aspal bandar udara ternyata terkelupas dan memasuki mesin jet pesawat pada saat roda pesawat menyentuh landasan.

Pihak Lufthansa kemudian mengajukan gugat perdata terhadap Menteri Perhubungan RI dan PT Angkasa Pura (yang pada saat itu masih bernama Perum Angkasa Pura). Kejaksaan menerima surat kuasa khusus untuk mewakili pihak Menteri Perhubungan RI dan



Direksi Perum Angkasa Pura sebagai para tergugat dalam perkara ini.

Sekalipun gugatan di dalam perkara ini sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini sudah diselesaikan melalui perdamaian di luar pengadilan (sesudah pihak Lufthansa mencabut gugatannya). Dalam perkara ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditugaskan menemui fakta bahwa pada saat kasus ini terjadi landasan di bandar udara Ngurah Rai masih berada di bawah perawatan pihak Kontraktor dan pihak kontraktor dijamin oleh sebuah perusahaan asuransi dalam bentuk perjanjian pertanggungan terhadap gugatan pihak ketiga (Third Partily Liabilities Insurance), JPN telah meminta agar klaim diajukan bukan terhadap pemerintah RI melainkan terhadap perusahaan asuransi tersebut. JPN kemudian menghubungkan Luthfansa dengan perusahaan asuransi bermaksud dan sesudah melalui proses negosiasi yang panjang, pihak perusahaan asuransi pada akhirnya bersedia untuk membayar klaim Lufthansa pada jumlah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tidak semua sengketa perdata atau tata usaha negara harus diselesaikan melalui pengadilan, karena masalah tersebut dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, mediasi, fasilitasi atau arbitrase.

Bantuan hukum dapat juga dilaksanakan melalui proses pengadilan. Dalam perkara Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum dalam hal Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD digugat di hadapan pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara perdata bantuan hukum dapat diberikan oleh Kejaksaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tersebut berkedudukan sebagai Tergugat, maupun pada saat Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tersebut berkedudukan sebagai Penggugat.

Bantuan hukum dapat juga diberikan oleh Kejaksaan bukan saja untuk kepentingan penyelesaian perkara-perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan di dalam negeri, tetapi juga untuk penyelesaian perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan di luar negeri.

Dalam penyelesaian perkara di hadapan pengadilan di luar negeri Kejaksaan memang tidak dapat tampil langsung mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD di hadapan pengadilan di luar negeri. Bantuan hukum dari Pengacara setempat memang diperlukan. Sekalipun demikian, Kejaksaan dapat diminta untuk memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara semacam ini, dengan cara membantu Pengacara asing yang ditugaskan dalam hal menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, mencari informasi dari saksi-saksi yang berdomisili di Indonesia, menghimpun bukti-bukti

yang berada di Indonesia serta menghipun ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang relevan dalam penyelesaian perkara termaksud.

Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat memberikan bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, baik dalam kedudukan selaku penggugat atau tergugat dalam kasus Perdata atau sebagai Tergugat dalam kasus Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Pelayanan Hukum**

Pelayanan Hukum adalah salah satu bentuk dari Bantuan Hukum, dimana Tugas Kejaksaan dalam pelayanan hukum hanya dalam bidang perdata.

Tugas Kejaksaan di bidang Perdata dalam Pelayanan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah perdata maupun tata usaha negara, diluar proses peradilan.

Sedangkan tugas Kejaksaan di bidang perdata dalam pelayanan hukum, yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat di bidang Perdata ataupun Tata Usaha Negara.
2. Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi.
3. Pelayanan hukum dapat diberikan secara lisan dan tertulis, sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.

4. Dalam hal permintaan pelayanan hukum dialamatkan kepada beberapa instansi penegak hukum, agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesamaan pemahaman antara instansi penegak hukum yang bersangkutan.
5. Pemberian pelayanan hukum dilakukan secara optimal, obyektif, berdasarkan hukum dan rasa keadilan dengan penuh kebijaksanaan.
6. Untuk dapat memberikan pelayanan hukum secara baik dan optimal, perlu diciptakan suasana hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi lain atau dengan masyarakat.
7. Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pelayanan hukum, misalnya karena sulit diperoleh pemecahannya, agar melalui jalur hierarki dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapatkan petunjuk.

d. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum sebenarnya merupakan bagian dari Bantuan Hukum, sebagaimana dikemukakan diatas.

Tugas Kejaksaan di bidang Perdata dalam Pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui forum

koordinasi yang ada atau melalui media lainnya diluar proses peradilan.

Fungsi Kejaksaan dalam pertimbangan hukum dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD misalnya saja dalam hal penyusunan kontrak/perjanjian. Tujuannya adalah agar jangan sampai perjanjian atau kontrak tersebut mengandung ketentuan atau klausul yang merugikan pihak Pemerintah/BUMN/BUMD.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hanya diberikan kepada instansi negara atau pemerintah, baik diminta atau tidak.
2. Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan berlandaskan hukum.
3. Pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan melalui forum rapat muspida atau pada forum lainnya yang membicarakan/membahas permasalahan yang mengandung aspek hukum, antara lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, pembebasan tanah, pengusuran, perizinan, pencabutan izin dan lain-lain.
4. Untuk keberhasilan dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap.

e. Tindakan Hukum Lain

Tugas Kejaksaan di bidang Perdata dalam Tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara diluar penegakkan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah atau sengketa melalui cara non litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Contohnya adalah kegiatan penyelesaian masalah atau sengketa perdata melalui negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mempercayakan Kejaksaan untuk menjadi mediator atau Fasilitator dalam penyelesaian masalah atau sengketa tersebut.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan tindakan hukum lain, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan hukum lain adalah merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan atau kasus yang tidak terselesaikan dengan menggunakan bantuan hukum, penegakan hukum maupun pertimbangan hukum, baik di bidang perdata maupun tata usaha negara.

2. Dalam melaksanakan tindakan hukum lain, harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektivitas, keadilan, kelayakan dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
3. Apabila terdapat keraguan dalam melakukan tindakan hukum lain, agar melalui jalur hierarki dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapatkan petunjuk.

#### 4. Instrumen Perdata sebagai tindak lanjut penanganan kasus pidana.

Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 khususnya pasal 20 menugaskan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengamankan atau menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dengan instrumen hukum perdata. Dalam perkara pidana umum maupun khusus, tidak tertutup kemungkinan kekayaan negara dirugikan sebagai akibat tindakan pidana tersebut.<sup>30)</sup> Contoh : truk tangki minyak yang menabrak jembatan krasak di Jawa Tengah, sehingga jembatan roboh atau tindakan korupsi di suatu instansi pemerintah. Kerugian negara ini seyogyanya dipulihkan dan pemulihan ini bisa menggunakan instrumen hukum perdata.

Dalam kaitannya dengan kasus pidana, maka tugas ini dilaksanakan karena jabatan maupun karena adanya SKK (Surat Kuasa Khusus).<sup>31)</sup>

##### a. Karena Jabatan

<sup>30)</sup> Jam Datun, **Profil Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara**, Jakarta, hal 36.

<sup>31)</sup> Ibid, hal 37.

Tugas ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pidana khusus, yaitu sebagai tindak lanjut dari operasi yustisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Konkritnya terjadi bila tuntutan pembayaran uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara korupsi dikabulkan oleh Hakim dan ditetapkan dalam Vonis. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara pidana khusus, terutama korupsi, instrumen perdata bisa digunakan untuk menarik pembayaran uang pengganti dari terpidana. Untuk menagih uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tidak diperlukan SKK, karena kapasitas Jaksa disini adalah pelaksana keputusan Pengadilan.

b. Karena adanya SKK

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berkewajiban mengamankan atau menyelamatkan asset negara dengan instrumen hukum perdata, baik melalui sebagaimana diatur dalam pasal 98 s/d 101 KUHP yaitu penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atau dengan gugatan perdata terpisah dengan perkara pidananya; dalam hal ini diperlukan SKK dari instansi (pihak) yang dirugikan.

Penggunaan instrumen perdata ini tentunya perlu persiapan yang baik, misalnya : pencarian harta kekayaan



terdakwa/terpidana untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag).<sup>32)</sup>

## **B. MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI JAM DATUN**

### **1. Hubungan Datun Kejaksaan dengan Instansi Lain**

#### **a. Hubungan DATUN Kejaksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Dalam rangka melakukan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan peborosan kekayaan negara, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.<sup>33)</sup> Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 ditujukan kepada :

1. Para Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

---

<sup>32)</sup> *ibid*, hal 37.

<sup>33)</sup> Tanpa nama Pengarang, *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*, Dharma Bakti, Jakarta, 1985, hal 30.

## 7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Dalam Bab V tentang Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Pasal 11 disebutkan :

- (1) Dalam merumuskan kebijaksanaan pengawasan dan secara terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaannya, Wakil Presiden dibantu oleh MENKO EKUIN & WASBANG dan kepala BPKP.
- (2) Berdasarkan kebijaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang dihadiri oleh :
  - a. Para Menteri;
  - b. Panglima ABRI;
  - c. Jaksa Agung;
  - d. Para Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dalam Pasal 16 (2) Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 diatur tentang tindak lanjut Pengawasan fungsional baik Pidana, administrasi maupun perdata, sebagai berikut :

- (a) Tindakan adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (b) Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain ;
  - tuntutan ganti rugi / penyetoran kembali;
  - tuntutan perbendaharaan;
  - tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain.
- (c) Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi dan lain-lainnya.
- (d) Tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dari tiga macam tindak lanjut tersebut yang sampai saat ini belum jelas penanganannya adalah tindak lanjut perdata, padahal dapat diperkirakan bahwa temuan BPKP yang mempunyai kualifikasi perdata ada, bahwa jumlahnya bisa melebihi yang berkualifikasi pidana dan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan.

Dari hasil pemeriksaan BPKP terdapat kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, tetapi terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan/asset negara. Terhadap kasus-kasus ini penanganannya selain tidak jelas juga belum uniform, sehingga ada

kemungkinan kerugian keuangan/asset negara tersebut tetap merupakan kerugian.<sup>34)</sup>

Dari Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, juga tidak jelas bagaimana penanganan kasus-kasus tersebut. Instrumen hukum perdata secara kasuistis bisa digunakan untuk menangani dan memulihkan kerugian yang dialami oleh pemerintah, baik melalui litigasi maupun non litigasi. Dengan kata lain, bahwa hasil pemeriksaan BPKP yang masuk dalam kualifikasi kasus perdata, perlu ditindak lanjuti dengan menggunakan instrumen hukum perdata.

Pendekatan Kejaksaan Agung dengan BPKP saat ini sedang berlangsung ditingkat pusat dalam rangka tindak lanjut perdata. Urgensi adanya tindak lanjut perdata diangkat oleh Kejaksaan terutama dalam Rapat Koordinasi Pengawasan tanggal 15 Februari 1993 yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Lembaga Non Departemen, dimana Wakil Presiden memberikan petunjuk :

“Sesuai peraturan yang berlaku, tuntutan ganti rugi oleh Pemerintah terhadap yang bertanggung jawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta antuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Cara ini biasanya dilakukan sekiranya instansi yang bersangkutan menganggap Kejaksaan akan dapat lebih efektif melaksanakannya”.

---

<sup>34)</sup> Jam Datun, op cit, hal 54.

e. Hubungan DATUN Kejaksaan dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN yang berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan adalah merupakan lembaga yang sangat berperan dalam masalah kerugian keuangan negara.<sup>35)</sup>

PUPN lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang PUPN tanggal 14 Desember 1960. Susunan keanggotaan PUPN terdiri dari unsur Departemen Keuangan, ABRI, Kejaksaan dan BI sebagaimana diatur dalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 jo Keppres Nomor 11 tahun 1976 tentang PUPN dan BUPN jo Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-1075/IV/8/1976 yang dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 294/KMK.09/1993.

Tugas dan fungsi PUPN baik ditingkat pusat maupun daerah tingkat I antara lain mengurus penyelesaian piutang Negara yang harus dibayar kepada Instansi pemerintah/BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara, baik di Pusat maupun di daerah, dan yang telah diserahkan kepadanya, serta dengan syarat bahwa adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.

Pasal 6 huruf b UU Nomor 49 Tahun 1960 menyatakan :

“Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian

---

<sup>35)</sup> Ibid, hal 49

kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya”.

Sejak lahirnya Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 yang menjadi dasar dari terbentuknya BUPN sebagai suatu badan yang menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan berada di bawah serta langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dalam BUPN ini hanya ada unsur Departemen Keuangan, tidak ada unsur lain termasuk tidak ada unsur Kejaksaan. Berdasarkan pasal 2 Keppres no. 11 tahun 1976, kedudukan dan peranan Kejaksaan tersebut mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya tugas dan fungsi BUPN yaitu hanya “membahas pengurusan piutang negara dan melakukan pengawasan terhadap piutang negara” sedangkan operasionalisasinya sesuai dengan pasal 8 diselenggarakan oleh BUPN.

Dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1991 yang mencabut Keppres Nomor 11 tahun 1976, maka lahir BUPLN yang mengurus tidak saja piutang negara tetapi juga lelang negara. BUPLN berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tidak ada unsur lain dalam BUPLN kecuali hanya unsur Departemen Keuangan.

Piutang negara (termasuk kredit macet) pada hakekatnya adalah masalah perdata atau hubungan hukum perdata, sehingga terhadap piutang negara yang tidak dapat diserahkan penanganannya kepada pengacara (swasta), maka Kejaksaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2)

UU No. 5 tahun 1991 dapat memberikan bantuan hukum untuk menangani sepanjang ada yang meminta dan memberikan kuasa khusus. Hal tersebut sejalan dengan pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang pengurusan Piutang Negara yang berbunyi :

Pasal 2 :

“Pengurusan piutang negara yang telah jatuh tempo dan belum dinyatakan macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh instansi pemerintah/badan negara/badan usaha yang bersangkutan sampai piutang negara tersebut dinyatakan macet.”

pasal 3 :

“Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berhasil dan piutang tersebut telah dikategorikan macet, Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha dimaksud wajib menyerahkan pengurusan piutang tersebut kepada PUPN”.

Selanjutnya pasal 4 mensyaratkan bahwa :

“Penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan kepada PUPN melalui BUPLN disertai data/dokumen dst”.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, terdapat istilah “Piutang Negara yang telah jatuh tempo dan belum dinyatakan macet”, yang meliputi juga persoalan kredit bermasalah, dimana menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut pengurusannya pada

tahap pertama diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan. Pada tahap tersebut, instansi yang bersangkutan dapat menangani sendiri kasusnya, tetapi juga dapat meminta bantuan Kejaksaan. Dalam kaitan inilah, bahwa antara PUPN dengan Kejaksaan baik dari segi hukum maupun segi praktek penanganan piutang negara, keduanya dapat saling mengisi.

Penyanderaan (*Gijzeling*) atau paksa badan (*Lifsdwang*) menurut pasal 10 ayat (3) UU Nomor 49 Prp Tahu 1960 dan pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993 ditandatangani oleh Ketua PUPN (bukan Ketua BUPLN). Pengaturan Penyanderaan selanjutnya diatur dalam TLN Nomor 2104 Tahu 1960 yang antara lain menegaskan bahwa perintah tertulis penyanderaan maupun pelepasan dari sandera harus mendapat izin tertulis dan dilaksanakan atas perintah Kejaksaan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi.

Untuk melaksanakan tugasnya itu PUPN dibekali wewenang khusus termasuk wewenang yang bersifat yudikatif, sehingga Panitia itu dilualifisir sebagai peradilan semu (*quasi rechtspraak*).

Dengan adanya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara maka peranan Kejaksaan dalam PUPN dipusat maupun didaerah harus lebih ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga keberadaan Kejaksaan dirasakan manfaatnya bagi PUPN dan bagi keberhasilan penanganan kredit macet.



Penanganan masalah hukum oleh Kejaksaan pada hakekatnya adalah penangan oleh PUPN sendiri, karena Kejaksaan adalah unsur PUPN.

## 2. Lingkup Kegiatan :

### a. Di dalam Pengadilan (litigasi)

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu konflik yang diritualisasikan yang menggantikan konflik yang sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada sorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.<sup>36)</sup>

Namun, litigasi ini memiliki banyak kekurangan. Litigasi ini memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (advocacy) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (substantive), atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrim yang dan sering kali marginal, dengan demikian menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.

---

<sup>36)</sup> Gary Goodpaster, "Arbitrase di Indonesia : Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 1995 hal. 5. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum, sebagai suatu proses gugatan, litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas bagi para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

Selanjutnya, oleh karena hukum dan status dari fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya. Dalam litigasi, para pihak hanya dapat mengungkapkan kekhawatiran/persoalan yang dikenal dalam sistem hukum. Penasehat hukum harus menerjemahkan sengketa sesungguhnya dari para pihak ke dalam istilah-istilah hukum dan persoalan-persoalan yang dapat diproses oleh sistem hukum.

Litigasi juga tidak cocok untuk sengketa bersifat *polisentris*, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa alternatif penyelesaian.<sup>37)</sup>

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata, meliputi Litigasi dan non litigasi.

Kegiatan Datun Kejaksaan dalam Litigasi, meliputi kegiatan Kejaksaan, sebagai pihak penggugat maupun tergugat dengan pedoman dasar, bahwa litigasi merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara DATUN (The Last Resort), karena penyelesaian dengan damai di luar Pengadilan merupakan upaya pertama dan utama.

Kegiatan litigasi ini diatur dalam Insja Nomor : INS-001/G/9/1994 tanggal 1 September 1994 tentang Tata Laksana Penegakkan Hukum

---

<sup>37)</sup> Ibid, hal. 6. Proses-proses Litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Namun dalam beberapa sengketa untuk memperoleh hasil yang terbaik, akan lebih baik mengembangkan jumlah persoalan maupun pihak yang terlibat.

dan Insja Nomor : INS-002/G/09/1994 tanggal 1 September 1994 tentang Tata Laksana bantuan Hukum.

Penegakkan hukum adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasar putusan pengadilan di dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

Dalam bantuan hukum, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat memberikan bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat dalam kasus perdata, atau sebagai tergugat dalam kasus tata usaha negara.

Disamping itu berbagai fungsi keperdataan lainnya (Civiele Werzaamheden) diluar UU Nomor 5 Tahun 1991 yang secara formal masih berlaku, yang mana dalam operasionalisasi penugasan tersebut umumnya tidak memerlukan SKK karena wewenang tersebut telah melekat pada Kejaksaan sebagai lembaga yang harus menegakkan hukum, misalnya :

- 1) Membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan di muka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (UU Nomor 1 tahun 1974).
- 2) Pengajuan permohonan kepailitan (menurut pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan No 4 tahun 1998).

3) Permohonan pembubaran PT (Pasal 17 UU No. 1 tahun 1995).

b. Diluar Pengadilan (Non Litigasi);

Kegiatan ini meliputi pemberian pertimbangan hukum, opini hukum, nasehat hukum, pembuatan tata naskah hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan sebagainya.

Tata laksana dari kegiatan ini sebagaimana telah disebutkan di atas, diatur dalam Insja Nomor:Ins-002/G/9/1994 dan Insja Nomor ; INS-003/G/9/1994 tanggal 1 September 1994.

Selain bertindak sebagai kuasa instansi pemerintah atau BUMN/BUMD dihadapan pengadilan (litigasi), JPN dapat juga melakukan penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).

Terutama dalam kasus-kasus perdata, pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution. Cara ini sebenarnya lebih cocok dengan sistem kemasyarakatan kita, yang bila menghadapi suatu masalah yang membutuhkan persetujuan antara pihak-pihak terkait, penyelesaian yang paling baik adalah penyelesaian melalui asas musyawarah dan mufakat.

ADR ini ditempuh karena penyelesaian melalui pengadilan (ordinary court) dianggap terlalu formalistik, memakan waktu yang lama dan

mahal. Selain itu, putusan-putusan pengadilan sering dianggap tidak memuaskan.<sup>38)</sup>

ADR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum nasional kita dianggap sebagai perluasan dari lembaga “dading” dalam pasal 130 HIR dengan memanfaatkan asas “kesepakatan” dalam pasal 1338 KUH Perdata (BW), kedua ketentuan mana mengandung prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Prinsip penyelesaian dalam cara ini adalah “win-win solution”.

Jenis-jenis ADR yang dikenal yang mungkin dimanfaatkan oleh JPN dalam sengketa perdata adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, mini trial, adjudikasi (adjudication) dan arbitrase.

Negosiasi adalah suatu proses penyesuaian yang dinamis yang dilakukan dua belah pihak yang berbeda kepentingan melalui perundingan mengenai suatu masalah agar dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.<sup>39)</sup>

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak

---

<sup>38)</sup> Ir. Hamid Shahab, **Menyingkap dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 7.

<sup>39)</sup> Gary Goodpaster, *Ibid*, hal. 11.

yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>40)</sup>

Dalam hal ini kedua belah pihak menunjuk seorang penengah (mediator) untuk membantu para pihak mencari jalan keluar berdasarkan kompromi. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Cara penyelesaian seperti ini dianggap baik selain menjamin kerahasiaan (confidential), juga karena cepat, murah dan adil.

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa suatu lembaga pendamai sebagai pihak ketiga, yang anggota-anggotanya terdiri dari para Hakim Arbitrase, lembaga mana tidak mempunyai kekuasaan memutus, tetapi hanya memberikan "expert advice and opinion" yang akan dipergunakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sebagai dasar untuk mencapai suatu kesepakatan (consensual agreement), kesepakatan mana dinamakan resolusi (resolution).

Mini trial adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua belah pihak dengan saling tukar usulan kepada seorang advisor yang mereka tunjuk bersama, sedang putusan tetap berada di tangan pihak-

---

<sup>40)</sup> Ibid, hal. 12

pihak yang bersengketa setelah mendengar pendapat advisor dimaksud, putusan mana lebih ditekankan kepada landasan fakta daripada landasan hukum (based on factual matters instead of legal matters)

Adjudikasi (Adjudikation) adalah penyelesaian sengketa khusus oleh seorang ahli yang ditunjuk kedua belah pihak sebagai "Ajudicator" serta memberi kekuasaan (authority) kepadanya untuk mengambil keputusan berdasarkan keahliannya. Oleh karena itu cara penyelesaian sengketa semacam ini disebutkan juga expert appraisal atau expert determination.

Adjudikasi, baik melalui pemeriksaan pengadilan maupun arbitrase adalah bersifat memaksa, formal dan memandang kebelakang (backward looking), berlawanan, dan atas dasar kebenaran.<sup>41)</sup> Yaitu, apabila para pihak mengajukan sengketa, maka ketentuan-ketentuan hukum yang tegas mengatur prosedur adjudikasi, dan kesimpulan pihak ketiga berkenaan dengan kejadian-kejadian masa lalu, dan hak serta kewajiban hukum masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Sebaliknya, mediasi adalah bersifat informal, sukarela, memandang kedepan, kerja sama dan atas dasar kepentingan.

Arbitrase adalah prosedur sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela, untuk penyelesaian sengketa oleh wasit yang mereka pilih sendiri, putusan wasit mana terlebih dahulu mereka setuju sebagai putusan yang mengikat dan final. Putusan wasit dalam

---

<sup>41)</sup> ibid, hal 12.

arbitrase didasarkan pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan pada asas keadilan atau asas *ex aequo et bono* (*amicable settlement*). Dikenal dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase *ad hoc* dan arbitrase permanen (misalnya BANI di Indonesia, IAC sebagai bagian dari ICC di Paris, ICSID di Washington).

Dengan KEPPRES Nomor 34 Tahun 1981, putusan suatu badan arbitrase asing dinyatakan berlaku sah di Indonesia. Peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase asing hanya boleh dieksekusi di Indonesia apabila telah lebih dahulu memperoleh persetujuan eksekusi dalam suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan usul dari Pengadilan Jakarta Pusat.

Negosiasi dan arbitrase adalah jenis ADR yang paling sering dipergunakan dalam sengketa perdata yang terjadi diantara para pengusaha. Tetapi secara kasuistik, jenis ADR yang lain juga selalu terbuka untuk dipilih.

PROSES PENYELESAIAN KONFLIK			
Pertentangan Litigasi	Kompromi Negosiasi Bersaing	Kerjasama Negosiasi pemecahan masalah	
Pertikaian pertarungan Tanpa bantuan Pihak lain.	Arbitrase	Negosiasi Kompromi	Mediasi



Para pihak bertarung yang kuat yang menang	Para pihak berargumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan memutuskan.	Para pihak berunding dan baik secara bersaing maupun pihak yang akan memutuskan.	Para pihak berunding dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak (netral).
--	---	--	--

#### 4.. Dalam mewakili kepentingan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau lembaga Negara ;

##### a. Pelaksanaan Penanganan Kredit macet ;

Pengertian kredit perbankan.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Tahun 1992, Kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank. Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank tersebut di dalam

menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan membandingkan antara kewajiban (hutang) jangka pendeknya dengan alat-alat likuidnya. Dengan demikian pemegangan kas tertentu ditentukan harus sekian persen dari hutang jangka pendeknya, di Indonesia berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, menurut Surat Edaran BI, No. SE 10/12 UUPB tanggal 30 Desember 1977 ditentukan harus 15 % dari hutang jangka pendeknya, dan menurut peraturan yang baru, yaitu SK Direksi Bank Indonesia No. 21/56/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, besarnya hanya 2 % dari hutang jangka pendeknya.

Sedangkan yang dimaksud solvabilitas adalah sebagai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Di mana solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya. Untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitur) itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (reliable) dan juga dapat diandalkan (bankable).

Kredit Bank Indonesia.

Bank Indonesia menurut Pasal 29 UU Bank Sentral tahun 1968 bertugas untuk memajukan perkembangan yang sehat mengenai urusan kredit, sekaligus bertindak mengadakan

pengawasan terhadap urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif, dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan. Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Bank Sentral dalam pemberian kredit likuiditas bertindak dengan cara menerima penggadaian utang. Menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, dan menerima aksep dengan syarat yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kredit likuiditas, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, dalam fungsinya sebagai “bankers bank”, kredit yang diberikan bentuknya berupa kredit likuiditas gadai utang dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Sedangkan dalam fungsinya sebagai lender of last resort memberikan kredit likuiditas guna mengatasi kesulitan likuiditas bank yang mengalami keadaan darurat (pasal 32 ayat (3) UU Bank Sentral tahun 1968).

Kredit likuiditas darurat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Kredit likuiditas darurat umum, yaitu kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank.

2. Kredit likuiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam faktor-faktor intern.

#### Penanganan Kredit Macet

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit macet yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (resheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagaimana atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan.
3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut :
  - a. Penanaman dana bank, dan atau :

- b. Konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- c. Konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selain penyelamatan melalui tindakan seperti di atas, penanganan terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, yaitu di antaranya :

- 1. Melalui Badan Urusan Piutang Negara,
- 2. Gugatan Perdata;
- 3. Arbitrase.

#### Ad.1 Badan Urusan Piutang dan lelang Negara

Penanganan Kredit Macet bagi bank Pemerintah dapat melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan ketnetuan pasal 12 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditetapkan bahwa kepada Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara dan sebagainya diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutang yang ada, dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutangnya tidak mau

melunasi sebagaimana mestinya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Pengurusan penyelesaian kredit ini, dapat juga karena inisiatif BUPLN sendiri, jadi tidak menunggu pelimpahan dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara saja.

Pengurusan atas inisiatif sendiri tersebut, atas dasar pemikiran, bahwa sifat pengurusan, dan penagihan piutang macet adalah untuk maksud mengamankan keuangan atau kekayaan negara, maka BUPLN wajar untuk mengurus dan menagih piutang tersebut. Setelah pengurusan kredit di tangan BUPLN, maka bukan lagi pemerintah (bank atau Badan Usaha Milik Negara) yang menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negaralah yang menjadi pihak yang berpiutang. Sebagai akibat dari pola pemikiran tersebut, maka dalam menghadapi debitur, BUPLN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik. Oleh karena itu kedudukan debitur dan

BUPLN tidak dalam posisi yang sejajar serta tidak bersifat hukum perdata.



#### Ad.2. Gugatan Perdata

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan hutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena itu debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding, dan kasasi. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan

kreditur, kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan perdata bagi bank pemerintah selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa Kejaksaan. Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank Swasta lain yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah dapat menggunakan jasa Kejaksaan tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan UU Kejaksaan No. 5 tahun 1991 terutama pasal 27.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Kejaksaan tahun 1991, mengatur bahwa Kejaksaan dapat bertindak di bidang Perdata dan tata usaha negara ahnya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Membela kepentingan negara inilah yang merupakan kekuatan dapatnya Kejaksaan untuk membela kepentingan perusahaan negara atau perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan negara.

Peran Kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank Pemerintah ini, adalah sebagai konsultan hukum, atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan.



Dalam penggunaan jasa Kejaksaan ini, bank tersebut tidak perlu meminta izin siapapun.

#### A.d.3. Arbitrase

Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada ketentuan pasal 615 R.v. (Reglement op de Rechtsvordering) yang menetapkan sebagai berikut :

***“Setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan /dapat terjadi melalui arbitrase “***

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini diperlukan oleh para pihak, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di muka pengadilan sampai tercapainya putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap relatif akan memerlukan waktu yang lama.

Dalam klausula arbitrase tersebut biasanya ditetapkan cara-cara penunjukan arbiter (wasit), dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa yang mungkin terjadi (Djumhana, 1996). Terbentuknya tim

arbiter itu dimulai dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, kemudian dua orang arbiter tersebut memilih lagi seorang arbiter ketiga sebagai ketua tim arbiter. Tim arbiter ini hanya berwenang memutuskan sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan, melainkan melalui arbitrase, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri atau dalam klausula arbitrase sebagaimana dimaksud di atas.

Tanpa adanya kesepakatan dimaksud, dimaksud lembaga arbitrase tidak sah, dan keputusannya tidak mempunyai kekuatan berlaku. Pihak yang tidak mengakui keputusan arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan keputusan arbitrase dengan alasan tidak sahnya keputusan itu. Sebenarnya terhadap keputusan arbitrase dapat dimintakan banding kepada Mahkamah Agung, tetapi karena tujuan penyelesaian sengketa, adalah agar cepat diperoleh keputusan, maka pada umumnya dalam perjanjian atau klausula arbitrase diperjanjikan bahwa kemungkinan minta banding ditiadakan tetapi lazim diperjanjikan bahwa keputusan arbitrase merupakan keputusan yang final.

Manfaat penyelesaian melalui arbitrase ini, adalah bahwa demi nama baik para pihak, sifat penyelesaian sengketa adalah tertutup (diusahakan agar tidak diketahui oleh umum), keputusannya cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak. Tetapi ada kelemahan dari arbitrase, yaitu tidak adanya kemungkinan untuk minta sita jaminan konservatoir seperti halnya pada gugatan perdata biasa (Djumhana, 1996).

- b. Pelaksanaan dalam mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD;  
Apabila bantuan hukum diajukan oleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara, maka prosedur yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :
  1. Didahului dengan pemberian pertimbangan hukum dan JAM DATUN terhadap permasalahan yang dihadapi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara tersebut.  
Dalam hal ini diberikan pengertian bahwa Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara sepanjang tidak berhubungan dengan perbuatan pidana dan perbuatan pribadi.
  2. Apabila dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh JAM DATUN, Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga

Negara tersebut akan menyerahkan penyelesaian permasalahan kasus yang dihadapi kepada JAM DATUN, maka diterbitkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari Pimpinan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara tersebut kepada Jaksa Agung RI, Selanjutnya Jaksa Agung akan memberikan SKK dengan hak substitusi kepada JAM DATUN, dan JAM DATUN akan memberikan SKK dengan hak substitusi kepada para Jaksa Pengacara Negara yang akan terjun langsung menangani perkara tersebut. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD perlu memberikan kepada Kejaksaan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara, bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Berdasarkan SKK tersebut, Jaksa Pengacara Negara akan menangani perkara tersebut dengan pedoman bahwa apabila memungkinkan maka jalur pertama ditempuh adalah non litigasi. (Penyelesaian di luar pengadilan). Apabila proses non litigasi berhasil, maka kesepakatan pertama akan dituangkan di dalam akte. Secara teori akte tersebut dapat berupa akte di bawah tangan, tetapi sebaiknya kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris. Apabila tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, maka barulah ditempuh penanganan secara litigasi (berperkara di pengadilan).

Perkara yang ditangani JAM DATUN meliputi 2 bidang, yaitu :

a. Perdata

- Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara sebagai tergugat, ditangani oleh Direktorat Perdata;
- Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara sebagai Penggugat, ditangani oleh Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak.

b. Tata Usaha Negara (TUN).

Pada perkara TUN, Kejaksaan mewakili Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Badan/pejabat TUN.

Pada penanganan perkara perdata dimana Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara berkedudukan sebagai Tergugat dan pada perkara Tata Usaha Negara dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diwakili Kejaksaan juga berkedudukan sebagai tergugat ditempuh upaya litigasi.

Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa Kejaksaan c.q. JAM DATUN berdasarkan kebijaksanaan pimpinan tidak dapat memberikan bantuan hukum dengan litigasi, apabila para pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut adalah antar instansi pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara. Dalam hal yang demikian Kejaksaan hanya bertindak sebagai mediator.

Sedangkan untuk perkara perdata dimana Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara yang diwakili Kejaksaan bertindak sebagai penggugat, maka upaya pertama yang ditempuh adalah dengan non litigasi, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh upaya litigasi.

c. Pelaksanaan Gugatan Ganti Kerugian yang merugikan Negara.

1) Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Peranan JAM DATUN dalam kasus Lingkungan Hidup sebenarnya dibuka oleh pasal 20 ayat (3) UU Nomor 4 tahun 1982 yang mengatur tentang kewajiban perusak atau pencemar lingkungan hidup untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara (The Function of performance). Namun sampai saat ini tata cara penetapan dan pembayaran biaya

pemulihan lingkungan hidup tersebut belum ada aturannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (4).

Dalam hubungan ini Prof. Dr. Kusnadi Hardjosumantri<sup>43)</sup> pada Seminar Eksekutif Pengelolaan Sengketa Lingkungan di Indonesia tanggal 24 April 1995 yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Lingkungan Hidup berpendapat antara lain :

- Gugatan berkenaan dengan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diajukan oleh Jaksa atas nama Negara;
- Besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup ditetapkan oleh teamtripihak yang dibentuk oleh Pemda Tingkat II dan terdiri dari pihak penderita, pihak pencemar dan unsur pemerintah; team dibentuk untuk setiap kasus.
- Kesepakatan yang dicapai oleh team tripihak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 BW.
- Bilamana pencemar tidak bersedia dengan sukarela membayar biaya pemulihan lingkungan hidup, maka Jaksa dapat melakukan aksi perdata melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Kasus yang pernah ditangani oleh JAM DATUN diantaranya adalah kasus tabrakan kapal Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing tanggal 19 September di Selat Philips yang kasus singkatnya sebagai berikut :

- Tabrakan itu menyebabkan tumpahan minyak ke wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapore;
- Malaysia dan Singapore segera menindaklanjuti dengan mengajukan claim kepada pemilik kapal maupun terhadap International Oil Pollution Compensation Fund dan behasil;
- Pada tanggal 2 Desember 1993 Menteri Perhubungan menyerahkan kasus ini kepada Jaksa Agung.
- JAM DATUN menempuh dua jalan sekaligus :
  - a. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ;
  - b. Melakukan Negosiasi dengan pihak Asuransi yaitu the Britania Steam Ship Insurance Association Ltd. London.
- Akhirnya kasus ini dapat diselesaikan dengan jalan negosiasi dimana Indonesia menerima ganti rugi sebesar US \$ 400.000,- pada tanggal 24 Juni 1996, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut US \$ 300.000,- dan kepada Deputy II Bapedal US \$ 100.000,- pada tanggal 8 Agustus 1996 di Gedung JAM DATUN.

---

<sup>43)</sup> Prof. Kusnadi Hardjasoemantri, **The Environmental Management Act : The Legal Context for Dispute Management**, Makalah dalam Seminar Eksekutif Pengelolaan Lingkungan Hidup, 24 April 1995, Kantor Lingkungan Hidup , Jakarta.



2) Kejaksaan Cq JAM DATUN juga telah menangani masalah keperdataan yang berkaitan dengan Perbankan dalam rangka pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Bank-bank bermasalah (BBO/BTO). Dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengembalian BLBI oleh Bank Beku Operasi dan Bank Take Over (BBO dan BTO), Kejaksaan telah menerima kuasa khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan TI guna mengusahakan pengembalian dana milik Pemerintah/Negara RI yang dikururkan kepada 14 Bank Swasta Nasional. Dana tersebut dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas bank Indonesia. Pada awalnya usaha untuk memperoleh pengembalian BLBI menghadapi kesulitan karena para bankir yang bertanggung jawab (debitur) hanya bersedia menyerahkan seminim mungkin asset yang ada padanya dalam upaya pengembalian utangnya. Jajaran DATUN telah berhasil mengusahakan inventarisasi/pengumpulan asset-asset para debitur untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Cq Menteri Keuangan (BPPN) dalam rangka perhitungan pengembalian BLBI.

3) Penanganan masalah Yayasan-yayasan yang diketuai oleh H.M. Soeharto.

Dalam hubungan dengan yayasan-yayasan yang dipimpin oleh H.M. Soeharto, telah dilakukan penelitian berupa legal audit dan

finansial audit terhadap 7 yayasan. Dalam pelaksanaan finansial audit Kejaksaan mendapat bantuan dari BPKP. Dari hasil penelitian terhadap 7 yayasan tersebut didapatkan adanya dana Yayasan yang tidak dimanfaatkan secara sesuai dengan tujuan utama. Dengan melaksanakan kegiatan ini Jaringan DATUN telah berhasil menjembatani penyerahan ketujuh Yayasan tersebut kepada Pemerintah RI beserta total assetnya berjumlah kurang lebih Rp. 5,8 trilyun. Ketujuh Yayasan tersebut saat ini sedang ditangani lebih lanjut oleh MENKO KESRA/TASKIN mengenai pengelolaannya.

**4. Dalam mewakili kepentingan masyarakat;**

**a. Pengertian Kepentingan Umum.**

1. UU No. 1 tahun 1995 menunjukkan Kejaksaan mewakili kepentingan umum dan untuk itu dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar suatu perseroan diperiksa, dibubarkan atau likuiditornya diganti.
2. Pasal 110 UU Nomor 1 tahun 1995 menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan bila terdapat dugaan perseroan atau direksi atau pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Permohonan ini dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak lain (Pihak yang diberi wewenang oleh AD atau perjanjian

untuk mengajukan permohonan pemeriksaan) atau oleh “Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum”.

Pasal 110 ayat (1) memuat alasan untuk pemeriksaan terhadap perseroan, yaitu :

- Adanya perbuatan melawan hukum, yang
- Merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga;

Pasal ini sama sekali tidak menyebut adanya perbuatan melawan hukum yang “merugikan kepentingan umum”, meskipun pasal 110 ayat (3) huruf c menyatakan Kejaksaan dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan terhadap perseroan dalam hal “mewakili kepentingan umum”.

Untuk menjelaskan peranan Kejaksaan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap perseroan, maka pasal 110 tersebut harus dibaca dan dipahami secara utuh, sehingga nampak adanya pengertian sebagai berikut :

- Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan terhadap perseroan;
- Dalam hal terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang “merugikan kepentingan umum”.

Adanya unsur “merugikan kepentingan umum” juga bisa ditarik dari pengertian “merugikan pihak ketiga” (ayat 1. A);

karena “pihak ketiga” disini tidak diberi arti tertentu oleh UU, maka secara logis dapat diartikan luas, termasuk kepentingan umum, sehingga “merugikan pihak ketiga” didalamnya dapat mengandung arti “merugikan kepentingan umum”.

3. Pasal 227 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan “melanggar kepentingan umum”. Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan tentunya mengalir dari pasal 110 ayat (3) huruf c yang menyatakan “Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum”.

#### 4. Pengertian Kepentingan Umum

- a. Sampai saat ini belum ada definisi kepentingan umum, bahkan nampaknya belum ada keberanian para pakar hukum untuk membuat definisi kepentingan umum, mengingat begitu luas berkembangnya makna yang terkandung didalamnya dari waktu ke waktu. Kepentingan umum itu hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga sulit diberi definisi yang pada hakekatnya merupakan batasan. Para pakar hanya berani mendekatinya dengan menggunakan paramater atau rambu-rambu atau ancer-ancer untuk menentukan ada tidaknya unsur-unsur kepentingan umum dalam suatu kasus yang konkrit (kasuitis).

b. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH memberikan parameter dan rambu-rambu untuk kepentingan umum berdasarkan hukum positif sebagai berikut : <sup>44)</sup>

1) Sifat :

- Haruslah semata-mata bersifat sosial;

2) Tujuan :

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum;
- tidak mencari laba;
- menyangkut kepentingan bangsa, negara masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan;
- menyangkut pelayanan umum;

4) Ruang lingkup.

Meliputi bidang-bidang :

- Pertanahan;
- Pekerjaan umum;
- Kesehatan;
- Olahraga;
- keselamatan umum terhadap bencana alam;
- kesejahteraan umum terhadap bencana alam;
- kesejahteraan sosial;
- makam;

---

<sup>44)</sup> Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, Aplikasi/Operasionalisasi Peran Kejaksaan sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Makalah dalam Diskusi Ilmiah mengenai Peranan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- pariwisata dan rekreasi;
  - usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
- 4) Kepentingan umum adalah kepentingan banyak orang yang tidak sama dengan kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok.
  - 5) Kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum
  - 6) Kepentingan umum adalah kepentingan banyak orang yang tidak sama dengan kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok.
  - 7) Kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum
  - 8) Meskipun kepentingan umum didahulukan dan diutamakan dari kepentingan-kepentingan lain, tetapi harus memperhatikan prinsip penghormatan atas hak dan memperhatikan kepentingan yang ada.
  - 9) ‘Melanggar kepentingan umum’ harus dibaca “ melanggar peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umum “ yang berarti peraturan yang bersifat mengikat atau imperatif.

- 10) Secara filosofis pengertian kepentingan umum tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.
  - 11) Secara teoritis kepentingan umum merupakan resultante dari hasil menimbang-nimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan didalam masyarakat dengan menetapkan kepentingan yang menonjol sebagai kepentingan yang menonjol sebagai kepentingan yang utama (terpenting) menjadi kepentingan umum. Secara praktis ditentukan secara konkrit dan kasuistis.
  - 12) Lembaga yang berwenang menentukan apa saja yang termasuk kepentingan umum, adalah :
    - kekuasaan legislatif ( UUD 1945);
    - Presiden ( Inpres Nomor 9 tahun 1973);
    - Ketua Pengadilan/Hakim ( UU Nomor 2 Tahun 1986).
- c. Prof. DR Marian Darus Badruzaman, SH berpendapat tentang kepentingan umum yaitu :<sup>45)</sup>
- 1) Pengertian kepentingan umum harus dicari dalam asas Pancasila sebagai asas idealisme dan UUD 1945 sebagai asas konstitusional serta TAP MPR sebagai asas operasional. Sedang tafsiran otentik formal hingga saat ini belum ada walau istilah umum banyak digunakan dan bersifat esensial.

---

<sup>45)</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, **Peranan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**, Makalah Dalam Diskusi Ilmiah Peranan Kejaksaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jakarta, 19 Juli 1995.

- 2) Parameter yuridis konstitusional, terbuka dan fleksibel untuk pengertian kepentingan umum ialah kepentingan negara, kepentingan pemerintah, kepentingan pembangunan atau kepentingan rakyat/masyarakat banyak.
- b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perdata Kejaksaan dalam mewakili Kepentingan Umum.
1. Pada prinsipnya pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam masa Reformasi ini, JAM DATUN banyak menerima permohonan pelayanan hukum melalui kotak pos 777.
  2. Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi baik secara lisan maupun tertulis sesuai permintaan yang bersangkutan.
  3. Apabila setelah diberikan pelayanan hukum anggota masyarakat tersebut menginginkan bantuan lebih lanjut, Kejaksaan dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
  4. Dalam hal kepentingan negara atau kepentingan umum menghendaki, sesuai Undang-Undang, Kejaksaan dapat melakukan fungsi penegakkan hukum antara lain :
- a. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT.



a) Pemeriksaan Perseroan

( pasal 110 s/d pasal 113)

Kejaksaan mewakili kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, secara tertulis disertai alasannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Tujuan pemeriksaaan adalah untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pengadilan Negeri dapat menolak Kejaksaan bila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.

Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang pemeriksaan dan pengangkatan ahli untuk melakukan pemeriksaan, paling banyak 3 orang. Anggota direksi, komisaris, karyawan dan akuntan perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli. Pengertian ahli disini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperiksa.

Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen (buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) serta kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui dan dalam hubungan ini direksi, komisaris dan karyawan wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa.

Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pemeriksa dilarang mengumumkannya kepada pihak lain. Salinan laporan hasil pemeriksaaan disampaikan kepada Kejaksaan (sebagai pemohon) dan perseroan yang bersangkutan.

Biaya pemeriksaan (maksimum) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas beban perseroan, namun atas permohonan perseroan. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan biaya seluruhnya atau sebagian diganti oleh pemohon, anggota direksi dan atau komisaris.

Kejaksaan terlebih dahulu meminta langsung data atau keterangan yang diperlukan kepada perseroan, dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri seperti tersebut diatas.

Dari hasil pemeriksaan tersebut tentunya Kejaksaan melalui proses penelitian yang seksama akan mengambil kesimpulan, apakah perseroan melakukan atau tidak melakukan :

- a. Perbuatan melawan hukum, yang

- b. Merugikan kepentingan umum.

Bila Kejaksaan berkesimpulan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum, maka ada alasan kuat untuk menindak lanjuti dengan memohon Pengadilan membubarkan perseroan yang terbatas.

#### b) Pembubaran Perseroan

(Pasal 117 s/d 124 )

Perseroan dapat bubar karena tiga alasan, yaitu :

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD telah berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan.

Sehubungan dengan pembubaran perseroan karena penetapan Pengadilan, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar suatu perseroan dibubarkan berdasarkan alasan kuat bahwa perseroan alasan kuat bahwa perseroan melanggar kepentingan umum. Kesimpulan Kejaksaan bahwa perseroan telah melanggar kepentingan umum bisa diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri yang dimohon oleh Kejaksaan (Pasal 110 s/d pasal 112).

Pasal 117 ayat (1) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perseroan dapat dibubarkan atas permohonan Kejaksaan bila "Perseroan" itu melanggar kepentingan umum; jadi yang melanggar kepentingan umum itu perseroan, bukan direksi dan bukan komisaris. Personifikasi dari perseroan adalah direksi dan atau komisaris yang secara spesifik dapat dibaca dari AD maupun ART perseroan yang bersangkutan. Dari AD maupun ART tersebut akan jelas bilamana direksi dan atau komisaris itu berbuat untuk dan atas nama perseroan.

c) Pengangkatan Likuiditor baru.  
(Pasal 123).

Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pembubaran perseroan memuat pula penunjukan likuiditor. Bila Pengadilan Negeri tidak menunjuk likuiditor, maka Direksi bertindak selaku likuiditor. Likuiditor bertanggung jawab kepada RUPS.

Bilamana likuiditor tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan, maka likuiditor dapat diberhentikan dan diangkat likuiditor baru oleh Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yang menjadi pertanyaan adalah : dari mana Kejaksaan memperoleh bahan atau masukan, sehingga Kejaksaan erkesimpulan bahwa likuiditor perlu diganti ? Dengan adanya hak untuk mengganti likuiditor, wajar bila Kejaksaan memperoleh laporan dari likuiditor tentang pelaksanaan tugas kewajibannya (dengan catatan bahwa likuiditor bertanggung jawab kepada RUPS). Tidak ditutup kemungkinan Kejaksaan memperoleh masukan dari pihak lain tentang pelaksanaan tugas likuiditor, sehingga Kejaksaan dapat menentukan sikap perlu tidaknya likuiditor diganti.

d. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, dinyatakan bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 1 PP Nomor 17 tahun 2000 dinyatakan bahwa Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit,

maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum. Contohnya, kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain :

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan Kepentingan Umum

- c. PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan umum.

Dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 17 tahun 2000 menyatakan :  
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila :

- a. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
- b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Penjelasan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, inisiatif pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

### **C. KEBIJAKAN FUNGSIONALISASI KEWANANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PERDATA DI INDONESIA.**

#### **1. Fungsi Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara**

##### **a. Fungsi External**

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, JAM DATUN mempunyai fungsi antara lain :<sup>46)</sup>

- 1) Mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (S. 1922 Nomor 522 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991).
- 2) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara (fungsi Jaksa Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985).

---

<sup>46)</sup> PROFIL JAM DATUN, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1993, hal 96

- 3) Membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit (Undang-undang Nomor 4 tahun 1998).
- 5) Melaksanakan penahanan terhadap seseorang yang jatuh pailit atas usul Balai Harta Peninggalan (S. 1905 Nomor 217).
- 6) Menuntut kepada Pengadilan agar pendaftaran merek dinyatakan batal, jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1961.
- 7) Menuntut kepada Pengadilan agar pendaftaran merek dinyatakan batal, bila barang yang dibubuhi merek tersebut tidak sesuai dengan contoh/keterangan yang diberikan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961).
- 8) Mengusulkan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan, mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk seorang wakil (BW pasal 463).
- 9) Menuntut kepada Pengadilan agar seorang Bapak atau Ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
- 10) Menuntut kepada Pengadilan agar memecat seseorang wali dari anak yang belum dewasa (BW pasal 381).



- 11) Minta kepada Pengadilan untuk mengangkat pengurus pengganti, jika pengurus waris meninggal dunia. (BW pasal 979)
- 12) Menuntut kepada Pengadilan untuk mengangkat seorang pengurus waris dalam hal siwaris pemikul beban tidak memberikan jaminan (BW pasal 963).
- 13) Memberikan pendapat kepada Pengadilan, seelum memberikan izin untuk menjual atau memberikan barang bergerak/tidak bergerak dari harta warisan yang akan diterima orang lain (BW pasal 985).
- 14) Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dilakukan pemeriksaan (Pasal 110 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- 15) Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dibubarkan (Pasal 117 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- 16) Memohon kepada Pengadilan Negeri agar likuiditor suatu PT diberhentikan dan diangkat likuiditor baru (Pasal 123 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- 17) Memberikan bantuan kepada Ketua PUPN apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit (Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960).
- 18) Melaporkan kepada Pengadilan, terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran martabat atau melanggar peraturan

umum, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya (S.1960 Nomor 3).

- 19) Menerima pertanggungjawaban dari Balai Harta Peninggalan, dengan menunjukkan surat-surat berharga dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengurusan boedel setiap akhir tahun (BW pasal 465).
- 20) Menerima laporan secara tertulis dari Balai Harta Peninggalan, tentang boedel yang tidak terurus yang diurusnya (BW pasal 1127).
- 21) Melakukan gugatan uang pengganti atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 22) Melakukan gugatan ganti kerugian, iaya pemulihan serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara.
- 23) Mewakili kepentingan keperdataan dari masyarakat.
- 24) Membina kerjasama, melakukan konsultasi, melakukan koordinasi, memberikan pelayanan dan pertimbangan di bidang perdata dan tata usaha negara, serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara kepada instansi lain.
- 25) Meminta kepada Pengadilan untuk menempatkan seseorang yang terganggu atau membahayakan orang lain atau lingkungan,

dirumah sakit atau dirumah perawatan jiwa atau tempat tertentu yang ditunjuk.

- 26) Menerima, mengolah dan menelaah laporan, pengaduan atau informasi dalam rangka oenegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi lain atau masyarakat.
- 27) Melakukan negosiasi, somasi, mediasi dan tindakan hukum lain di dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah atau masyarakat.
- 28) Melakukan tindakan hukum didalam rangka upaya mencabut hak keperdataan tertentu.

b. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan dan wewenang JAM DATUN dapat dilaksanakan secara optimal.

Fungsi tersebut ialah :

- 1) merumuskan keijaksanaan teknis meliputi masalah yustisial, personil, adminsitrase dan pembangunan.
- 2) Merumuskan, memantau serta menilai pelaksanaan kerja rencana kerja dan program kerja.
- 3) Mengadministrasikan dan mengolah laporan dari daerah maupun dari instansi lain.
- 4) Menyelenggarakan adminsitrase perkara.
- 5) Membuat grafik dan adminsitrase perkara.
- 6) Melakukan eksaminasi perkara.

- 7) Menyelenggarakan administrasi perkara.
- 8) Melakukan upaya guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan, disiplin dan integritas kepribadian personil.
- 9) Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan kepada pimpinan.
- 10) Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dan administrasi kepada daerah
- 11) Menyelenggarakan urusan tata usaha, personalia, perlengkapan dan rumah tangga.
- 12) Melakukan kerjasama dengan semua unit kerja dilingkungan Kejaksaan Agung.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## **2. Dasar Hukum pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata :**

Dalam melaksanakan fungsinya, dasar yang dipakai adalah :<sup>46)</sup>

### **a. Surat Kuasa Khusus;**

Bahwa tugas dan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara wakil Negara disyaratkan tampil dalam gugat gugat hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa sepanjang ada Surat Kuasa dari Pimpinan Departemen, Lembaga Tinggi Pemerintah / Instansi atau Kepala Daerah, seperti dimaksud pasal 2 dan pasal 4 K.B. 1922-522.

---

<sup>46)</sup> Profil Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara Pada Akhir Tahun ke-V, JAM DATUN KEJAKSAAN AGUNG RI, tahun 1992.

Memang benar dalam suatu proses acara perdata, seorang Penggugat atau Tergugat dapat tampil masing-masing pihak atau tampil dalam gugat gugat tersebut melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan dimaksud pasal 123 (1) HIR yang dalam forum Pengadilan harus menyampaikannya kepada Pengadilan sebagai kuasa kliennya.

Menurut pasal 1792 KUH Perdata (BW) Surat Kuasa Khusus adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih kepada orang lain yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Telah dikemukakan diatas bahwa apabila suatu instansi atau BUMN/BUMD akan menyerahkan penanganan suatu kasus kepada Kejaksaan maka hal itu dilakukannya dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada pimpinan Unit Kejaksaan setempat, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kemudian Pimpinan Unit Kejaksaan tersebut akan menunjuk dua orang JPN atau lebih untuk menanganinya lebih lanjut.

Yang dapat memberi SKK tersebut hanya instansi Pemerintah/Negara/BUMN/BUMD, tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam praktek, SKK tersebut dapat juga diberikan suatu perusahaan swasta (bukan BUMN atau BUMD) apabila sebagian

penyertaan modalnya berasal dari keuangan negara atau daerah, sesuai dengan bukti otentik yang ada.

Bagi Jaksa Pengacara Negara, adanya Surat Kuasa Khusus tersebut sangat penting sebagai dasar hukum bagi semua tindakan hukum yang akan dilakukannya dalam menangani perkara dari si pemberi kuasa. Surat Kuasa Khusus juga berfungsi untuk memberi batas yang jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya dalam penanganan perkara tersebut. Sebagai pemegang Surat Kuasa Khusus, JPN memegang etika kepengacaraan, yaitu wajib melindungi rahasia si pemberi kuasa dan semua dokumen, surat-surat serta informasi yang diperolehnya dari si pemberi kuasa hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan upaya-upaya untuk kepentingan si pemberi kuasa. Contoh misalnya, kewajiban Jaksa Pengacara Negara untuk menjaga rahasia bank dalam hal dia mewakili suatu bank pemerintah dalam suatu kasus Perdata.

Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani pemberi dan penerima Kuasa. Dalam penyusunan redaksi Surat Kuasa Khusus, sebaiknya Kejaksaan diikutsertakan agar isinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun pemberian Surat Kuasa Khusus menyangkut hubungan antara 2 instansi pemerintah yaitu instansi pemerintah pemberi kuasa dan instansi pemerintah penerima kuasa, tetapi untuk mencegah kesulitan di Pengadilan, sebaiknya setiap SKK dibubuhi materai yang cukup.

Surat Kuasa dengan hak substitusi yang dikirimkan oleh instansi tersebut selain dilampiri copy surat gugatan (dalam hal pemerintah sebagai tergugat), hendaknya dilampiri juga dengan bahan-bahan yang diperlukan baik berupa copy dokumen dan surat-surat terkait maupun copy perundang-undangan yang relevan.

Surat Kuasa Khusus sudah mencakup kuasa untuk beracara mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Tetapi seandainya terdapat Hakim Tinggi atau Hakim Agung yang mempunyai pendapat yang berbeda, diharapkan agar instansi pemerintah yang memberi kuasa dapat memperaharui SKK tersebut pada setiap tingkat pengadilan.

Pada prinsipnya semua SKK wajib diterima Kejaksaan, kecuali bila kasus tersebut mengandung unsur pidana atau isi sengketa hanya menyangkut pribadi dari seorang pejabat.

b. Peraturan Perundang-undangan;

Peranan Kejaksaan dalam perkara perdata ada yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat atributif; misalnya dalam membatalkan suatu perkawinan, membatalkan pendaftaran suatu merek, Memohon kepada Pengadilan Negeri agar suatu PT dibubarkan, melakukan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi, dan sebagainya dalam hal ini

Kejaksaan melakukan fungsinya karena jabatan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan Hakim.

Untuk menagih uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan, tidak diperlukan SKK, karena kapasitas Jaksa disini adalah pelaksanaan keputusan Pengadilan.

d. Untuk kepentingan Umum

Kejaksaan juga dapat berperan dalam perkara perdata untuk mewakili kepentingan umum.

Tugas wewenang mewakili kepentingan umum ini tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 pasal 21 huruf f, dimana dinyatakan bahwa JAM DATUN mempunyai fungsi melakukan tindakan hukum didalam maupun diluar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Selanjutnya di dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-115/J.A/10/1999 Pasal 348 huruf d dinyatakan bahwa pelaksanaan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak keperdataan, sehubungan dengan pemberian hak cipta, hak paten, hak merek, hak peruntukkan tanah, hak perusahaan hutan dan hak-hak keperdataan tertentu lainnya.



Dari dua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewakili kepentingan umum alas hukumnya adalah karena jabatan atau kuasa khusus. Mewakili kepentingan umum karena jabatan misalnya:

- menuntut pembatalan suatu merek dagang;
- menuntut pembatalan suatu badan hukum karena menyimpang dari anggaran dasar;

Sedang mewakili kepentingan umum karena kuasa khusus misalnya : Jaksa memperoleh kuasa khusus dari seorang Kepala Daerah untuk menggugat suatu perusahaan bahan Kimia yang telah mencemari sebuah sungai.

Yang menjadi masalah disini adalah, apakah Kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum dibidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, tanpa diberikan kuasa oleh peraturan perundang-undangan atau kuasa khusus ?

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-035/J.A/3/1992 menyatakan bahwa mewakili kepentingan umum oleh Kejaksaan dapat dilakukan sepanjang negara atau pemerintah tidak dalam status atau posisi sebagai tergugat, sehingga terhindar kemungkinan Kejaksaan akan berhadapan dengan kepentingan negara atau pemerintah yang pada hakekatnya juga mewakili kepentingan umum.

### 3. Konsep Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam bidang Perdata

#### a. Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata.

Prof. Barda Nawawi Arif menyatakan Fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan hukum pidana.<sup>48)</sup>

Berdasarkan konsep fungsionalisasi di atas, maka konsep Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata.

Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor peraturan perundang-

---

<sup>48)</sup> Prof. Dr. Muladi, SH, Dr. Barda Nawawi Arief, SH, "Bunga Rampai Hukum Pidana," Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 152.

undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

- 1) Faktor Peraturan Perundang-undangan yang patut dikaji adalah faktor kebijakan legislatif yang berhubungan dengan Kewenangan
  - 2) Kejaksaan dalam bidang perdata. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata atau proses penegakkan Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis bagi upaya pengamanan asset negara dan pemulihan keuangan negara. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang paling mendasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
  - 3) Telah dikemukakan di atas, bahwa erat hubungannya dengan masalah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata khususnya di bidang keijakan aplikatif, adalah peranan badan/aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah para Jaksa Pengacara Negara.
-

- b. Tujuan dilaksanakannya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata.

Tujuan pembentukan JAM DATUN sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan ialah : <sup>49)</sup>

- a. Menjamin tegaknya hukum

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, tujuan hukum perdata dan hukum tata usaha negara ialah mewujudkan keadilan (filosofis), memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologis), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara. Dalam hubungan ini JAM DATUN turut bertanggung jawab dalam penegakkan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai wakil atau berbuat untuk dan atas nama negara, pemerintah serta kepentingan umum.

- b. Menyelamatkan kekayaan negara

Di dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih dalam era pembangunan, akan banyak kegiatan dimana terlibat keuangan atau kekayaan negara.

Berkaitan dengan hal ini, maka perlu upaya untuk menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara tersebut, dimana JAM DATUN dibentuk untuk turut serta berperan melalui upaya-upaya dan menggunakan instrumen hukum Perdata.

---

<sup>49)</sup> **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaksa Agung Muda Perdata dan ata Usaha Negara, JAM DATUN RI, Jakarta, 1993, hal 7**

c. Menegakkan kewibawaan pemerintah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, lebih-lebih di dalam era pembangunan, akan banyak kegiatan yang melibatkan peranan aktif pemerintah, baik badan maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah dipertaruhkan sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut, dimana Jam DATUN dibentuk untuk turut serta berperanan melalui upaya-upaya hukum tata usaha negara.

d. Melindungi kepentingan umum.

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Kepentingan umum itu perlu dilindungi atau dipulihkan dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, dimana JAM DATUN diharapkan untuk turut serta berperanan.

**4. Kebijakan Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaaan dalam bidang Perdata dalam penanggulangan masalah tindakan yang merugikan keuangan Negara.**

Hukum merupakan sarana instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.<sup>50)</sup>

Dalam upaya penanggulangan tindakan yang merugikan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara maka Kejaksaan sebagai satu kesatuan perlu benar-benar mendalami tentang fungsi dan peranan Kejaksaan dalam sistem yang dianut dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga dengan memahami fungsi dan peranan Kejaksaan tersebut, penanganan tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara dapat diletakkan secara proporsional

Bahwa masalah tindakan yang merugikan keuangan negara adalah sangat multi kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensional karena berkaitan dengan aspek-aspek yuridis, ekonomi, sosiologis, bahkan politis sehingga pemecahannya pun harus senantiasa memperhatikan implikasi-implikasi seperti tersebut diatas.<sup>51)</sup>

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI telah mengamanatkan untuk melaksanakan Kebijakan Fungsionalisasi Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kejaksaan wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap uaha-

<sup>50)</sup> Bambang Sunggono, SH. MS, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 1994. hal. 3.

<sup>51)</sup> *Memori Serah Terima Jaksa Agung Muda Perdata*, Jakarta, 26 Mei 1999, hal 2.

usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.
3. Bahwa Kejaksaan harus mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.
4. Bahwa Kejaksaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Bahwa Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
6. Bahwa Kejaksaan wajib menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan keuangan negara haruslah senantiasa diletakkan secara proporsional dengan mengacu kepada hal-hal tersebut diatas, sehingga dalam melakukan tugas dan kewenangan kita senantiasa bersikap obyektif, logis dan rasional dan tidak akan terseret oleh berbagai arus kepentingan dari manapun juga.

Pasal 20 Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.”

Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan dalam bidang Perdata memiliki Kewenangan untuk menyelamatkan kekayaan negara. Kewenangan ini sangat tepat untuk di fungsionalisasikan dalam upaya penyelesaian permasalahan tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan memperhatikan pengaruh dan dampak negatif dari tindakan yang merugikan keuangan negara, maka wajar pulalah pusat perhatian ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan memfungsionalisasikan Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata.

Peranan Datun Kejaksaan dalam penyelesaian tindakan yang merugikan keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada hakekatnya dapat di lakukan melalui 2 Fungsi yaitu :<sup>53)</sup>

- a. Fungsi Preventif;
- b. Fungsi Represif.

---

<sup>53)</sup> Ibid, hal 4.



a. Fungsi Preventif;

Bahwa masalah korupsi, kolusi dan nepotisme adalah multi kompleks dan multi dimensional, oleh karenanya pendekatan dari aspek preventif untuk memecahkan masalah tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Sebagai aparatur penyelenggara negara yang berfikiran dan berwawasan luas, haruslah senantiasa ditumbuhkan sikap yang rasional bahwa pencegahan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak kalah pentingnya dengan aspek represif, akan pencegahan itu sendiri mungkin akan lebih efektif dalam upaya penanganan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.

Peranan Perdata Kejaksaan yang mengandung aspek preventif dalam upaya pencegahan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan Hukum;
- 2) Kegiatan Pertimbangan Hukum;
- 3) Kegiatan Tindakan Hukum lain.

Ad.1) Kegiatan Pelayanan Hukum.

Kegiatan pelayanan hukum dapat dilaksanakan dalam rangka penyuluhan hukum yaitu dengan cara memberikan penjelasan kepada warga masyarakat mengenai bagaimana

caranya berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian juga penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan terhadap aparatur negara dengan penekanan khusus terhadap betapa berahayanya praktek KKN, sehingga penyuluhan hukum itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan menumbuhkan sikap malu, dan anti KKN.

#### Ad 2) Kegiatan Pertimbangan Hukum

Kegiatan pertimbangan hukum dapat dilaksanakan dalam bentuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya seperti pertimbangan dan nasehat dalam pembuatan kontrak keperdataan maupun dalam perbaikan (review) atas kontrak-kontrak yang sudah ada. Dengan nasehat dan pertimbangan hukum yang dilakukan secara proporsional dan profesional diharapkan dapat dicegah timbulnya praktek KKN yang merugikan keuangan negara.

#### Ad 3) Kegiatan Tindakan Hukum Lain

Kegiatan tindakan hukum lain dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai mediator di antara instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dalam berbagai permasalahan

keperdataan seperti perumusan kontrak dengan klausula-klausula yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kontrak tersebut atau hubungan keperdataan tidak merugikan kepentingan Negara/Pemerintah RI.

Disamping itu, fungsi mediator pun dapat dilakukan dalam hal kerugian negara akan diselesaikan secara negosiasi diantara pihak instansi Pemerintah, BUMN/BUMD yang dirugikan dengan pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian tersebut.

Peran Mediator ini dapat dilaksanakan dalam usaha menyelesaikan masalah secara “Out of Court Settlement” (penyelesaian di luar Pengadilan) dan mencari penyelesaian secara menguntungkan semua pihak (win win solution) yang menjadi kecenderungan dalam penyelesaian sengketa perdata atau sengketa dagang. (comercial disputes).

#### b. Fungsi Represif.

Sebagai upaya represif dalam pemberantasan praktek KKN, maka Kejaksaan dapat menempuh berbagai upaya sebagai berikut :

- 1) Penegakkan Hukum
- 2) Bantuan Hukum

##### Ad. 1) Penegakkan Hukum

Terhadap perkara korupsi, tentunya penanganannya adalah dengan menggunakan instrumen pidana khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa penggunaan instrumen pidana khusus tersebut juga terkadang mengandung aspek keperdataan seperti gugatan yang dapat dilakukan terhadap terpidana, khususnya yang menyangkut hukuman uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 34 c UU Nomor 3 tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999.

Penggunaan instrumen perdata tersebut khususnya gugatan untuk mengembalikan keuangan negara kelihatannya belum optimal dilakukan. Oleh karenanya terhadap masalah ini perlu mendapat perhatian pada masa-masa yang akan datang.

Aspek penegakkan hukum yang lain yang dapat dilakukan dengan pendekatan keperdataan adalah berkaitan dengan penanganan masalah korupsi yang mungkin sulit diajukan ke Pengadilan karena kurangnya ukti yang mendukung akan tetapi pada sisi lain telah terjadi kerugian keuangan negara.

Dari berbagai data yang diperoleh seperti hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan, BPK maupun BPKP ternyata banyak hasil pemeriksaan yang sifatnya bukan tindak pidana korupsi, tetapi merugikan keuangan negara, dan tidak dapat ditindak lanjuti

secara hukum pidana khusus. Masalah seperti tersebut diatas sebenarnya dapat diselesaikan dengan pendekatan keperdataan sehingga pengembalian keuangan negara dapat dilakukan secara optimal.

Disinilah peranan DATUN dapat difungsikan dalam proses penanganan keperdataan dengan melakukan berbagai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kaitan ini perlu dikoordinasikan dengan pihak BPK/BPKP untuk mendukung pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Instansi yang dirugikan kepada Jaksa Agung Cq. JAM DATUN untuk melakukan proses tindak lanjut berupa upaya non litigasi maupun litigasi.

#### Ad.2) Kegiatan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU nomor 5 Tahun 1991, dimana dalam pasal 27 ayat (2) ditegaskan, bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kegiatan bantuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Pemerintah atau negara dalam menyelesaikan berbagai masalah keperdataan.

Bantuan hukum tersebut dapat dilakukan baik melalui proses  
nom litigasi maupun litigasi,

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan  
mengoptimalkan segala kewenangan yang dimilikinya, seperti  
tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan upaya konkrit yang  
sangat efektif dalam upaya pemulihan keuangan/kekayaan negara dan  
penyelamatan asset-asset negara.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disajikan data hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Setelah dilakukan penelitian pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan di Direktorat Perdata, PPH dan TUN Kejaksaan Agung, tentang Fungsionalisasi Kejaksaan dalam bidang Perdata, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

##### **1. Pentingnya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Sasaran yang ingin dicapai.**

###### **a. Belum Dilaksanakannya Secara Maksimal Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata.**

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, adalah melakukan Penegakkan Hukum, bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan Pemerintah. Hal ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan berbagai macam kendala. Dalam Penegakkan Hukum misalnya, kendala utama adalah pada biaya. Pada Pelayanan Hukum pada

Masyarakat, kendala utama adalah kurangnya pengetahuan Masyarakat bahwa Kejaksaan dalam bidang perdata dapat memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat. Pada Pertimbangan Hukum yang diberikan kepada Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD, kendala utama adalah keengganan mereka untuk meminta pertimbangan Hukum kepada Kejaksaan. Demikian juga pada Bantuan Hukum, kebanyakan Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD enggan untuk meminta bantuan Kejaksaan.

Guna memantapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah, ada 2 Sasaran pokok dari Jaksa Pengacara Negara dalam mengoperasionalkan instrumen perdata, yaitu :

- (1) Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara (pasal 20 Keppres No. 86 Tahun 1999) yang mekanisme operasionalnya dikoordinasikan oleh Direktorat Perdata pada JAM DATUN. Dalam hal ini Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima dari instansi terkait adalah Tergugat.

Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan keuangan/kekayaan negara dari pihak Penggugat (individu) badan hukum bukan unsur Pemerintah RI, namun mungkin saja Pemerintah Asing.

- (2) Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara serta Perlindungan Hak (Pasal 21 huruf b Keppres No. 86 Tahun 1999), mekanisme



operasionalnya dikoordinasikan oleh Direktur PPH (Pemulihan dan Perlindungan Hak) pada JAM DATUN.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara mewakili instansi terkait sebagai Penggugat untuk memulihkan asset negara (misalnya kredit Macet, JAMSOSTEK, dan lainnya) atau melindungi hak-hak Negara/Pemerintah atau Masyarakat (misalnya dalam hal gugatan HAKI).

Guna mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Agung RI.

Dari hasil awal penelitian, menemukan data jumlah perkara perdata yang ditangani baik oleh Direktorat Perdata, PPh maupun TUN.

#### Direktorat Perdata

##### 1) Bantuan Hukum

Jumlah perkara perdata untuk periode bulan Mei 1999 s/d Maret 2000 adalah 108 perkara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1  
Jumlah Bantuan Hukum Perkara Perdata  
Yang Masuk bulan Mei 1999 s/d Maret 2000

Perkara yang masuk bulan Mei 1999 S/d Maret 2000	108 Perkara
Selesai	64 Perkara
Sisa	44 Perkara

Dari jumlah 64 perkara perdata yang berhasil diselesaikan dapat dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 2  
Perincian Per-Kejaksaan Tinggi/Wilayah

No	Perincian Per-Kejaksaan Tinggi/Wilayah	Jumlah Perkara
1.	Kejaksaan Agung RI	4 Perkara
2.	Kejati D.I Aceh	3 Perkara
3.	Kejati Sumatera Utara	6 Perkara
4.	Kejati Sumatera Barat	2 Perkara
5.	Kejati Riau	4 Perkara
6.	Kejati Jambi	2 Perkara
7.	Kejati Sumatera Selatan	6 Perkara
8.	Kejati Bengkulu	- Perkara
9.	Kejati Lampung	- Perkara
10.	Kejati DKI Jakarta	1 Perkara
11.	Kejati Jabar	6 Perkara
12.	Kejati Jateng	1 Perkara
13.	Kejati DI Jogjakarta	1 Perkara
14.	Kejati Jawa Timur	7 Perkara
15.	Kejati Kalimantan Barat	1 Perkara
16.	Kejati Kalimantan Tengah	1 Perkara

17.	Kejati Kalimantan Selatan	3 Perkara
18.	Kejati Kalimantan Timur	2 Perkara
19.	Kejati Sulawesi Utara	1 Perkara
20.	Kejati Sulawesi Tengah	- Perkara
21.	Kejati Sulawesi Selatan	2 Perkara
22.	Kejati Sulawesi Tenggara	- Perkara
23.	Kejati Bali	1 Perkara
24.	Kejati Nusa Tenggara Barat	1 Perkara
25.	Kejati Nusa Tenggara Timur	2 Perkara
26.	Kejati Maluku	- Perkara
27.	Kejati Irian Jaya	3 Perkara
28.	Kejati Timor Timur	- Perkara
	<b>J U M L A H</b>	<b>64 Perkara</b>

Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa masih sangat sedikit pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bantuan hukum di bidang perdata. Dari satu wilayah Kejaksaan Tinggi yang terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri, dalam setahun hanya sekitar 2 sampai 3 perkara saja yang ditangani, hanya Kejati Jawa Timur saja yang agak menonjol menangani 7 perkara. Sangat disayangkan, tugas bantuan hukum Kejaksaan yang memiliki

potensi yang besar dalam pengembalian keuangan dan kekayaan negara tidak bisa sepenuhnya difungsionalisasikan.

Untuk melihat siapa saja yang memanfaatkan jasa Kejaksaan dalam upaya pengembalian keuangan dan kekayaan negara, kita bisa lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3  
Perincian Per Departemen

No	Perincian Per-Departemen :	Jumlah Perkara
1.	Presiden RI	3 Perkara
2.	Kejaksaan	4 Perkara
3.	Departemen Pertambangan & Energi	1 Perkara
4.	Departemen Transmigrasi	2 Perkara
5.	Departemen Perhubungan	2 Perkara
6.	Departemen Keuangan	2 Perkara
7.	Departemen Dalam Negeri	10 Perkara
8.	Departemen Pendidikan & Kebudayaan	2 Perkara
9.	Departemen Pertanian	2 Perkara
10.	Departemen Pekerjaan Umum	3 Perkara
11.	Departemen Kehutanan	3 Perkara
12.	Menteri Negara Lingkungan Hidup	1 Perkara
13.	TNI	1 Perkara
14.	BPN	5 Perkara
15.	Bank Pembangunan Daerah	2 Perkara

16.	PT. PN. XIII Kaltim	5 Perkara
17.	PT. PLN	2 Perkara
18.	PT. BTPN	1 Perkara
19.	PT. ASDP	1 Perkara
20.	PT. Asuransi Jasindo	1 Perkara
21.	PT. PN. II Tanjung Morawa	1 Perkara
22.	Jamsostek	1 Perkara
23.	PT. PN. VIII Ciamis Jawa Barat	1 Perkara
24.	Pertamina	1 Perkara
25.	BPKP	1 Perkara
26.	Bank Indonesia	1 Perkara
27.	BAPENAS	2 Perkara
28.	PT. PERUMKA	1 Perkara
29.	PT. Peln	1 Perkara
30.	PT. TELKOM	1 Perkara
	JUMLAH	64 Perkara

Dari tabel diatas, dapat kita lihat Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD yang memakai jasa bantuan hukum Kejaksaan. Dari tabel tersebut dapat kita pahami, bahwa belum semua instansi pemerintah yang mempercayakan permasalahan kepada Kejaksaan. Dalam hal ini, perlu upaya pro aktif dari pihak Kejaksaan dalam sosialisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata.

## 2) Penegakkan Hukum

- Jumlah perkara Perdata yang berhasil diselesaikan adalah Nihil.
- Jumlah perkara perdata yang belum diselesaikan adalah 1 perkara dengan rincian per-Kejaksaan sebagai berikut :
  - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat : 1 Perkara.

Ternyata, dari data diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan tugas & kewenangan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di bidang Perdata oleh Kejaksaan sangat jarang dilaksanakan.

## 3) Pelayanan Hukum

- Jumlah pelayanan hukum perdata yang telah berhasil diselesaikan 85 kasus dengan rincian per-Kejaksaan sebagai berikut :

Tabel 4  
Rincian Per Kejaksaan  
Dalam Pelayanan Hukum Perdata

No.	Rincian Perkejaksaan	Jumlah kasus
1.	Kejaksaan Agung RI	: 11 Kasus
2.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	: 24 Kasus
3.	Kejaksaan Tinggi Jambi	: 8 Kasus
4.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	: 5 Kasus

5. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	:	2 Kasus
6. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	:	12 Kasus
7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	:	8 Kasus
8. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	:	12 Kasus
9. Kejaksaan Tinggi Nuratim	:	3 Kasus
Jumlah	:	85 Kasus

Jumlah Pelayanan Hukum yang diberikan berdasarkan laporan masyarakat melalui Kotak Pos 777 adalah 368 surat.

Dengan perincian :

- Diteruskan Intern (Kejaksaan Tinggi) sebanyak : 265 surat
- Diteruskan ke Mahkamah Agung : 30 Surat
- Diteruskan ke BPN : 9 Surat
- Diteruskan Ke Instansi Lain : 64 Surat

Jumlah : 368 surat

- Jumlah kasus pelayanan Hukum yang belum berhasil diselesaikan adalah Nihil.

#### 4) Pertimbangan Hukum :

Jumlah pertimbangan Hukum Perdata yang telah berhasil diselesaikan adalah 7 (tujuh) kasus dengan rincian per-Kejaksaan sebagai berikut :

Tabel 5  
Rincian PerKejaksaan dalam Pemberian Pertimbangan Hukum

No.	Rincian Per Kejaksaan	Jumlah Kasus
1.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1 Kasus
2.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	3 Kasus
3.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2 Kasus
4.	Kejaksaan Tinggi Nuratim	1 Kasus
	Jumlah	7 Kasus

5) Tindakan Hukum Lain :

Jumlah kasus Tindakan Hukum Lain baik yang berhasil maupun belum berhasil diselesaikan adalah nihil.

**PENYELAMATAN KEUANGAN/KEKAYAAN NEGARA**

Jumlah keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan untuk periode bulan Mei 1999 s/d Maret 2000 sebesar Rp.



9.157.421.285.192,28; Tanah seluas : 17.929.491 M2; US \$  
22.589.439.844,21 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6  
Jumlah Kekayaan Negara  
Yang Berhasil Diselamatkan

No.	PERINCIAN PER-KEJAKSAAN	JUMLAH YG DIPULIHKAN
1.	Kejaksaan Agung RI	Rp. 1.208.409.000.000,- US \$ 22.589.429.844,21 Tanah 2.100 M2
2.	Kejati DI Aceh	Rp. 604.000.000,- Tanah 5.596344 M2
3.	Kejati Sumatera Utara	Rp. 1.116.461.214.799,-
4.	Kejati Sumatera Barat	Rp. 8.123.800.000,-
5.	Kejati Riau	-
6.	Kejati Jambi	Rp. 628.899.225,11,-
7.	Kejati Sumatera Selatan	Tanah 5.440.000 M2
8.	Kejati Bengkulu	Rp. 3.900.000,-
9.	Kejati Lampung	-
10.	Kejati DKI Jakarta	Rp. 234.000.000,-
11.	Kejati Jawa Barat	Rp. 670.000.000,-
12.	Kejati Jawa Tengah	Rp. 603.696.075.566,-
13.	Kejati DI Yogyakarta	Rp. 62.732.000,-

14.	Kejati Jawa Timur	Rp. 9.314.000.000,-
15.	Kejati Kalimantan Barat	Rp. 796.064.000,-
16.	Kejati Kalimantan Tengah	Rp. 6.555.000.000,-
17.	Kejati Kalimantan Selatan	Tanah 620.998 M2
18.	Kejati Kalimantan Timur	Rp. 146.145.235.000,-
19.	Kejati Sulawesi Utara	Rp. 11.183.000.000,-
20.	Kejati Sulawesi Tengah	-
21.	Kejati Sulawesi Selatan	Rp. 3.000.000.000,-
22.	Kejati Sulawesi Tenggara	Rp. 402.593.000,-
		Tanah 3.444 M2
23.	Kejati Bali	Rp. 6.430.494.606,-
24.	Kejati Nusa Tenggara Barat	Rp. 189.750.000,-
		Tanah 4.669 M2
25.	Kejati Nusa Tenggara Timur	Rp. 20.000.000,-
26.	Kejati Maluku	Rp. 100.000.000,-
27.	Kejati Irian Jaya	Rp. 6.256.000.000,-
		Tanah 4.820.000 M2
28.	Kejati Timor Timur	-
	Jumlah	Rp. 9.157.421.285.192,28,- US \$ 22.589.429.844,21,- Tanah Lt 17.929.491 M2

Direktorat Tata Usaha Negara

1) Bantuan Hukum

Jumlah perkara TUN untuk periode tahun 1999/2000 adalah 140 perkara dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa tunggakan perkara tahun 1998/1999 : 102 Perkara
- Perkara yang masuk tahun 1999/2000 : 77 Perkara
- Jumlah : 179 Perkara
- Selesai : 39 Perkara (21%)
- Sisa : 140 Perkara (27%)

Dari Jumlah 39 perkara TUN yang berhasil diselesaikan dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 7  
Perincian Per Kejaksan Perkara Bantuan Hukum TUN  
Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

No.	Perincian Per-Kejaksan Tinggi/Wilayah	Jumlah Perkara
1.	Kejaksan Agung RI	7 Perkara
2.	Kejati D.I Aceh	2 Perkara
3.	Kejati Sumatera Utara	2 Perkara
4.	Kejati Sumatera Barat	2 Perkara
5.	Kejati Riau	- Perkara
6.	Kejati Jambi	3 Perkara
7.	Kejati Sumatera Selatan	- Perkara
8.	Kejati Bengkulu	1 Perkara

9. Kejati Lampung	- Perkara
10. Kejati DKI Jakarta	1 Perkara
11. Kejati Jawa Barat	1 Perkara
12. Kejati Jawa Tengah	6 Perkara
13. Kejati DI Jogjakarta	- Perkara
14. Kejati Jawa Timur	6 Perkara
15. Kejati Kalimantan Barat	1 Perkara
16. Kejati Kalimantan Tengah	- Perkara
17. Kejati Kalimantan Selatan	2 Perkara
18. Kejati Kalimantan Timur	- Perkara
19. Kejati Sulawesi Utara	- Perkara
20. Kejati Sulawesi Tengah	- Perkara
21. Kejati Sulawesi Selatan	- Perkara
22. Kejati Sulawesi Tenggara	1 Perkara
23. Kejati BALI	2 Perkara
24. Kejati Nusa Tenggara Barat	1 Perkara
25. Kejati Nusa Tenggara Timur	2 Perkara
26. Kejati Maluku	1 Perkara
27. Kejati Irian Jaya	- Perkara
28. Kejati Timor Timur	- Perkara
J U M L A H	
	: 39 Perkara

Tabel 8  
Perincian Perdepartemen Pengguna Bantuan Hukum TUN  
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

No.	Perincian Per-Departemen	Jumlah Perkara
1.	BUMN	: 3 Perkara
2.	Departemen Perhubungan	: 1 Perkara
3.	Departemen Dalam Negeri	: 19 Perkara
4.	Asuransi	: 1 Perkara
5.	Danrem	: 1 Perkara
6.	Departemen Kesehatan	: 2 Perkara
7.	Kapolda	: 1 Perkara
8.	Departemen Luar Negeri	: 1 Perkara
9.	Presiden Republik Indonesia	: 3 Perkara
10.	Departemen Kehutanan	: 3 Perkara
11.	Departemen Pekerjaan Umum	: 2 Perkara
12.	Bapedal	: 1 Perkara
13.	Departemen Pertanian	: 1 Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>39 Perkara</b>

2) Penegakkan Hukum : N I H I L

3) Pelayanan Hukum :

Jumlah Permohonan Pelayanan Hukum untuk tahun 1999/2000

berjumlah 7 kasus dengan perincian sebagai berikut :

Yang ditindaklanjuti dan telah selesai :

- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat : 2 Kasus
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara : 2 Kasus

Yang ditindak lanjuti dan belum selesai :

- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara : 1 Kasus
- Kejaksaan Tinggi NTT : 1 Kasus
- Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Kasus

#### 1) Pertimbangan Hukum

Jumlah Permohonan Pertimbangan Hukum untuk tahun 1999/2000

berjumlah 2 perkara dengan perincian sebagai berikut :

- Kejati Kalimantan Timur : 1 kasus
- Kejati Jambi : 1 Kasus

#### Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak.

##### 1) Pelayanan Hukum

Surat-surat masuk yang memerlukan Pelayanan Hukum bidang

PPH adalah sebagai berikut :

Masuk tahun 1999/2000 = 308 surat

Penyelesaian = 267 surat

---

Sisa tahun 1999/2000 = 41 surat

Keterangan :

1. Penyelesaian sejumlah : 267 surat, terdiri dari :

a. Dilimpahkan penanganannya ke Kejati/Daerah = 144

b. Dilimpahkan penanganannya ke Instansi ybs = 105

c. Ditangani Kejagung dan telah diberitahukan

Kepada asal surat = 18

---

Jumlah = 267

Jumlah kasus yang masuk ke Kejaksaan Agung RI dan berhasil ditindaklanjuti kepada instansi yang bersangkutan adalah sebanyak 105 surat, dengan perincian sebagai berikut :

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. BPN               | : 16 Surat |
| 2. BPPN              | : 1 Surat  |
| 3. BULOG             | : 2 Surat  |
| 4. Gubernur BI       | : 1 Surat  |
| 5. Komnas HAM        | : 3 Surat  |
| 6. Mahkamah Agung RI | : 34 Surat |
| 7. Menteri Kehakiman | : 5 Surat  |
| 8. Menteri Keuangan  | : 1 Surat  |
| 9. Menteri Negara LH | : 8 Surat  |

10. Menteri Parsenibud	: 2 Surat
11. Pangdam VII Wirabuana	: 2 Surat
12. PEMDA	: 27 Surat
13. PERTAMINA	: 1 Surat
14. PT. Bank Universal	: 1 Surat
15. PT. PLN	: 1 Surat
16. PT. Telkom	: 1 Surat

---

Jumlah : 105 Surat

2. Terhadap sisa sejumlah 41 surat sedang dalam proses penanganan.
3. Surat-surat tersebut pada umumnya menyangkut masalah :
  - a. Kepemilikan tanah;
  - b. Ganti rugi atas tanah;
  - c. Kepegawaian;
  - d. Warisan;
  - e. Perkawinan.

## 2) Bantuan Hukum

### Rekapitulasi Data

Jumlah Perkara April 1999 s/d Maret 2000

Sisa Perkara Tahun lalu : 629 Perkara

Perkara Masuk April 1999 s.d Maret 2000 : 1367 Perkara



	1996 Perkara
Perkara selesai April 1999 s/d Maret 2000	: <u>362 Perkara</u>
Sisa	1634 Perkara

Prosentase Penyelesaian Perkara :

Perkara selesai : 18 %

Sisa : 82 %

**b. Belum Dilaksanakannya Hubungan Kerjasama Antara Kejaksaan Dengan BPKP**

Sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, JAM DATUN selaku pembantu Jaksa Agung dengan giat memasyarakatkan tugas-tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata usaha Negara, dengan maksud lembaga/instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang perdata terutama untuk memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Salah satu dari pemasyarakatan tersebut adalah ditandatanganinya Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor :  
 Kep.017/J.A/2/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang petunjuk  
Nomor : Kep.42/K/1994

pelaksanaan Kerjasama Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara.

Pelaksanaan Prosedur Kerja Sama Kejaksaan Agung dengan BPKP  
Penanganan Kasus Perdata Yang Menimbulkan Kerugian  
Keuangan/Kekayaan Negara.

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP (General Audit, Pemeriksaan Ketaatan, Pemeriksaan Tertentu, Pemeriksaan Khusus) telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara.
2. BPKP Pusat/Perwakilan melakukan analisa, apakah penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara termasuk dalam kasus perdata.
3. BPKP Pusat/Perwakilan BPKP yang mempunyai temuan kasus perdata ini melakukan ekspose kasus perdata didepan Kejaksaan Agung atau Kajati setempat.
4. BPKP Pusat/Perwakilan BPKP melakukan analisis bersama terhadap kasus perdata yang diungkapkan ini.
5. Analisa kasus, apakah memenuhi persyaratan untuk diproses secara perdata.

- a. Jika belum memenuhi persyaratan, maka BPKP Pusat/Perwakilan BPKP melengkapi kekurangan bukti dengan petunjuk Kejagung/Kejati setempat.
  - b. Jika telah memenuhi persyaratan pada tahap analisa ini, maka BPKP Pusat/Perwakilan BPKP buat daftar kasus Perdata dan menyerahkan ke Kejagung/Kejati setempat disertai Surat Penyerahan Kasus Perdata (SPKP) dengan tembusan ke Pimpinan Instansi (Departemen/Non Departemen/BUMN/BUMD Pusat/Daerah) yang memiliki kasus perdata tersebut.
  - c. Surat Penyerahan Kasus Perdata diterima Pimpinan Instansi yang bersangkutan disertai daftar kasus perdata.
- 6 Daftar Kasus Perdata dan Surat Penyerahan Kasus Perdata Instansi diterima oleh Kejaksaan.
  - 7 Berdasarkan Daftar Kasus Perdata dan Surat Penyerahan Kasus Perdata dibuat :
    - a. Surat Penerimaan Kasus ( 2 rangkap);
    - b. Permintaan Surat Kuasa Khusus (2 rangkap)
  8. Surat Penerimaan Kasus (1) diterima oleh BPKP.

9. Surat Penerimaan Kasus (2) diterima oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
10. Permintaan SKK diterima oleh Instansi yang bersangkutan.
11. Tembusan Surat Permintaan SKK disampaikan ke BPKP.
12. SKK (1) dikirim ke Kejagung/Kejati setempat.
13. Tembusan SKK dikirim ke BPKP.
14. Berdasarkan Daftar Kasus Perdata dan SKK Kejaksaan melakukan analisa hukum.
15. Kejaksaan membuat simpulan dan pendapat secara tertulis.
16. Simpulan dan pendapat secara dikirim oleh Kejaksaan kepada BPKP.
17. Jika simpulan dan pendapat Kejaksaan menyatakan bahwa kasus tersebut tidak cukup kuat untuk diproses secara perdata maka kasus tersebut diproses secara perdata oleh Kejaksaan.
18. Oleh Kejaksaan, proses perdata dapat dilakukan dengan :
  - a. Penyelesaian melalui Pengadilan;
  - b. Penyelesaian hukum di luar pengadilan. Dalam penyelesaian seperti ini maka Kejaksaan wajib mengikutsertakan pemberi SKK.

Tujuan dilakukan kerjasama dimaksud adalah untuk meningkatkan penyelamatan keuangan/kekayaan negara. Sebagai tindak lanjut

dari Keputusan Bersama tersebut oleh Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor :420/DV.II/1994 tanggal 1 Maret 1994, yang merupakan pedoman bagi jajaran BPKP didaerah, karena merupakan petunjuk kasus-kasus perdata yang diserahkan kepada Kejaksaan, bukan hanya dari hasil pemeriksaan khusus, tetapi juga berasal dari temuan-temuan General Audit (GA), Pemeriksaan Operasional (PO), Post Audit (PA) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (RIKTU) lainnya.

Namun ternyata hasil Juklak maupun tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut belum terlaksana, kecuali oleh BPKP Kalimantan Timur yang pernah menyerahkan beberapa kasus untuk ditindaklanjuti.

Jadi hasil pemeriksaan BPKP yang masuk dalam kualifikasi kasus perdata harus diserahkan kepada JPN agar ditindaklanjuti dengan kewenangannya dalam bidang perdata.

**c. Perlunya Refungsionalisasi Tugas Kejaksaan Dalam PUPN.**

Landasan hukum dibentuknya PUPN adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. PUPN dibentuk untuk mengurus piutang negara agar dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien mengingat penyelesaian piutang negara oleh Pengadilan dirasakan berlarut-larut.

PUPN sebenarnya adalah organisasi interdepartemental dengan unsur ABRI (POLRI), Kejaksaan, BI dan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Selain sebagai anggota, hubungan Kejaksaan dengan PUPN juga diatur dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 yang menentukan bahwa Ketua PUPN dapat meminta bantuan Jaksa, apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh debitur.

Sejak berdirinya PUPN maka unsur Kejaksaan selalu turut serta sebagai anggota di pusat maupun di daerah. Tetapi keadaan ini berubah sejak lahirnya Keppres nomor 11 Tahun 1976 yang menjadi dasar dari terbentuknya PUPN sebagai suatu badan yang menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan berada di bawah serta langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dalam BUPN ini hanya ada unsur Departemen Keuangan, tidak ada unsur lain termasuk tidak ada unsur Kejaksaan.

Dengan Keppres Nomor 21 tahun 1991 yang mencabut Keppres nomor 11 tahun 1976, maka lahir BUPLN yang mengurus tidak saja piutang negara tetapi juga lelang negara. BUPLN berada di bawah dan langsung bertanggung jawab

kepada Menteri Keuangan. Tidak ada unsur lain dalam BUPLN kecuali hanya unsur Departemen Keuangan.

Sejak lahirnya BUPN yang berubah menjadi BUPLN, maka praktis PUPN tinggal nama saja, karena segala misi, tugas, wewenang dan fungsi PUPN dilaksanakan oleh BPUPLN.

Piutang negara (termasuk kredit macet) pada hakekatnya adalah masalah perdata atau hubungan perdata, sehingga terhadap piutang negara yang tidak dapat diserahkan penanganannya kepada pengacara (swasta), maka Kejaksaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum untuk menangani sepanjang ada yang meminta dan memberikan kuasa khusus. Hal tersebut sejalan dengan pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pengurusan Piutang Negara yang berbunyi :

Pasal 2 :

“Pengurusan piutang negara yang telah jatuh tempo dan blum dinyatakan macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh instansi pemerintah/badan negara/badan usaha yang bersangkutan sampai piutang negara tersebut dinyatakan macet.

Pasal 3 :

“Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berhasil dan piutang tersebut telah dikategorikan macet, Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha dimaksud menyerahkan piutang tersebut kepada PUPN”.

Selanjutnya pasal 4 Mensyaratkan bahwa :

“Penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan kepada PUPN melalui BUPLN disertai data/dokumen dan seterusnya”

Berdasarkan penelitian, di tingkat pusat maupun di daerah tidak pernah ada rapat atau konsultasi antara unsur PUPN, meskipun hanya untuk menentukan kebijaksanaan pokok, sehingga sejak dilantik oleh Menteri Keuangan, anggota PUPN Pusat tidak pernah lagi bertemu. Bahkan untuk membaca laporan berkala PUPN saja, anggota non Departemen Keuangan praktis tidak mungkin. Jadi secara formal PUPN tidak pernah mengetahui apa yang dikerjakan oleh BUPLN.

Kalau PUPN berfungsi sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, maka mestinya semua unsur PUPN bisa berperan, misalnya Kejaksaan bisa membantu menangani piutang negara yang disalah gunakan oleh debitur (pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960). Saat ini,



kasus putang negara yang ditangani oleh BUPLN lebih dari 100.000 dan terkatung-katung penyelesaiannya.

Keadaan seperti tergambar jelas, menunjukkan bahwa masalah piutang negara ingin diselesaikan sendiri oleh Departemen Keuangan sendiri, sehingga Kejaksaan harus dengan arif tangap. Dalam hal ini perlu Refungsionalisasi agar jiwa Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 dapat diwujudkan.

## **2. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata**

### **a. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara dan Penyelamatan Asset-asset Negara.**

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah melakukan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata yang sangat vital, dapat dimanfaatkan dalam upaya preventif maupun represif dalam upaya penyelamatan kekayaan negara dan menegakkan wibawa pemerintah.

### Upaya Preventif

Pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara, tidak kalah pentingnya dengan upaya represif, bahkan pencegahan itu sendiri akan lebih efektif dalam upaya penanganan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peranan Datun Kejaksaan dalam penanggulangan prakek tindakan yang merugikan keuangan negara adalah dalam kegiatan sebagai berikut :

#### 2) Kegiatan Pelayanan Hukum

Pelayanan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah Perdata maupun Tata Usaha Negara, diluar proses peradilan.

Pada prinsipnya, pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Penyuluhan Hukum dapat juga untuk memasyarakatkan tugas & kewenangan Kejaksaan dalam bidang Keperdataan, dimana Kejaksaan dapat mewakili kepentingan keperdataan dari Instansi Pemerintah /BUMN/BUMD dan masyarakat, tanpa memungut biaya apapun (cuma-cuma)

Contoh Pelayanan Hukum Yang diberikan oleh Kejaksaan Agung RI adalah :

Kasus 7 yayasan :

3. Surat H.M Soeharto tertanggal 22 Nopember 1998 berisi penyerahan koordinasi pelaksanaan operasional ketujuh Yayasan kepada pemerintah dalam hal ini Menko Kesra dan Taskin; dengan penjelasan lebih lanjut bahwa dengan koordinasi tersebut maka selanjutnya pengaturan peralihan dan sebagainya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah Cq. Menko Kesra dan Taskin;
4. Terhadap surat-surat H.M. Soeharto tersebut pihak pemerintah mengeluarkan Keppres No. 195 tahun 1998, tertanggal 24 Nopember yang isinya :
5. Menugaskan Menko Kesra dan Taskin untuk atas nama pemerintah bertindak sebagai koordinator.
6. Pengelolaan operasional Yayasan :  

Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora. Untuk itu Menko Kesra dan Taskin dapat menunjuk tenaga-tenaga profesional untuk mengelola yayasan-yayasan.
7. Untuk menindaklanjuti surat H.M. Soeharto dan Keppres tersebut Menko Kesra dan Taskin menerbitkan Keputusan No. 11/Kep/Menko/Kesra/V/2000 tertanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengelolaan Ketujuh Yayasan tersebut. Tim tersebut terdiri dari 14

orang, dimana 7 orang diantaranya terdiri dari para Jaksa dari Kejaksaan Agung RI (Jaksa pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara).

8. Para anggota Tim, yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Menko Kesra dan Taskin No. 11/Kep/Menko/Kesra/V/2000, sudah melakukan kegiatan sejak sebelum keluarnya Surat Keputusan yaitu mengadakan pertemuan sebanyak  $\pm$  5 kali pertemuan dengan hasil akhir :

1. Peserta rapat terakhir tanggal 15 Mei menyetujui format/sistematika konsep Keputusan Menko Kesra dan Taskin yang berisi protap mekanisme pengelolaan yayasan dibawah Menko Kesra dan Taskin.
2. Format / sistematika tersebut akan dijaarkan oleh pihak Menko Kesra dan Taskin untuk kemudian diserahkan kepada semua anggota Tim untuk diteliti/disempurnakan menjadi konsep final Menko Kesra dan Taskin.
3. Setelah "protap" tersusun akan dijalankan oleh pihak Menko Kesra dan Taskin untuk kemudian diserahkan kepada semua anggota Tim untuk diteliti/disempurnakan menjadi konsep final Menko Kesra dan Taskin.

4. Setelah “protap” tersusun akan diikuti dengan penentuan/penunjukkan personil sebagai tenaga profesional untuk mengelola yayasan.

#### Kasus PTPN II :

Pemohon Pelayanan Hukum : Thamrinsyah Tamin

Masalah : Tanah

Kasus Posisi :

Mengenai tanah yang dikuasai oleh pihak PTPN II sejak tahun 1968 sampai sekarang dengan cara paksa dan intimidasi yang telah ditanami kelapa sawit selama 25 tahun.

Masyarakat sudah mengadukan permasalahan tersebut kepada DPR RI, KOMNAS HAM serta Gubernur KDH Tk I Sumatera Utara, sehingga dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Masyarakat dengan Pihak PTPN II yang menggunakan oknum Brimob dan preman dalam intimidasinya terhadap masyarakat yang menuntut hak atas tanahnya tersebut.

Pelayanan Hukum :

Permasalahan pelayanan hukum diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan cara :

- Mengumpulkan data/fakta dari para pihak atas kasus tersebut;
- Berkoordinasi dengan Pemda Tk. I Sumatera Utara untuk bermusyawarah.

- Menyarankan pelapor untuk mengajukan gugatan perdata apabila cara musyawarah itu gagal.

#### Kasus PTPN II

Pemohon Pelayanan Hukum : Enos Prosely Sembiring

Masalah : Tanah

Kasus Posisi :

Tahun 1950 Masyarakat Desa Patumbak I memiliki tanah seluas 20 ha yang erbatasan dengan PTPN IX sekarang dikenal II Nusantara. Tahun 1965 PTPN IX menanam tembakau dutanah tersebut yang sekarang dikenal tembakau Deli Serdang. Tahun 1968 dibuat perjanjian antara pihak PTPN IX dengan masyarakat tentang diberikannya waktu menanam tanaman dilokasi tersebut.

Tahun 1975 PTPN IX ingkar janji, karena ditanah yang dijanjikan pihak PTPN IX menanam kelapa sawit dan masyarakat tidak dapat masuk karena dijaga centeng-centeng dan surat perjanjian pertama tidak diakui pihak PTPN IX dimana dasar kepemilikan masyarakat atas tanah tersebut hanya berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati KDH Tk. II Deli Serdang.

Pelayanan Hukum :

- Kejaksaan Agung RI hanya menampung permasalahan dari pelapor, dan masalah surat-surat tanah kewenangan BPN.

- Dalam SKT terdapat klausula bahwa surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mendapatkan suatu hak (menurut UU No. 5/1960).
- Pelapor tidak dapat menunjukkan surat perjanjian masyarakat dengan pihak PTPN IX pada tahun 1968.

#### Kasus Masyarakat Sekuritas Indonesia :

Pemohon Pelayanan Hukum : Penerbit Saham Baru HMETD oleh PT. Lippo Life tbk, Dengan Harga Berbeda dari saham lalu.

#### Kasus Posisi :

PT Lippo Life Sekuritas tbk, adalah pemegang saham mayoritas dari PT Lippo Life tbk, (40%). PT. Lippo Life tbk adalah pemegang saham PT. Lippo Bank tbk. Pemegang saham mayoritas PT. Lippo Sekuritas tbk, adalah masyarakat luas/publik (70%).

Direksi kedua PT tersebut sebagian besar terafiliasi dan tersosialisasi satu sama lain termasuk dengan pemilik dan Direksi serta pihak pembeli.

PT. Lippo Life tbk menerbitkan saham baru HMETD seharga Rp. 225/lbr sedang saham lama seharga Rp. 500/lbr. Masyarakat publik merasa dirugikan atas terbitnya saham baru tersebut, padahal setiap penerbitan saham baru harus mendapat persetujuan dari pemegang

saham lama mayoritas PT. Lippo Life sekuritas tbk (masyarakat luas sebanyak 70%).

Pelayanan Hukum :

- Mengenai gugatan class action tentang akan diajukan ke Pengadilan terhadap PT. Lippo Life tbk bisa diajukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan ataupun mewakili investor sekuritas Indonesia.

### 3) Kegiatan Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan.

Pertimbangan Hukum diberikan antara lain dalam :

- Forum Muspida
- Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
- Pembuatan Kontrak
- Pencabutan Perijinan.



### 3) Kegiatan Tindakan Hukum Lain

Kegiatan tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum dibidang Perdata atau Tata Usaha Negara di luar penegakkan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

#### Aspek Represif

Sebagai upaya represif dalam penanggulangan tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negaram maka DATUN Kejaksaan dapat menempuh berbagai upaya sebagai berikut :

#### 1) Penegakkan Hukum

Penegakkan Hukum ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Perdata dan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan di dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

Penegakkan Hukum dapat dilakukan Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai Penggugat atau Pemohon.

Selaku Penggugat :

Kejaksaan karena jabatannya dapat melakukan penegakkan hukum dengan mengajukan gugatan perdata antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :

1. Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi.
2. Tuntutan Jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan.
3. Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan tuntutan Jaksa dalam perkara pidana umum, tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau diputus oleh Negara.
4. Perkara Korupsi yang dihentikan penyidikannya, tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.
5. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
6. Pengajuan permohonan kepailitan (menurut pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan No. 4 tahun 1998).

7. Permohonan pembubaran PT (Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1995).
8. Pembatalan pendaftaran merek dagang.
9. Meminta agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
10. Menuntut agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
11. Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
12. Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

Selaku Pemohon :

Kejaksaaan karena jabatannya dapat melakukan penegakkan hukum dengan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, berupa pembatalan atau pencabutan izin yang diterbitkan instansi tersebut.

Terhadap perkara korupsi, tentunya penanganannya adalah dengan menggunakan instrumen pidana khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa penggunaan instrumen pidana khusus tersebut juga terkadang mengandung aspek keperdataan seperti gugatan yang dapat dilakukan terhadap terpidana, khususnya yang menyangkut hukuman uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 34 c UU nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 32, 33, 34 UU No. 31 Tahun 1999.

Penggunaan instrumen perdata tersebut khususnya gugatan untuk mengembalikan keuangan negara kelihatannya belum optimal dilakukan. Oleh karenanya terhadap masalah ini perlu mendapat perhatian pada masa-masa yang akan datang.

## 2) Kegiatan bantuan hukum

Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang khususnya UU Nomor 5 Tahun 1991, dimana dalam pasal 27 (2) ditegaskan, bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, baik dalam kedudukan selaku penggugat atau tergugat dalam kasus perdata atau tergugat dalam kasus Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan bantuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara negara dalam mewakili Pemerintah atau negara dalam menyelesaikan berbagai masalah keperdataan.

bantuan hukum tersebut dapat dilakukan baik melalui proses non litigasi maupun litigasi.

Perkara yang ditangani JAM DATUN meliputi 2 bidang, yaitu :

a. Perdata

Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara sebagai tergugat, ditangani oleh Direktorat Perdata.

Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD atau Lembaga Negara sebagai Penggugat, ditangani oleh Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak.

b. Tata Usaha Negara (TUN).

Pada perkara TUN, Kejaksaan mewakili Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat oleh orang atau Badan hukum Perdata sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Badan/Pejabat TUN.

Bantuan hukum dirasakan paling banyak peranannya dalam pemulihan keuangan negara. Misalnya dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, dengan Surat Kuasa Khusus Kejaksaan mewakili Bank Pemerintah untuk melakukan bantuan hukum, baik proses non litigasi maupun litigasi. Kejaksaan sudah banyak menerima SKK dari Bank pemerintah/BUMN dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan sudah berhasil mengembalikan dalam jumlah yang tidak sedikit.

**b. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Sebagai TindakLanjut Penanganan Kasus Pidana yang merugikan keuangan negara.**

Mengenai tindak lanjut pengawasan fungsional, dalam pasal 16 ayat (2) b INPRES Nomor 15 Tahun 1983 menyebutkan :

“Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain :

- Tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali;
- Tuntutan perbendaharaan;
- Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.

Berbicara mengenai tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali, maka khusus mengenai tuntutan ganti rugi, sistem hukum pidana kita mengenal penggabungan gugatan ganti rugi tersebut dalam pasal 98 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981).

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Adapun maksud penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana ini supaya kedua kasus diperiksa serentak pada waktu yang sama dan diputus sekaligus termasuk gugatan ganti ruginya.

Dalam hal ini, apabila yang dirugikan adalah instansi Pemerintah/Negara atau BUMN/BUMD, Kejaksaan dalam hal ini JPN, dengan surat kuasa khusus dapat mengajukan gugatan ganti kerugian.

Selanjutnya Kejaksaan dapat menempuh upaya gugatan perdata pembayaran uang pengganti dalam kasus perkara korupsi yang menyangkut pasal 34 huruf c, UU Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 32,

33, 34 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, apabila putusan pengadilan dalam kasus pidana korupsi telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi terhakum menolak membayar.

Pasal 34 c (yang termasuk juga hukuman tambahan disamping perampasan barang tetap yang berwujud/tak berwujud), berbunyi :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Korupsi”.

Jadi dalam hal ini Kejaksan melakukan gugatan perdata dalam rangka mengeksekusi perkara tindak pidana korupsi dan gugatan tersebut dilakukan karena jabatannya, namun tetap memerlukan SKK dari pimpinan unit kerjanya.

Mengenai mekanisme pelimpahan penyelesaian gugatan perdata dalam rangka eksekusi pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi dari JAM PIDSUS kepada JAM DATUN, telah diatur dalam KEPJA Nomor : Kep-052/J.A/5/1996 tanggal 17 Mei 1996 mengenai Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM DATUN dengan satuan Kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS.

Khususnya dalam hal ini, dengan JAM PIDSUS antara lain ditentukan :

“Apabila pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas perkara Korupsi yang mencantumkan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti sesuai dengan pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 mengalami hambatan, maka satuan



kerja JAM PIDSUS menyerahkan penyelesaian uang pengganti tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN”.

Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional selain tuntutan ganti rugi adalah Tuntutan Perbendaharaan yang diatur Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Stb. 1925 Nomor 448 yang telah diperbaharui dan diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968.

Aparat pengawasan sering masih ragu apakah hasil temuannya akan diselesaikan dengan cara tindakan adminisitratif, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atau digugat perdata atau tuntutan pidana. Karena kasus penggelapan atau korupsi yang telah melalui tuntutan TP/TGR bukan berarti masalahnya sudah tuntas karena masih dapat diajukan ke Pengadilan.

Tindak lanjut hasil pengawasan yang disebut terakhir dalam pasal 16 ayat (2) huruf b INPRES Nomor 15 Tahun 1983 adalah :”Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain”.

Suatu tuntutan pengenaan denda jelas bukan masalah perdata tetapi suatu pidana tambahan dalam kasus pidana. Yang dapat merupakan porsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara negara

adalah gugatan ganti rugi, yang dapat diserahkan dengan SKK oleh instansi yang terkait.

Namun pemulihan kerugian keuangan negara dengan instrumen perdata sebagai tindak lanjut aparat pengawasan fungsional sangat jarang diserahkan kepada Kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 32, 33 dan 34, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 32 :

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33 :

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian

keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugiakan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kewenangan ini sangat tepat untuk difungsionalisasikan, karena dalam hal ini bidang Pidus Kejaksaan yang menangani kasus korupsi bisa berkoordinasi dengan bidang Datun Kejaksaan

**c. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Sebagai Upaya Untuk Pengawasan Terhadap asset Negara.**

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah hal baru, karena secara formal dan materiil telah ada sejak jaman Hindia

Belanda yang diatur dalam Stbl tahun 1922 nomor 522 dan di berbagai perundang-undangan yang tersebar berjumlah tidak kurang dari 23 peraturan. Eksistensi Kejaksaan di bidang perdata kemudian dipertegas dan dilengkapi kewenangan di bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1991. Hal ini merupakan upaya kekuatan legislatif di dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Penegasan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata juga dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah.

Guna memantapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah, ada 2 Sasaran pokok dari Jaksa Pengacara Negara dalam mengoperasionalkan instrumen perdata, yaitu :

- (3) Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara (pasal 20 Keppres No. 86 Tahun 1999) yang mekanisme operasionalnya dikoordinasikan oleh Direktorat Perdata pada JAM DATUN. Dalam hal ini Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima dari instansi terkait adalah Tergugat.

Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan keuangan/kekayaan negara dari pihak

Penggugat (individu) badan hukum bukan unsur Pemerintah RI, namun mungkin saja Pemerintah Asing.

- (4) Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara serta Perlindungan Hak (Pasal 21 huruf b Keppres No. 86 Tahun 1999), mekanisme operasionalnya dikoordinasikan oleh Direktur PPH (Pemulihan dan Perlindungan Hak) pada JAM DATUN.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara mewakili instansi terkait sebagai Penggugat untuk memulihkan asset negara (misalnya kredit Macet, JAMSOSTEK, dan lainnya) atau melindungi hak-hak Negara/Pemerintah atau Masyarakat (misalnya dalam hal gugatan HAKI).

Dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 2 ayat (2) Inpres Nomor 15 Tahun 1983 menyebutkan :

Ruang lingkup pengawasan meliputi :

- a. Kegiatan umum pemerintahan;
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara;

- d. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik Daerah;
- e. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Sedangkan dalam pasal 16 ayat (2) tentang tindak lanjut pengawasan fungsional disebutkan :

Tindak lanjut sebagaimana dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain :
  - Tuntutan ganti rugi/ penyetoran kembali;
  - Tuntutan perbendaharaan;
  - Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan meyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau Kepala Kejaksaan Republik Indoneisa dalam hal terdapat indikasi Tindak pidana Khusus, seperti korupsi dan lainnya.

- d. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Di dalam berbagai Rakor Pengawasan yang dipimpin Wakil Presiden selalu dianjurkan agar dalam mengamankan asset negara agar meminta bantuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Bahkan melalui Menteri Sekretaris Kabinet atas Perintah Presiden telah diteruskan kepada para Menteri/Gubernur BI, Panglima ABRI dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen untuk diketahui oleh Pejabat-pejabat Eselon III ke atas dengan surat MENSEKAB Nomor : R-20/M.Sekab/II/1995 tanggal 14 Nopember 1995.

Dalam Rakor Lengkap Bidang Pengawasan tanggal 17 Februari 1993 oleh WAPRES (waktu itu Bapak Sudharmono, SH) dalam pengarahan beliau telah dinyatakan :

“Sesuai peraturan yang berlaku tuntutan ganti rugi oleh pemerintah terhadap yang bertanggungjawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Cara ini biasanya dapat dilakukan sekiranya instansi yang bersangkutan menganggap Kejaksaan akan dapat lebih efektif melaksanakannya.

Namun dari hasil penelitian, khususnya dalam rangka pemulihan kerugian keuangan dengan instrumen perdata belum begitu dimanfaatkan oleh Departemen-departemen maupun lembaga-lembaga Non Departemen.

Rekomendasi Komisi III (yang membidangi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara) dari Rakor 1995 Jaksa Agung dengan para IRJEN, menyangkut 3 (tiga) hal belum dimanfaatkan secara optimal, terutama menyangkut instrumen perdata dalam upaya pemulihan kerugian keuangan/kekayaan negara dengan memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang DATUN.

Rekomendasi Komisi III lengkapnya berbunyi :

Dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan koordinasi antara aparat pengawasan fungsional dengan aparat penegak hukum, dan kiranya dapat disarankan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Perlu peningkatan penggunaan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara disamping instrumen hukum pidana dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (2) Instansi Pemerintah/negara, BUMN/BUMD dapat memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam memulihkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan kasus-kasusu lain yang menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara.
- (3) INPRES Nomor 15 Tahun 1983 kiranya perlu disempurnakan sehingga penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan melalui instrumen hukum perdata dan tata usaa



negara diatur secara tegas termasuk instansi yang menanganinya.

Walaupun Komisi III pada Rakor 1995 telah menyampaikan rekomendasi sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan/kekayaan Negara, bahkan rekomendasi tersebut telah mendapat petunjuk dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Kabinet Nomor : R-20/M.Sekab/II/1995 tanggal 14 Nopember 1995, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa khususnya dalam pemulihan keuangan/asset negara dengan instrumen perdata belum secara nyata terlaksana, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perangkat hukum yang ada sekarang, antara lain INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan belum cukup efektif dan belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (2) Peranan Kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata, dalam menyelamatkan asset-asset negara dan memulihkan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh aparat pengawasan fungsional.

### 3. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Upaya mengatasinya.

Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata.

Untuk memfungsionalisasikan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dari hasil penelitian penulis, masing-masing komponen memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Kendala Dari Intern Lembaga Kejaksaan Sendiri.

- (1) Belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal.

Sumber Daya Manusia merupakan suatu kendala utama dalam Unit Kerja JAM DATUN, berhubung Unit Kerja JAM DATUN relatif masih merupakan unit kerja yang baru di lingkungan jajaran Kejaksaan dari pusat sampai ke daerah. Meskipun **Tugas Keperdataan** sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, dalam hukum positif Indonesia, baru diterapkan sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1991 dan Keppres Nomor 86 tahun 1999. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam UU ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga Kejaksaan akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum (Public Prosecutor) sehingga minat untuk mengkhususkan atau memberi perhatian yang istimewa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Datun agaknya kurang.

Dengan latar belakang fungsi tersebut maka SDM Kejaksaan harus dipersiapkan untuk menghadapi kedua penugasan yang kelihatannya dapat menimbulkan

“conflict of Interest”, namun pada hakekatnya tidak demikian.

**b. Kendala Dari Ekstern Lembaga Kejaksaan.**

**(1) dalam Perangkat Perundang-undangan.**

Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata, diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Perlunya penegasan Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara;

Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sudah banyak Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN dan BUMD yang mempercayakan Kejaksaan untuk mewakili sebagai Tergugat atau penggugat baik dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Demikian pula telah banyak ditandatangani perjanjian Kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah, Lembaga

Negara, BUMN dan BUMD di pelbagai daerah di seluruh Indonesia.

Guna memantapkan pelaksanaan tugas dan Wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelamatkan asset-asset negara serta memulihkan/mengembalikan keuangan/kekayaan negara dan untuk menangani kasus/perkara perdata dan tata usaha negara secara profesional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang pidana dan ketertiban serta ketentraman umum.

Telah banyak Dinas dan Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD yang mempercayakan penanganan masalah Perdata pada Kejaksaan, meningkatnya kerjasama yang ditangani antara Kejaksaan dengan Dinas dan Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD, dan makin besarnya jumlah kekayaan negara yang diselamatkan dan dipulihkan. Dari kenyataan ini menunjukkan terasa adanya embrio Kantor Pengacara Negara dalam negara hukum yang memang diperlukan. Gambaran penyelesaian perkara /kasus tersebut sebagai gejala awal yang jelas menunjukkan bahwa emrio tersebut ada, dan perlu tetap dijaga agar tetap berfungsi dengan

baik dengan bekerja dengan profesional dan efisien. Oleh karena itu sangat dirasakan pentingnya penegasan lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Jaksa Pengacara Negara

Penegasan DATUN Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai lembaga Class Action.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keppres Nomor 55 Tahun 1991, pemanfaat Jaksa Pengacara Negara adalah :

- a. Negara/Pemerintah, badan Usaha Milik Negara.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, maka Jaksa Pengacara Negara hanya dapat mewakili Badan Usaha Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- b. Mewakili Kepentingan Keperdataan Masyarakat/Class Action, sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor 86 Tahun 1999 disebutkan "pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingankeperdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik

berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparaturnegara penegak hukum untuk melindungi kepentingan keperdataan masyarakat.

Akan tetapi, penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan keperdataan masyarakat, sejauh ini hanya disebut dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Akan sangat menunjang bila ditegaskan dalam Peraturan berbentuk Undang-Undang bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam mewakili kepentingan masyarakat.

Sejauh ini Penegasan bahwa Kejaksaan dapat mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang Perdata adalah berbentuk Keppres, akan tetapi bila ada peraturan perundang-undangan yang hierarkhinya lebih tinggi yang melahirkan prinsip-prinsip atau materi yang menyimpang

apalagi bertentangan, konsekuensinya akan menjadi batal demi hukum.

Perlunya perangkat perundang-undangan yang mengharuskan BUMN/BUMD untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan keuangan negara pada Kejaksaan.

Keterbatasan pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa Kantor Pengacara Negara dan ketidakharusan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD untuk tidak menyerahkan kepada Kejaksaan, telah menempatkan Kejaksaan untuk bersaing langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah.

Kebijaksanaan JAM DATUN selama ini adalah service oriented atau mengutamakan pelayanan dengan cara client tidak dibebani uang jasa (Fee) tetapi hanya diminta dukungan uang operasional dalam menangani perkara yang diserahkan. Berbeda dengan kantor pengacara swasta yang menekankan adanya service and profit oriented. Kebijakan ini didasarkan bahwa JPN dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara.



Adanya Kewajiban Dengan Kuasa Khusus dalam bertindak untuk mewakili Negara di bidang Perdata.

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Ketentuan penggunaan Kuasa Khusus untuk dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan ini sangat membatasi langkah para Jaksa Pengacara Negara. Apabila ditemukan indikasi adanya kerugian negara pada Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD, akan tetapi mereka tidak bersedia menyerahkan perkara tersebut pada Kejaksaan, sehingga tidak memberikan kuasa khusus, otomatis para JPN tidak bisa berbuat apa-apa untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Jaksa Pengacara Negara di sini, bertindak untuk dan atas nama negara. Jika dibatasi dengan kewajiban penggunaan kuasa khusus, akan membatasi para JPN dalam menggunakan kewenangannya dalam bidang Perdata.

(2) Kendala Budaya Hukum.

Belum semua Lembaga/Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata, ternyata belum semua masyarakat dan Lembaga Instansi

Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pemasyarakatan fungsi Datun Kejaksaan. Tujuan pemasyarakatan adalah agar terutama para pejabat instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami keberadaan, tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha negara. Selanjutnya diharapkan mereka akan memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapinya.

Sampai saat ini, kegiatan JAM DATUN telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan makin mengarah kepada adanya tanggapan positif dari kalangan pejabat / instansi pemerintah dan BUMN/BUMD kepada Kejaksaan. Hal ini merupakan dorongan untuk lebih meningkatkan upaya pemasyarakatan secara berencana, sistimatik, terarah dan berkesinambungan. Guna mencapai hasil yang optimal perlu adanya persamaan persepsi mengenai pemasyarakatan DATUN.

Adanya Kekhawatiran Lembaga/Instansi Pemerintah untuk menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan membuka kelemahan Lembaga/Instansi

bersangkutan, dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang pidana.

Banyak Instansi Pemerintah, BUMN atau BUMD yang tidak bersedia menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan. Misalnya saja beberapa Bank BUMN di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan mereka khawatir apabila Kejaksaan memanfaatkan kedudukannya sebagai kuasa khusus suatu instansi untuk secara terselubung melakukan penyidikan, baik yang berbentuk operasi penyelidikan intelijen, maupun dalam bentuk operasi penyidikan pidana.

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Pentingnya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Sasaran yang ingin dicapai.**

Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau

konkretisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata. Kewenangan Kejaksaan sangat penting untuk difungsionalisasikan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

**a. Belum Dilaksanakannya Secara Maksimal Pelaksanaan Tugas & Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata.**

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kejaksaan telah berhasil memulihkan/mengembalikan kekayaan negara dan menyelamatkan asset-asset negara. Hal ini menunjukkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata sangat efektif untuk mendukung pembangunan nasional.

Akan tetapi, nampak sekali bahwa belum semua kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata telah difungsionalisasikan dengan baik. Misalnya saja, dalam penegakkan hukum. Hampir semua Kejari di Wilayah Indonesia tidak melakukan kegiatan penegakkan hukum. Dari hasil penelitian penulis, diketahui, bahwa masalah utamanya adalah dalam hal biaya. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan penegakkan hukum, Misalnya dalam persidangan di Pengadilan, dalam mengajukan tuntutan pembubaran perseroan atau mempailitkan suatu Perseroan Terbatas, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan anggaran operasional Datun Kejaksaan sangat terbatas. Hal ini sangat menghambat tugas-tugas JPN. Oleh karena itu, saran penulis, alangkah baiknya bila JPN

melakukan tindakan litigasi, dikenakan prodeo (bebas ongkos perkara) karena JPN bertindak untuk negara dan atas nama negara untuk memulihkan keuangan negara dan menyelamatkan asset asset negara.

Menurut penulis, peran Kejaksaan Indonesia dalam kasus perdata sebelum terjadinya sengketa perdata di pengadilan perlu untuk sedikit demi sedikit dikembangkan. Hal ini adalah untuk menghadapi tantangan era hukum dimasa depan, yaitu guna lebih mengamankan asset-asset negara, kewibawaan pemerintah serta melindungi kepentingan masyarakat sejak dini sebelum peristiwa sengketa perdata terjadi. Karena apabila telah terjadi sengketa perdata kadang-kadang sulit untuk diatasi.

Hal ini bisa dilaksanakan dalam tugas pertimbangan hukum Kejaksaan, kepada Lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD atau Pelayanan Hukum kepada masyarakat, dalam rangka melindungi kepentingan keperdataan masyarakat.

Untuk itu diperlukan pemasyarakatan yang lebih konkrit serta aktif lagi kelembaga-lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD atas peran Kejaksaan dalam bidang pembuatan kontrak yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun badan-badan usaha milik negara.

Walaupun pada dasarnya kontrak perjanjian menurut sistim hukum di Indonesia dibuat oleh seorang Notaris, namun Jaksa sebagai penasehat hukum negara dapat menjadi saksi instrumentair atas pembuatan akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris, karena apabila

terjadi sengketa adalah bukan notaris tapi Jaksa yang duduk sebagai pengacara negara di sidang Pengadilan.

Dalam usaha represif/pencegahan terjadinya kerugian negara, dapat dilakukan dengan pengoptimalan tugas perdata Kejaksaan dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini diberikan kepada lembaga negara/Instansi Pemerintah, yang antara lain diberikan dalam forum muspida, pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kontrak, pencabutan perijinan dan lain sebagainya.

**b. Belum Dilaksanakannya Hubungan Kerjasama Antara Kejaksaan dengan BPKP.**

Dari hasil penelitian di atas, jelas sekali bahwa jajaran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di pusat dan daerah bersama Kejaksaan dan seluruh jajarannya belum memanfaatkan dengan optimal Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.017/J.A/2/1994 / Nomor : Kep.42/K/1994 tanggal 8 Februari 1994 untuk pemulihan kerugian negara. Menurut Penulis, sangat efektif bila diusahakan pemanfaatan secara optimal Keputusan bersama tersebut terutama dalam hal peranan Kejaksaan di bidang perdata untuk memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Tujuan dilakukan kerjasama dimaksud adalah untuk meningkatkan penyelamatan keuangan/kekayaan negara. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut oleh Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor :420/DV.II/1994 tanggal 1 Maret 1994, yang merupakan pedoman bagi jajaran BPKP didaerah, karena merupakan petunjuk kasus-kasus perdata yang diserahkan kepada Kejaksaan, bukan hanya dari hasil pemeriksaan khusus, tetapi juga berasal dari temuan-temuan General Audit (GA), Pemeriksaan Operasional (PO), Post Audit (PA) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (RIKTU) lainnya.

Namun ternyata hasil Juklak maupun tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut belum terlaksana, kecuali oleh BPKP Kalimantan Timur yang pernah menyerahkan beberapa kasus untuk ditindaklanjuti.

Jadi hasil pemeriksaan BPKP yang masuk dalam kualifikasi kasus perdata perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Oleh karena itu sebaiknya Pimpinan Kejaksaan harus pro aktif dalam menindaklanjuti surat keputusan bersama antara Kepala BPKP dan Kejaksaan tersebut.

**c. Perlunya Refungsionalisasi Tugas Kejaksaan Dalam PUPN.**

PUPN adalah Panitia Inter Departemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dengan unsur-unsur ABRI, Kejaksaan, BI dan Departemen Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sejak KEPPRES Nomor 11 Tahun 1976 sebagai dasar terbentuknya BUPN yang kemudian diganti lagi dengan KEPPRES Nomor 21 Tahun 1991 yang mencabut KEPPRES nomor 11 Tahun 1976 dan melahirkan BUPLN yang disamping mengurus piutang juga menangani lelang negara, keanggotaannya semua terdiri dari unsur Departemen Keuangan, maka di tingkat pusat tidak pernah ada lagi konsultasi antara unsur PUPN maupun BUPLN, sedangkan mekanisme kerja cukup jelas dalam keputusan Menteri Keuangan nomor : 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara yang mengharuskan keterlibatan PUPN.

Disini terlihat sekali keganjilan yang dirasakan. Kewenangan PUPN yang dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 seolah dikalahkan oleh Keppres no. 11 Tahun 1976 sebagai dasar terbentuknya BUPN yang kemudian diganti dengan Keppres No. 21 Tahun 1991 yang mencabut Keppres Nomor 11 tahun 1976 dan melahirkan BUPLN yang disamping mengurus piutang juga menangani lelang negara. Dalam hal ini perlu Refungsionalisasi PUPN agar jiwa UU Nomor 49 Tahun 1960 dapat diwujudkan.



Menyangkut tentang kewenangan PUPN, dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 49 Prp Tahun 1960 dan pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993, Penyanderaan (Gijzeling) atau Paksa Badan (Lifsdwang) ditandatangani oleh Ketua PUPN (bukan Ketua BUPLN).

Pengaturan Penyanderaan selanjutnya diatur dalam TLN Nomor 2104 Tahun 1960 yang antara lain menegaskan bahwa baik perintah tertulis penyanderaan maupun pelepasan dari sandera harus mendapat izin tertulis dan dilaksanakan atas perintah Kejaksaan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kewenangan yang diberikan undang-undang ini menurut stratifikasi perundang-undangan tidak dapat dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, sehingga tidak dapat diabaikan oleh Ketua BUPLN dalam posisinya sebagai Ketua PUPN berdasarkan kewenangan menurut Keputusan Menteri Keuangan.

## **2. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Perdata**

### **a. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara dan Penyelamatan Asset-asset Negara.**

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sangat tepat untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Dalam situasi keterpurukan perekonomian dan keuangan negara yang menimpa negara kita seperti sekarang ini maka upaya pemulihan atau pengembalian keuangan negara adalah menjadi salah satu pilihan untuk mengatasinya. Dengan memperhatikan pengaruh dan dampak negatif dari tindakan yang merugikan keuangan negara seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka wajar pulalah pusat perhatian ditujukan pada upaya penanggulangannya.

Oeh karena itu, penyelesaian kasus-kasus yang merugikan keuangan negara seperti kasus kredit bermasalah dan sebagainya perlu diprioritaskan upaya pengembaliannya tanpa mengesampingkan sisi pidananya. Terkait dengan penggunaan instrumen keperdataan ini maka fungsi dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ini akan sangat berperan.

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata yang sangat vital, dapat dimanfaatkan dalam upaya preventif maupun represif dalam upaya penyelamatan kekayaan negara dan menegakkan wibawa pemerintah.

#### Upaya Preventif

Pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara, tidak kalah pentingnya dengan upaya represif, bahkan pencegahan itu sendiri akan lebih efektif dalam upaya penanganan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peranan Datun Kejaksaan dalam penanggulangan praktek tindakan yang merugikan keuangan negara adalah dalam kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Hukum

Pada prinsipnya, pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam masa reformasi ini, JAM DATUN banyak menerima permohonan pelayanan hukum melalui kotak pos 777. Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi baik secara lisan maupun tertulis, sesuai permintaan yang bersangkutan. Apabila setelah diberikan pelayanan hukum anggota masyarakat tersebut menginginkan bantuan lebih lanjut, Kejaksaan dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pelayanan Hukum sangat vital dalam upaya pencegahan tindakan yang merugikan keuangan negara, misalnya saja dalam rangka penyuluhan hukum. Dimana DATUN Kejaksaan secara Intensif memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat mengenai bagaimana caranya berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian masyarakat bisa memberikan pengawasan langsung. Penyuluhan hukum juga bisa dilakukan terhadap aparatur

negara dengan penekanan khusus terhadap betapa berbahayanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga penyuluhan hukum itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan menumbuhkan sikap malu, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini tentunya mereka tidak akan berani untuk menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan pihak kroni tetapi merugikan keuangan negara. Contoh konkrit dari kasus ini adalah memberikan pinjaman sampai ratusan milyar kepada seseorang atau perusahaan tertentu, padahal uang yang dipinjamkan berasal dari Iuran Dana Reboisasi. Kasus lain yang juga sangat merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat Negara/BUMN/BUMD adalah tindakan mereka yang melakukan Mark Up atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemerintah. Dalam hal ini proyek-proyek Pemerintah yang berhasil dimenangkan pihak kroni telah ditinggikan harganya (mark up) sehingga Pemerintah membayar lebih tinggi dari apa yang seharusnya dibayarkan.

Penyuluhan Hukum dapat juga untuk memasyarakatkan tugas & kewenangan Kejaksaan dalam bidang Keperdataan, dimana Kejaksaan dapat mewakili kepentingan keperdataan dari Instansi Pemerintah /BUMN/BUMD dan masyarakat, tanpa memungut biaya apapun (cuma-cuma)

## 2) Kegiatan Pertimbangan Hukum

Pada Prinsipnya, Fungsi Kejaksaan dalam pertimbangan hukum diberikan kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD. Sebagaimana kita ketahui, bahwa negara mengalami banyak kerugian akibat pembuatan perjanjian yang merugikan negara tetapi menguntungkan pihak kroni. Kerugian semacam ini banyak diderita oleh pihak BUMN, misalnya PT. Jasa Marga (Persero), PT. PLN (Persero) dan Pertamina. Dalam hal ini, dapat dihindari terulang kembali dengan kegiatan pertimbangan hukum oleh Kejaksaan, dalam bentuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya seperti pertimbangan dan nasehat dalam pembuatan kontrak keperdataan maupun dalam melakukan perbaikan (review) atas kontrak-kontrak yang sudah ada. Dengan nasehat dan pertimbangan hukum yang dilakukan secara proporsional dan profesional yang diharapkan dapat dicegah timbulnya praktek-praktek yang merugikan keuangan negara.

Salah satu contoh perjanjian yang merugikan pihak Instansi pemerintah adalah perjanjian yang sangat terkenal dewasa ini, yang disebut MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement). Isi perjanjian sangat merugikan pihak pemerintah,

karena ada klausul yang menyatakan bahwa seorang debitur kepada negara dapat dibebaskan dari tuntutan pidana dan perdata (release and discharge) hanya dengan menyerahkan sejumlah asset, sekalipun nilai asset tersebut jauh lebih rendah dari nilai utang si debitur. Ketentuan ini selain merugikan negara juga bertentangan dengan ketentuan pasal 1853 KUH Perdata yang mearang perjanjian perdamaian perdata (termasuk MSAA) mengesampingkan wewenang Kejaksaan untuk melaksanakan penuntutan pidana. Itu sebabnya Pemerintah berkehendak untuk melakukan perbaikan (amandemen) terhadap isi MSAA. Patut dicatat bahwa Kejaksaan sama sekali tidak diikutsertakan (sehingga tidak pernah memberikan pertimbangan hukum) di dalam proses penyusunan MSAA.

#### (1) Kegiatan Tindakan Hukum Lain

Kegiatan tindakan hukum lain dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Contohnya adalah kegiatan penyelesaian masalah atau sengketa perdata melalui negosiasi dimana pihak-pihak yang terlibat mempercayakan Kejaksaan untuk menjadi mediator atau Fasilitator dalam penyelesaian masalah atau sengketa tersebut.

Kegiatan tindakan hukum lain dilakukan oleh JPN dengan menyelesaikan suatu sengketa yang dihadapi oleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dan masyarakat melalui Mediasi. Misalnya dalam berbagai permasalahan keperdataan seperti perumusan kontrak dengan klausula-klausula yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kontrak tersebut atau hubungan keperdataan tidak merugikan kepentingan Negara/Pemerintah RI.

Disamping itu, fungsi mediator pun dapat dilakukan dalam hal kerugian negara akan diselesaikan secara negosiasi diantara pihak instansi Pemerintah, BUMN/BUMD yang dirugikan dengan pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian tersebut.

#### Aspek Represif

Sebagai upaya represif dalam penanggulangan tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negaram maka DATUN Kejaksaan dapat menempuh berbagai upaya sebagai berikut :

##### (1) Penegakkan Hukum

Peran Kejaksaan dalam penegakkan hukum pidana sudah lama dikenal, tetapi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di luar hukum pidana, termasuk penegakkan hukum di bidang hukum perdata, nampaknya masih kurang dikenal.

Sebenarnya ada persamaan antara peran Kejaksaan dalam penegakkan hukum pidana dengan perannya dalam penegakkan hukum perdata : keduanya berasal dari peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah ketentuan pasal 319a KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentangnua, maka atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun, terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu”.

Ketentuan sebagaimana dikutip diatas jelas memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk menuntut agar seorang Bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya, apabila si Bapak atau si Ibu tersebut tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Jika dikaji secara lebih mendalam kita dapatkan bahwa tujuan penegakkan hukum di bidang perdata adalah untuk memantapkan



tegaknya hukum. Sebagai contoh : terhadap sorang anak belum dewasa yang telah melakukan tindak pidana, Kejaksaan dapat melaksanakan penegakkan hukum dengan melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tersebut. Jika kemudian terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebagai akibat dari ketidakmampuan orang tua si anak dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, untuk lebih memantapkan tegaknya hukum, Kejaksaan dapat melaksanakan penegakkan hukum perdata, dengan menuntut pencabutan kekuasaan orang tua terhadap ayah/iu si terpidana tersebut. Dasar hukum dari tindakan Kejaksaan ini adalah pasal 319a KUH Perdata.

Wewenang Kejaksaan dalam bidang penegakkan hukum perdata sangat banyak dan bervariasi mulai dari penuntutan pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 319 a KUH Perdata) sampai ke penuntutan pembubaran badan hukum (Pasal 6 paragraf 1 S. 1970 -64).

JAM DATUN telah menggariskan kebijakan yang menyatakan bahwa wewenang dalam rangka penegakkan hukum perdata tersebut harus dilaksanakan secara selektif. Penegakkan hukum hendaknya dilaksanakan jika hal itu efektif bagi usaha penyelamatan dan atau pemulihan keuangan/kekayaan negara. Dalam kondisi krisis ekonomi pada saat ini, penegakkan hukum

pun hendaknya ditujukan untuk memantapkan usaha-usaha penanggulangan krisis ekonomi.

Beberapa wewenang Kejaksaan dalam penegakkan hukum perdata yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan ini adalah :

- (a) Wewenang yang berhubungan dengan orang yang meninggalkan alamatnya tanpa diketahui di mana beradanya (azweijzghheid).

Wewenang ini tercantum di dalam pasal 468 KUH Perdata

Jika ada seorang debitur yang memiliki utang dalam jumlah besar kepada negara dan kabur dari Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 467 KUH Perdata, Pengadilan Negeri dapat diminta untuk melakukan pemanggilan terhadap orang tersebut. Jika panggilan tersebut tidak dipenuhi, sesuai dengan ketentuan pasal 468 KUH Perdata Kejaksaan dapat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan "diduga telah meninggal dunia". Dengan demikian, harta kekayaan orang tersebut dikuasai oleh negara cq Balai Harta Peninggalan. Para ahli warisnya memang berhak untuk menuntut pembagian warisan (vide pasal 472 KUH Perdata), tetapi dengan mengajukan tuntutan pembagian warisan tersebut para ahli waris pun bertanggung jawab dalam pembayaran utang si pewaris kepada negara yang masih belum dilunasi (vide pasal 1100 KUH Perdata).

(b) Wewenang Kejaksaan yang tercantum di dalam UU Kepailitan (UU No 4 tahun 1998) :

Di dalam Peraturan Kepailitan (UU Nomor 4 Tahun 1998), terdapat 3 ketentuan yang berhubungan dengan peran Kejaksaan, yaitu :

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1998 jo PP no, 17 Tahun 2000 :

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Penjelasan mengenai makna kata “kepentingan umum “ dan tata cara pengajuan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum dicantumkan di dalam PP No. 17 tahun 2000.

Pasal 7 ayat 1

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dalam perkara kepailitan.

Pasal 84 ayat 2

Dalam hal Pengadilan memerintahkan agar debitur pailit disandera, pelaksanaan (eksekusi) perintah tersebut dilakukan oleh Kejaksaan.

- (c) Wewenang untuk mengajukan permohonan agar direksi PT memberikan keterangan/data tertentu (pasal 110 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Wewenang ini dapat diterapkan untuk menerapkan asas transparansi” yang merupakan salah satu asas yang dituntut pelaksanaannya di dalam era reformasi dewasa ini.

- (d) Mengajukan permohonan agar sebuah PT di bubarkan (pasal 117 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Wewenang inipun perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan/kekayaan negara atau untuk memantapkan usaha penanggulangan krisis ekonomi.

## (2) Kegiatan bantuan hukum

Kegiatan bantuan hukum dirasakan paling banyak peranannya dalam pemulihan keuangan negara. Misalnya dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, dengan Surat Kuasa Khusus Kejaksaan mewakili Bank Pemerintah untuk melakukan bantuan hukum, baik proses non litigasi maupun litigasi. Kejaksaan sudah banyak menerima SKK dari Bank pemerintah/BUMN dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan sudah berhasil mengembalikan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kerugian negara banyak disebabkan oleh kredit macet. Dalam hal ini para kroni telah meminjam uang dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta tanpa agunan yang memadai dari pinjaman tersebut kemudian menjadi macet. Jika uang yang dipinjam ini berasal dari negara, perekonomian negara jelas dirugikan. Jika uang tersebut berasal dari Bank Swasta, perekonomian/keuangan negara secara tidak langsung dirugikan, karena kredit macet tersebut mengakibatkan Bank Swasta tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap para nasabahnya, padahal menurut UU tentang Bank Sentral, kewajiban Bank terhadap para nasabahnya dijamin oleh Negara dalam hal ini Bank Sentral/Bank Indonesia.

Bantuan hukum dapat dilaksanakan baik melalui pengadilan (litigasi) maupun tanpa melalui pengadilan (non litigasi). Bantuan Hukum di luar pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan cara mewakili pihak instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam bernegosiasi guna menyelesaikan masalah atau sengketa perdata.

Sebagai contoh :

#### **Kasus Nagasaki Spirit**

Pada tahun 1992 terjadi tabrakan kapal di wilayah ZEE Indonesia yang terletak sekitar 80 km timur laut kota Belawan, antara kapal tanker Nagasaki Spirit dengan kapal Kargo Acean Blessings.

Akibat dari tabrakan ini adalah tumpahnya minyak sekitar 5000 ton yang keluar dari kapal Nagasaki Spirit.

Pemerintah Indonesia dirugikan karena tumpahan minyak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengakibatkan Pemerintah harus mengeluarkan dana untuk melakukan operasi pembersihan (clean up operation).

Sesudah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Perhubungan RI dan Menteri Negara Lingkungan hidup / Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) untuk menyelesaikan masalah ini, Kejaksaan melakukan negosiasi dengan pihak yang bertanggung jawab (Pemilik Kapal Nagasaki Spirit serta Perusahaan Asuransi The Britania Steamship Insurance) untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil Negosiasi ini mengakibatkan Pihak Perusahaan Asuransi bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Negara/Pemerintah RI sejumlah US \$ 400.000,-.

#### **Kasus Klaim Perusahaan Penerbangan Jerman, Lufthansa**

Kasus ini sebenarnya terjadi di Bali atau di lapangan terbang Ngurah Rai, Denpasar, sekalipun gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada sekitar tahun 1992 sebuah pesawat terbang milik Maskapai Penerbangan Lufthansa mengalami kerusakan mesin ketika

melakukan pendaratan di Bandar Udara Ngurah Rai, karena aspal bandar udara ternyata terkelupas dan memasuki mesin jet pesawat pada saat roda menyentuh landasan.

Pihak Lufthansas mengajukan gugatan perdata terhadap menteri Perhubungan RI dan PT. Angkasa Pura (yang pada saat itu masih bernama Perum Angkasa Pura). Kejaksaan menerima surat kuasa khusus untuk mewakili pihak Menteri Perhubungan RI dan Direksi Perum Angkasa Pura sebagai para tergugat di dalam perkara ini.

Sekalipun gugatan di dalam perkara ini sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini dapat diselesaikan melalui perdamaian di luar pengadilan (sesudah pihak Lufthansa mencabut gugatannya). Dalam perkara ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditugaskan menemukan fakta bahwa pada saat kasus ini terjadi landasan di bandar udara Ngurah Rai masih berada di bawah perawatan pihak kontraktor dan pihak kontraktor dijamin oleh sebuah perusahaan asuransi dalam bentuk perjanjian pertanggungan terhadap gugatan pihak ketiga (Third Party Liabilities Insurance), JPN telah meminta agar klaim diajukan bukan terhadap Pemerintah RI dan melainkan terhadap perusahaan asuransi tersebut. JPN kemudian menghubungkan Lufthansa dengan perusahaan asuransi termaksud dan sesudah melalui proses negosiasi yang panjang, akhirnya pihak perusahaan

asuransi bersedia untuk membayar klaim Lufthansa pada jumlah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tidak semua sengketa perdata atau tata usaha negara harus diselesaikan melalui pengadilan, karena masalah terseut dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui proses negosiasi mediasi dan fasilitasi.

Bantuan hukum dapat juga dilaksanakan melalui proses pengadilan, Dalam Perkara tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum dalam hal Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD digugat di hadapan pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara perdata bantuan hukum dapat diberikan oleh Kejaksaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD baik pada saat Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD terseut berkedudukan sebagai Tergugat, maupun pada saat Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tersebut berkedudukan seagai Penggugat.

Bantuan Hukum dapat juga diberikan oleh Kejaksaan bukan saja untuk kepentingan penyelesaiakn perkara-perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di dalam negeri, tetapi juga untuk penyelesaiakn perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan di luar negeri. Sampai tahun 2001 Kejaksaan telah memberikan bantuan hukum untuk kepentingan penyelesaian



perkara di luar negeri di antaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut :

#### **Perkara Promissory Notes**

Dalam perkara ini Kejaksaan memberikan bantuan hukum kepada Dewan Pertahanan Nasional (Wanhankamnas) yang digugat dalam 3 (tiga) perkara, yang pada saat tingkat pertama diperiksa oleh dua pengadilan yang berbeda yaitu US District Court di Tucson, Arizona dan US District Court for the Southern District of New York di Manhattan New York.

#### **Perkara Klaim reasuransi**

Dalam perkara ini Kejaksaan memberikan bantuan hukum kepada PT. Jamsostek (Persero) yang digugat oleh Perusahaan Reasuransi Anglo Iberia Management Co di hadapan US District Court for the Southern District of New York di Manhattan, New York.

#### **Perkara klaim atas transfer uang dari Euro Clear**

Dalam perkara ini Kejaksaan mewakili PT Bank Exim (sekarang Bank Mandiri) dan BAPENAS yang digugat oleh BA Group Cs di hadapan US District Court for the Southern District of New York di Manhattan, New York.

Satu perkara dalam gugatan yang berhubungan dengan promissory notes serta perkara yang berhubungan dengan Euro Clear sudah berakhir dengan kemenangan pada pihak Negara/Pemerintah RI karena gugatan yang diajukan terhadapnya dinyatakan ditolak.

Perkara lainnya masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding, tetapi pada tingkat pertama pihak Negara/Pemerintah RI telah berhasil memenangkan perkara.

Dalam penyelesaian perkara dihadapan pengadilan di luar negeri, Kejaksaan memang tidak dapat tampil langsung mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD di hadapan pengadilan di luar negeri. Bantuan Hukum dari Pengacara setempat memang diperlukan. Sekalipun demikian, Kejaksaan dapat diminta untuk memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara semacam ini, dengan cara membantu Pengacara yang ditugaskan dalam hal menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, mencari informasi dari saksi-saksi yang berdomisili di Indonesia, menghimpun bukti-bukti yang berada di Indonesia serta menghimpun ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang relevan dalam penyelesaian perkara termaksud.

Jika perkaranya diperiksa di hadapan Arbitrase Internasional, Kejaksaan dapat menugaskan Jaksa Pengacara Negeranya (JPN) untuk secara langsung tampil mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang berkepentingan dihadapan forum arbitrase internasional tersebut. Kejaksaan sebenarnya memiliki sejumlah tenaga Jaksa Pengacara Negara yang siap ditugaskan untuk menangani perkara perdata di hadapan forum Arbitrase Internasional. Sekalipun demikian, samapi saat ini Kejaksaan

belum pernah menerima permohonan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Arbitrase Internasional. Sebuah BUMN, PT PLN (Persero) baru-baru ini berperkara di hadapan sebuah forum Arbitrase Internasional. Sekalipun demikian, PT. PLN tidak meminta bantuan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tersebut, sehingga di forum Arbitrase Internasional yang memeriksa dan memutus perkara itu PT PLN diwakili oleh Pengacara dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution, bukan oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan hukum Kejaksaan tidak bersifat monopoli. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang terlibat dalam perkara perdata atau tata usaha negara dapat memilih salah satu cara dalam mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu :

- Menugaskan Staf Biro Hukumnya untuk menangani perkara tersebut, atau
- Menunjuk Kantor Pengacara untuk mewakilinya di dalam perkara tersebut; atau
- Meminta Kejaksaan untuk mewakilinya dalam perkara tersebut.

Pilihan Pimpinan Instansi pemerintah dalam hal ini tentunya didasarkan pada pertimbangan mengenai pihak mana yang paling

dipercaya untuk memberikan bantuan hukum. Kejaksaan hanya dapat menjanjikan dua hal dalam hubungan ini :

Pertama : Kejaksaan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dalam mewakili Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang mempercayai Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum kepadanya;

Kedua : Kejaksaan tidak akan memungut "lawyer fee" atas bantuan hukum yang diberikan kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD. Jika ada pungutan biaya, maka biaya itu hanyalah untuk kepentingan operasional, seperti biaya untuk perjalanan dan akomodasi apabila diperlukan adanya perjalanan ke luar kota serta biaya untuk kepentingan pendaftaran surat-surat di Pengadilan.

**b. Pelaksanaan Tugas & Kewenangan Kejaksaan Sebagai Tindaklanjut Penanganan Kasus Pidana Yang Merugikan keuangan Negara.**

Dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemerintah mengupayakan untuk melakukan upaya

pemberantasan KKN, dalam rangka menegakkan kewibawaan pemerintah pemerintah dan mengamankan keuangan negara. Pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu unsur dari KKN, dapat dilaksanakan baik dengan menggunakan instrumen hukum pidana, maupun menggunakan instrumen hukum perdata.

Penggunaan Instrumen Perdata sebagai tindak lanjut penanganan kasus pidana sangat tepat dilakukan untuk pemulihan keuangan negara. Misalnya dengan penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana yang dimaksudkan supaya kedua kasus diperiksa serentak pada waktu yang sama dan diputus sekaligus termasuk gugatan ganti ruginya.

Jadi dalam hal ini Kejaksaan melakukan gugatan perdata dalam rangka mengeksekusi perkara tindak pidana korupsi dan gugatan tersebut dilakukan karena jabatannya, namun tetap memerlukan SKK dari pimpinan unit kerjanya.

Mengenai mekanisme pelimpahan penyelesaian gugatan perdata dalam rangka eksekusi pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi dari JAM PIDSUS kepada JAM DATUN, telah diatur dalam KEPJA Nomor : Kep-052/J.A/5/1996 tanggal 17 Mei 1996 mengenai Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM DATUN dengan satuan Kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS.

Khususnya dalam hal ini, dengan JAM PIDSUS antara lain ditentukan :

“Apabila pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas perkara Korupsi yang mencantumkan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti sesuai dengan pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 mengenai hambatan, maka satuan kerja JAM PIDSUS menyerahkan penyelesaian uang pengganti tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN”.

Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional selain tuntutan ganti rugi adalah Tuntutan Perbendaharaan yang diatur Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Stb. 1925 Nomor 448 yang telah diperbaharui dan diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968.

Aparat pengawasan sering masih ragu apakah hasil temuannya akan diselesaikan dengan cara tindakan adminisitratif, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atau digugat perdata atau tuntutan pidana. Karena kasus penggelapan atau korupsi yang telah melalui tuntutan TP/TGR bukan berarti masalahnya sudah tuntas karena masih dapat diajukan ke Pengadilan.

Tindak lanjut hasil pengawasan yang disebut terakhir dalam pasal 16 ayat (2) huruf b INPRES Nomor 15 Tahun 1983 adalah :”Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain”.

Suatu tuntutan pengenaan denda jelas bukan masalah perdata tetapi suatu pidana tambahan dalam kasus pidana. Yang dapat merupakan porsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara negara adalah gugatan ganti rugi, yang dapat diserahkan dengan SKK oleh instansi yang terkait.

Namun pemulihan kerugian keuangan negara dengan instrumen perdata sebagai tindak lanjut aparat pengawasan fungsional sangat jarang diserahkan kepada Kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 32, 33 dan 34, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 32 :

(2) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(3) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33 :

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara

Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugiakan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Akan tetapi, dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pasal-pasal tersebut sangat jarang dilaksanakan. Seksi Pidsus sangat jarang menyerahkan berkas perkara korupsi baik itu yang tidak cukup bukti, ataupun terdakwa meninggal dunia dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 32, 33 maupun 34 diatas, padahal secara nyata terdapat kerugian negara. Hal ini sangat disayangkan, dan alangkah tepat jika kewenangan tersebut dapat difungsionalisasikan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran dan perbaikan sikap mental dari aparaturnya dalam Kejaksaan sendiri. Seksi Pidsus Kejaksaan seharusnya berpedoman pada ketentuan di atas, dan menyerahkan berkas perkara tersebut. Oleh karena itu Pimpinan Kejaksaan harus mengontrol perkara pidsus, dan apabila terdapat perkara yang tidak cukup bukti atau terdakwa meninggal dunia, padahal secara nyata terdapat kerugian negara, maka Pimpinan



Kejaksaan harus memerintahkan Jaksa seksi Pidwas untuk menyerahkannya kepada Seksi Datun.

**c. Pelaksanaan Tugas & Kewenangan Kejaksaan Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Penggunaan Asset Negara.**

Pembangunan nasional, memerlukan antara lain dana yang tidak sedikit yang berasal dari masyarakat dan dari pinjaman luar negeri. Dana yang sangat terbatas tersebut harus dikelola dengan efisien agar sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Kemungkinan terjadinya penyimpangan telah diperkirakan, oleh karena itu GBHN mengamanatkan kepada kita agar pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional serta pengawasan oleh masyarakat lebih dimantapkan sehingga segala perbuatan yang merugikan kekayaan dan keuangan negara, kebocoran dan pembocoran kekayaan dan keuangan negara, dapat diatasi.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (2) Inpres Nomor 15 Tahun 1983 menyebutkan :

Ruang lingkup pengawasan meliputi :

f. Kegiatan umum pemerintahan;

- g. Pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara;
- i. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik Daerah;
- j. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Sedangkan dalam pasal 16 ayat (2) tentang tindak lanjut pengawasan fungsional disebutkan :

Tindak lanjut sebagaimana dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain :
  - Tuntutan ganti rugi/ penyetoran kembali;
  - Tuntutan perbendaharaan;
  - Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan meyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi Tindak pidana Khusus, seperti korupsi dan lainnya.

- d. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Di dalam berbagai Rakor Pengawasan yang dipimpin Wakil Presiden selalu dianjurkan agar dalam mengamankan asset negara agar meminta bantuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Bahkan melalui Menteri Sekretaris Kabinet atas Perintah Presiden telah diteruskan kepada para Menteri/Gubernur BI, Panglima ABRI dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen untuk diketahui oleh Pejabat-pejabat Eselon III ke atas dengan surat MENSEKAB Nomor : R-20/M.Sekab/II/1995 tanggal 14 Nopember 1995.

Dalam Rakor Lengkap Bidang Pengawasan tanggal 17 Februari 1993 oleh WAPRES (waktu itu Bapak Sudharmono, SH) dalam pengarahannya telah dinyatakan :

“Sesuai peraturan yang berlaku tuntutan ganti rugi oleh pemerintah terhadap yang bertanggungjawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Cara ini biasanya dapat dilakukan sekiranya instansi yang bersangkutan menganggap Kejaksaan akan dapat lebih efektif melaksanakannya.

Namun dari hasil penelitian, khususnya dalam rangka pemulihan kerugian keuangan dengan instrumen perdata belum begitu dimanfaatkan oleh Departemen-departemen maupun lembaga-lembaga Non Departemen.

Rekomendasi Komisi III (yang membidangi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara) dari Rakor 1995 Jaksa Agung dengan para IRJEN, menyangkut 3 (tiga) hal belum dimanfaatkan secara optimal, terutama menyangkut instrumen perdata dalam upaya pemulihan kerugian keuangan/kekayaan negara dengan memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang DATUN.

Rekomendasi Komisi III lengkapnya berbunyi :

Dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan koordinasi antara aparat pengawasan fungsional dengan aparat penegak hukum, dan kiranya dapat disarankan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Perlu peningkatan penggunaan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara disamping instrumen hukum pidana dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (2) Instansi Pemerintah/negara, BUMN/BUMD dapat memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam memulihkan kerugian keuangan/kekayaan negara

dan kasus-kasus lain yang menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara.

- (3) INPRES Nomor 15 Tahun 1983 kiranya perlu disempurnakan sehingga penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan melalui instrumen hukum perdata dan tata usaa negara diatur secara tegas termasuk instansi yang menanganinya.

Walaupun Komisi III pada Rakor 1995 telah menyampaikan rekomendasi sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan/kekayaan Negara, bahkan rekomendasi tersebut telah mendapat petunjuk dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Kabinet Nomor : R-20/M.Sekab/II/1995 tanggal 14 Nopember 1995, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa khususnya dalam pemulihan keuangan/asset negara dengan instrumen perdata belum secara nyata terlaksana, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perangkat hukum yang ada sekarang, antara lain INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan belum cukup efektif dan belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (2) Peranan Kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata, kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh aparat pengawasan fungsional.

Oleh karena itu, Pihak Kejaksaan sendiri harus pro Aktif dalam memfungsionalisasikan kewenangannya dalam bidang perdata.

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah melakukan penegakkan hukum, bantuan hukum. Pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Dalam situasi keterpurukan perekonomian dan keuangan negara yang menimpa negara kita seperti saat ini maka upaya pemulihan atau pengembalian keuangan negara adalah menjadi salah satu pilihan untuk mengatasinya. Oleh karena itu kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merugikan keuangan negara seperti kasus kredit bermasalah dan sebagainya perlu diprioritaskan upaya pengembaliannya tanpa mengesampingkan sisi pidananya. Terkait dengan penggunaan instrumen keperdataan ini maka fungsi dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara akan sangat berperan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa : Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ayat ini merupakan kehendak politik (political will) sekaligus politik hukum

(legal politic) dari kekuasaan legislatif yaitu Presiden dengan persetujuan DPR. Sudah barang tentu kehendak politik dan politik hukum tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara. Penegasan ini juga merupakan upaya kekuatan legislatif di dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, JAM DATUN selaku pembantu Jaksa Agung dengan giat memasyarakatkan tugas-tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata usaha Negara, dengan maksud lembaga/instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang perdata terutama untuk memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Salah satu dari pemasyarakatan tersebut adalah ditandatanganinya Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.017/J.A/2/1994 dan Kep.42/K/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan Kerjasama Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menangani

kasus perdata yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara.

Tujuan dilakukan kerjasama dimaksud adalah untuk meningkatkan penyelamatan keuangan/kekayaan negara. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut oleh Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor :420/DV.II/1994 tanggal 1 Maret 1994, yang merupakan pedoman bagi jajaran BPKP di daerah, karena merupakan petunjuk kasus-kasus perdata yang diserahkan kepada Kejaksaan, bukan hanya dari hasil pemeriksaan khusus, tetapi juga berasal dari temuan-temuan General Audit (GA), Pemeriksaan Operasional (PO), Post Audit (PA) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (RIKTU) lainnya.

Namun ternyata hasil Juklak maupun tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut belum terlaksana, kecuali oleh BPKP Kalimantan Timur yang pernah menyerahkan beberapa kasus untuk ditindaklanjuti.

Jadi hasil pemeriksaan BPKP yang masuk dalam kualifikasi kasus perdata perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan instrumen hukum perdata.



## 9. Kendala-Kendala Yang dihadapi Lembaga Kejaksaan dalam Melaksanakan Kewenangannya di Bidang Perdata.

### a. Kendala Dari Intern Lembaga Kejaksaan Itu Sendiri

- (1) Belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal.

Pada umumnya sumber daya manusia JAM DATUN yang ada sekarang terdiri dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berlatar belakang pendidikan hukum pidana serta berwawasan hukum pidana pula.

Eksistensi JAM DATUN ternyata memerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu memanfaatkan potensi Jaksa yang ada secara optimal dengan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

#### Sikap Mental

Dalam melaksanakan tugas-tugas DATUN, perlu adanya penyesuaian sikap mental yang mendasar dari JPU ke JPN, karena memang ada perbedaan status dari fungsi

JPU dengan JPN. Ruang lingkup tugas dan fungsi JPN terbatas pada apa yang tersurat dan tersirat dalam SKK. Sebagai JPN yang mewakili pemerintah/negara mempunyai status sebagai pihak yang kedudukannya sama dengan pihak lawan.

Penyesuaian sikap mental tersebut antara lain terlihat pada saat bertugas, JPN tidak menampilkan jabatan strukturalnya, JPN berpikir, berlaku, bertindak sesuai dengan praktek dan kode etik pengacara yang diterima secara umum.

Disamping itu JPN hendaknya selalu meningkatkan wawasan dan penguasaan ilmu hukum perdata dan tata usaha negara.

#### Meningkatkan Potensi

Sumber daya manusia yang ada sekarang ini merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan secara optimal, maka para JPN hendaknya selalu meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan dan ketrampilannya dengan cara antara lain :

- Mengikuti pendidikan khusus perdata dan tata usaha negara yang berorientasi nasional maupun internasional.

- Mengikuti in house training/diskusi/seminar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan DATUN.
- Menyelenggarakan kegiatan ceramah dengan mengundang pakar diidang hukum perdata dan tata usaha negara.
- Menyelenggarakan kegiatan ceramah dengan mengundang pakar dibidang hukum perdata dan tata usaha negara.
- Meningkatkan minat membaca dan belajar.

Memantapkan pemahaman akan tugas dan fungsi DATUN, Mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu pemahaman yang semestinya tetnang tugas dan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara. Pemahaman yang demikian ini perlu agar tertutup kemungkinan timbulnya sikap keliru yang menganggap tugas dan fungsi DATUN sebagai tugas dan fungsi sekunder. Setiap Jaksa harus memiliki pemahaman yang sama dan mantap, tetnang tugas dan fungsi DATTUN sejajar dengan tugas dan fungsi kejaksaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dengan demikian setiap Jaksa yakin dan bangga dalam mengemban tugas dan fungsi DATUN.

**b. Kendala dari Ekstern Lembaga Kejaksaan.**

**(1) Kendala dalam perangkat peraturan Perundang-undangan.**

Perlunya Penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara.

Penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, memang sangat diperlukan untuk memperkuat posisi dan fungsi Jaksa sebagai Kantor Pengacara Negara. Hal ini agar Image masyarakat umum selama ini bahwa tugas Jaksa hanya melakukan penuntutan dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan penyidikan pada perkara-perkara tindak pidana khusus dapat dirubah. Dengan penegasan lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas JPN.

Akan tetapi, dalam membahas masalah Jaksa sebagai Pengacara Negara dan Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, tidak saja harus melihat masalahnya secara sektoral saja, tetapi perlu dilihat pada dimensi yang lebih luas secara nasional baik dalam garis horisontal maupun vertikal. Bahkan sebagai salah satu penegak hukum, Kejaksaan perlu menyadari perannya sebagai salah satu mata rantai dalam penegakkan hukum dalam konteks Integrated Crminal Justice.

Lebih dari itu perlu disadari bahwa Kejaksaan dengan seluruh jajarannya sebagai aparat negara di bidang hukum perlu mempertimbangkan kondisi tanah air di masa depan, dalam konteks globalisasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan kondisi masa lampau.

Bertitik tolak kepada pandangan seperti di ataslah seyogyanya dibahas tentang posisi, fungsi serta prospek Jaksa seagai Pengacara Negara dan Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara.

Untuk dapat mengerti dengan baik posisi, fungsi serta prospek Kantor Pengacara Negara perlu memperhatikan perkembangan ketatanegaraan yang terkait dengan aspek historis baik secara umum maupun khusus mengenai peranan Jaksa sebagai Pengacara Negara dari Waktu ke waktu.

Berawal dari jaman penjajahan Belanda yang sistem ketatanegaraan dan pemerintahannya berbeda dengan jaman Indonesia Merdeka, memang telah diatur masalah ini dengan sebutan "Vertegenwoordiging van den Landen in Rechten" (mewakili negara di dalam hukum). Untuk sengketa yang diadili menurut hukum acara perdata di depan Raad van Justitie di luar Jawa dalam tingkat pertama, para officier van Justitie atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa dengan sebutan Landsadvocaat atau Pengacara (Advocaat) Negara bukan Jaksa

Pengacara Negara. Bila kita teliti dengan seksama kondisi tanah air kita pada tahun 1922 sampai pada saat lahirnya ketentuan tersebut yang antara lain diatur dalam Koninkeljik Besluit yang termuat pada Stb. 1922 Nomor 522. Dapat dimengerti mengapa dapat timbul ketentuan demikian adalah karena situasi tidak lepas dari sistem ketatanegaraan di bawah penjajahan belanda, yang hanya mengenal beberapa Raad van Justitie yaitu Jakarta, Medan dan Surabaya. Dalam hal ini pemerintah kolonial mempunyai kedudukan dan kepentingan yang sangat berbeda dengan rakyat yang dijajah. Faktor tersebut tentu menjadi dasar pertimbangan utama tentang penetapan posisi dan fungsi "lands advocaat" di dalam "vertegenwoordigen" atau mewakili negara. Jadi filosofi yang mendasari ditunjuknya Jaksa untuk menjadi lands advocaat tentulah dengan tujuan untuk membela kepentingan perdata "land" atau pemerintah kolonial.

Setelah Proklamasi dan Indonesia Merdeka memiliki Pancasila dan UUD 1945, patut diperhatikan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 yang mengatur bagaimana ketentuan yang ada pada jaman kolonial tetap berlaku, namun ada satu hal yang harus diingat, bahwa jiwa Undang-Undang lama tersebut wajib disesuaikan dengan jiwa Pancasila. Secara konkrit yang perlu dicermati adalah bahwa Pemerintah Indoneisa bukanlah pemerintah kolonial dan berciri diskriminatif terhadap warga negaranya atau penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia adalah mendasarkan kepada Kedaulatan Rakyat dan menjunjung tinggi prinsip kesamaan, kedudukan dan derajat diantara semua warga negara, didepan hukum dan pemerintah tanpa kecuali. Ini menghapus prinsip diskriminasi yang diakui oleh Hukum Kolonial.

Perlunya Peraturan Perundangan yang Mewajibkan BUMN untuk mempergunakan jasa JPN.

Perubahan lingkungan sosial yang terjadi dan mempengaruhi para “klien” yang disebut BUMN, BUMD ini adalah perubahan status Badan Hukum BUMN yang sebelumnya dapat diklasifikasikan sebagai Badan Hukum Publik karena berstatus sebagai Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Daerah, yang di dalam struktur permodalannya 100% dimiliki oleh Pemerintah/Negara dan karena itu pantas untuk diwakili oleh Pengacara Negara di dalam sengketa perdata yang dihadapi. Tetapi dewasa ini, kondisi tersebut telah berubah, hampir semua Perum telah beralih menjadi PT (Persero) karena struktur permodalannya telah sebagian tidak lagi dimiliki oleh Pemerintah/Negara tetapi telah dimiliki oleh swasta.

Lebih-lebih BUMN yang telah Go Public, pemiliknya tidak saja swasta nasional, tetapi juga swasta asing, Perubahan lingkungan sosial ini telah menempatkan kegiatan-kegiatan dagang

atau bisnis, yang bercirikan keperdataan jauh lebih diminan dari fungsi puliknya, sehingga perubahan status BUMN/BUMD demikian itu telah dengan sendirinya menempatkan BUMN/BUMD tersebut sepenuhnya tunduk kepada Hukum Perdata biasa, seperti PT. Atau Badan Hukum lain yang secara bebas dapat memilih “wakil”nya di dalam perkara perdata yang dihadapi.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 disebutkan :

“di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah”.

Istilah “dapat”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak merupakan keharusan BUMN/BUMD menyerahkan perkaranya kepada Kejaksaan. Apabila Lembaga/Instansi Pemerintah mempunyai Biro Hukum tersendiri, dia tidak berkewajiban untuk menyerahkan SKK kepada Kejaksaan, Namun demikian dalam hal proses litigasi, terutama menghadapi kasus berdampak luas (regional dan nasional) dan proses pembuktiannya sulit barulah Lembaga/Instansi Pemerintah meminta bantuan Kejaksaan.

Perlunya penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan umum.



Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dapat dilihat tentang Wewenang Kejaksaan tidak hanya terletak di dalam bidang hukum publik, tetapi juga di dalam bidang hukum perdata.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan vertikal antara penguasa dengan warga (individu). Kedudukan Kejaksaan dan individu tidak dalam keadaan sederajat, tetapi penguasa berkedudukan dan lebih tinggi dari individu, hubungan antara keduanya adalah "subordinated". Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan horizontal antara kepentingan individu dengan kepentingan individu. Kedudukan keduanya sejajar (coordinated).

Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Kejaksaan mewakili kepentingan umum mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan terhadap perseroan, anggota Direksi atau Komisaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dinyatakan bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk Kepentingan Umum. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk

kepentingan umum. Dalam pasal 1 PP Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum.

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat pergeseran penerobosan Hukum Publik terhadap Hukum perdata. Penerobosan ini adalah untuk kepentingan umum. Penerobosan ini terjadi baik dalam bidang hak atas benda maupun dalam bidang hukum kekayaan.

Ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata, maka campur tangan Pemerintah ini merupakan gejala pergeseran Hukum Perdata ke dalam proses masyarakatan untuk kepentingan umum.

Menurut hemat penulis hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang telah melepaskan diri dari konsepsi hukum yang lebiral dan menganut konsepsi hukum yang pancasilais. Di dalam konkretonya, Hukum perdata mencari bentuk baru demi memenuhi tuntutan itu antara lain melalui campur tangan Pemerintah, sehingga materi-materi yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian akan mendapat perlindungan.

Di negara prinsip itu bahkan merupakan pandangan hidup yang merupakan filsafat negara, yaitu keseimbangan hidup antara kepentingan individu dan masyarakat.

Apakah "*mewakili kepentingan umum*" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan) dimaksud sama dengan "*Untuk dan atas nama negara atau pemerintah*" (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991)? Dengan kata lain apakah kepentingan umum sama dengan kepentingan Pemerintah?

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan memperhatikan dan melindungi kepentingan umum, memang itu tugasnya, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah seperti yang tampak juga dari peraturan perundang-undangan di atas, tetapi belum jelas juga apa yang pada hakekatnya dimaksud dengan kepentingan umum. Kalau kepentingan umum sama dengan kepentingan pemerintah, apakah setiap kepentingan pemerintah merupakan kepentingan umum? Yang jelas ialah bahwa kepentingan umum tidak sama dengan kepentingan perorangan atau kelompok.

Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali dan beraneka ragam kepentingan-kepentingan yang harus dihormati dan dilindungi, dan setiap orang atau kelompok wajar kalau mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingan itu dipenuhi, yang sudah tentu

tidak mungkin dipenuhi sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain. Lalu apa yang dinamakan kepentingan umum itu ?

Mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan pemerintah harus ditujukan kepada memperhatikan dan melindungi kepentingan umum, dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan bahwa untuk dapat disebut sebagai kepentingan umum haruslah semata-mata bersifat sosial, bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan tidak mempunyai tujuan mencari laba. Kecuali itu suatu kepentingan dapat disebut sebagai kepentingan umum apabila menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak dan atau pembangunan.

Dalam hal ini, penulis membandingkan bunyi pasal 27 ayat (2) UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bab III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di

luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 6 Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru dinyatakan sebagai berikut :

“Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi wewenang untuk dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau kepentingan umum dalam perkara Perdata dan Tata usaha Negara, dengan atau tanpa Surat Kuasa Khusus atau dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatas di dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jelas lagi jika kita bandingkan dengan bunyi Bab III tentang Tugas & Wewenang, pasal 28 ayat (2) Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru, sebagai berikut :

“Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mewakili negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan, di dalam atau di luar negeri, dengan atau tanpa surat kuasa khusus.
- b. Melaksanakan tindakan hukum tertentu demi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang baru diatas, menunjukkan adanya penambahan tugas & wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata, dimana Kejaksaan dalam bidang perdata, tidak hanya mewakili Negara, tetapi juga mewakili kepentingan umum.

Adanya Kewajiban Dengan Kuasa Khusus dalam bertindak untuk mewakili Negara di bidang Perdata.

Dengan adanya kewajiban dengan Kuasa Khusus untuk dapat menggunakan kewenangannya dalam bidang perdata, mengakibatkan para JPN tidak dapat secara maksimal memfungsionalisasikan kewenangannya dalam bidang Perdata. Kendala ini harus diatasi dengan memberikan kebebasan para JPN dalam melaksanakan kewenangannya, baik dengan atau tanpa Surat Kuasa Khusus.

Penulis mencoba membandingkan Ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal 1 butir 6 dan pasal 8. Dalam pasal 27 UU Nomor 5 tahun 1991 dinyatakan bahwa :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sedangkan dalam pasal 1 butir 6 Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru dinyatakan sebagai berikut :

“Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi wewenang untuk dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau kepentingan umum dalam perkara Perdata dan Tata usaha Negara, dengan atau tanpa Surat Kuasa Khusus atau dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatas di dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jelas lagi jika kita bandingkan dengan bunyi Bab III tentang Tugas & Wewenang, pasal 28 ayat (2) Draft Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru, sebagai berikut :

“Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- c. mewakili negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan, di dalam atau di luar negeri, dengan atau tanpa surat kuasa khusus.
- d. Melaksanakan tindakan hukum tertentu demi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Jaksa Pengacara Negara di sini, bertindak untuk dan atas nama negara. Jika dibatasi dengan kewajiban penggunaan kuasa khusus, akan membatasi para JPN dalam menggunakan kewenangannya dalam bidang Perdata.

Bila pemerintah memberikan kebebasan bagi para JPN, dalam melaksanakan tugas & kewenangannya di bidang perdata baik itu dengan atau tanpa kuasa khusus, penulis yakin, fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata bisa terealisasi dengan baik.

## (2) Kendala Budaya Hukum.

Belum semua Lembaga/Instansi Pemerintah mengenal peranan

Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Untuk mengatasi permasalahan belum semua lembaga/Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Kejaksaan telah melakukan pemasyarakatan fungsi Datun.

Pemasyarakatan DATUN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan maksud agar baik jajaran Kejaksaan maupun pejabat/Instansi pemerintah, BUMN/BUMD serta masyarakat dapat mengenal dan memahami tugas serta fungsi JAM DATUN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta perangkat peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan para pejabat instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami keberadaan, tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha negara. Selanjutnya diharapkan mereka akan memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapinya.

Pengenalan dan pemasyarakatan fungsi Perdata Kejaksaan sebaiknya dilaksanakan secara konsisten, berlanjut serta terus menerus, Sehingga terwujud sasaran strategis JAM DATUN sebagai Kantor Pengacara Negara.



Hendaknya materi pemasyarakatan telah disiapkan oleh para Jaksa dengan sebaik-baiknya menitik beratkan pada permasalahan hukum pada umumnya maupun hukum perdata dan tata usaha negara pada khususnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dikuasai sebagai pedoman, antara lain :

- a. Peranan hukum dalam pembangunan Nasional.
- b. Peranan Kejaksaan dalam proses pembangunan, seperti antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
- c. Tugas dan fungsi Kejaksaan seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 dan perangkat peraturan pelaksanaannya.
- d. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan di luar pengadilan, yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan.
- e. Profil Jam Datun.

Dengan memasyarakatkan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata, harapan bahwa mereka akan memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapinya akan terwujud.

Adanya Kekhawatiran Lembaga/Instansi Pemerintah untuk menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.

Lembaga/Instansi Pemerintah merasa khawatir pihak Kejaksaan akan membuka kelemahan Lembaga/Instansi bersangkutan, dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang pidana, sehingga mereka tidak bersedia menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.

Kekhawatiran mereka didasarkan pada pemikiran, Lembaga Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan dalam peyidikan, baik berbentuk operasi penyelidikan intelijen maupun operasi penyidikan pidana khusus, sehingga apabila menemukan indikasi tindak pidana, akan menyerahkan pada peyidikan intelijen maupun pidsus.

Sebenarnya, kekhawatiran itu tidak perlu ada. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengacara negara, harus secara arif mempunyai sikap mental sebagai pengacara. Antara lain dalam saat bertugas, JPN tidak menampilkan

jabatan strukturalnya. JPN berpikir, berlaku, bertindak sesuai dengan praktek dan kode etik Pengacara yang diterima secara umum.

Misalnya dalam sengketa Perbankan, seorang JPN yang ditugaskan memberikan bantuan hukum terikat pada ketentuan-ketentuan perbankan, termasuk kewajiban menjaga rahasia bank. Seorang JPN yang melakukan tugas seperti itu disamakan kedudukannya dengan kedudukan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 15 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan apabila JPN dimaksud dengan sengaja membocorkan rahasia bank, maka dia dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2 Milyard (Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan).

Hal ini dapat disampaikan pada Instansi/Lembaga Pemerintah atau BUMN/BUMD pada saat kita memasyarakatkan fungsi Perdata Kejaksaan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang timbul dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan mengenai pentingnya Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan

Dalam bidang Perdata dan Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata mempunyai potensi yang sangat besar, dalam upaya untuk pemulihan keuangan negara & Penyelamatan asset-asset negara. Akan tetapi dirasakan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata belum fungsionalisasikan secara maksimal.
- b. Kejaksaan dalam bidang Perdata telah mengadakan hubungan Kerjasama berdasarkan Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dengan BPKP Nomor Kep-017/JA/2/1994/Kep 42/K/1994 tanggal 8 Februari 1994 untuk menangani kasus perdata yang meimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara. Akan tetapi, sampai saat ini, belum dilaksanakan.
- c. Tugas & Kewenangan Kejaksaan dalam PUPN, harus direfungsionalisasikan, karena sejak lahirnya BUPN yang berubah

menjadi BUPLN, segala tugas dan wewenang PUPN dilaksanakan oleh BUPLN.

2. Pelaksanaan Tugas & Wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata adalah :

- a. Dalam Upaya pemulihan keuangan negara dan penyelamatan negara, dapat memanfaatkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata. Dalam Upaya preventif, dapat digunakan tugas dalam pelayanan hukum dan pertimbangan hukum. Dalam Upaya Represif, dapat dimanfaatkan tugas dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.
- b. Sebagai tindak lanjut penanganan perkara pidana, dimana Sistem hukum pidana kita mengenal penggabungan gugatan ganti rugi tersebut dalam pasal 98 KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981). Selain itu Kejaksaan dapat menempuh upaya gugatan perdata pembayaran uang pengganti dalam kasus perkara korupsi yang menyangkut pasal 34 huruf c, UU Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 32, 33, 34 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai Upaya Untuk Pengawasan Terhadap asset Negara, dapat dimanfaatkan Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, sesuai dengan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Namun dari hasil penelitian, khususnya

dalam rangka pemulihan kerugian keuangan dengan instrumen perdata belum begitu dimanfaatkan oleh Departemen-departemen maupun lembaga-lembaga Non Departemen.

3. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Upaya mengatasinya adalah :

Kendala Dari Intern Lembaga Kejaksaan Sendiri.

- (1)Belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal.

Eksistensi JAM DATUN ternyata memerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kendala dari Ekstern Lembaga Kejaksaan.

- (1)Kendala dalam perangkat peraturan Perundang-undangan.

- Perlunya Peraturan Perundangan Yang Menegaskan Lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara.
- Perlunya Peraturan Perundangan yang Mewajibkan BUMN untuk mempergunakan jasa JPN.
- Perlunya penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan umum.

- Penghapusan ketentuan yang menyatakan kewajiban pemberian kuasa khusus dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD bagi JPN yang akan melakukan tugas & kewenangannya dalam bidang Perdata.

(2) Kendala Budaya Hukum.

- Belum semua Lembaga/Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Untuk mengatasi permasalahan belum semua lembaga/Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Kejaksaan telah melakukan pemasyarakatan fungsi Datun.

- Adanya Kekhawatiran Lembaga/Instansi Pemerintah untuk menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.

Lembaga/Instansi Pemerintah merasa khawatir pihak Kejaksaan akan membuka kelemahan Lembaga/Instansi bersangkutan, dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang pidana, sehingga mereka tidak bersedia menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.

## B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, sangat penting dilakukan, terutama untuk memulihkan keuangan negara dan menyelamatkan asset-asset negara. Demikian juga, hendaknya Kesepakatan kerjasama antara Jaksa Agung RI dan BPKP benar-benar dapat ditindaklanjuti dalam rangka mengembalikan kerugian negara dalam bidang Perdata. Disamping itu, tugas-tugas Kejaksaan dalam PUPN, hendaknya direfungsionalisasikan.
2. Dalam situasi keterpurukan perekonomian keuangan negara yang menimpa negara kita saat ini, sangat tepat jika kita melaksanakan fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata. Kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, sebaiknya juga mempergunakan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata sebagai tindak lanjut penanganan kasus Pidana. Demikian juga dalam rangka pengawasan terhadap aparatur negara, sangat tepat bila dalam mengamankan asset negara dengan meminta bantuan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
3. Agar Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dapat dilaksanakan dengan baik, hendaknya kendala-kendala yang ada harus diatasi. Dalam Perangkat Peraturan Perundangannya (substansi hukum) yang dirasakan kurang mendukung pelaksanaan fungsionalisasi kewenangan Kejaksaan agar dilengkapi. Misalnya, Penegasan bahwa Kejaksaan sebagai Kantor Jaksa Pengacara Negara, Penegasan bahwa Kejaksaan dalam bidang Perdata juga memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan umum, penegasan bahwa BUMN/BUMD dalam



menyelesaikan perkara di bidang perdata, harus menyerahkan pada Kejaksaan, dll. Demikian juga agar Kejaksaan sendiri harus pro aktif dalam memasyarakatkan fungsinya dalam bidang perdata kepada masyarakat dan Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD. Demikian dalam intern tubuh Kejaksaan sendiri, diharapkan mempersiapkan SDMnya untuk penanganan kasus-kasus perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman, SH, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Capaeti, Mauro, 1975, *Toward Equal Justice : A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies*, Dobbes Ferry, New York.
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan II, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1989.
- Goodpaster, Gary, 1995, *Arbitrase di Indonesia : Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Iswardono Sp, 1991, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta.
- JAM DATUN, *Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- ....., 1985, *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*, Dharma Bakti, Jakarta.
- JAM DATUN, *Compedium JAM DATUN pada Akhir Tahun Ke-VI*, Buku XI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- JAM DATUN, *Buku I DATUN*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

- Lubis, T Mulya, *Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1992.
- Lubis T. Mulya, *Peranana Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, SH, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Murtika, I Ketut, SH, 1987, *Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Jogjakarta.
- Metzger, Barry, 1974, *Legal Services To The Poor and National Development Objectives*.
- Nasution, Adnan Buyung, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Simanjuntak, E.P., 1995, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Cetakan Ketujuh, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, SH, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prakoso, Djoko, SH Februari 1998, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan keempat, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- R. Subekti, 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Ketiga, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Tjiptoadinugroho, 1983, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Cetakan Kelima, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, E.P., *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Cetakan Ketujuh, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sastrawijaya, H.R. Sadili, 17 Oktober 1985, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Shahab, Hamid, 2000, *Menyingkap dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif*, Djambatan, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Cetakan Pertama, Penerbit UI, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Radjawali, Jakarta.
- Sunarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Thomas Suyatno *et al*, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta.

Tobing, BAB, 1998, *Wewenang dan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Keperdataan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta

-----, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta.

Wijanarto, 1993, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Grafiti, Jakarta.

Wijaya, Faried M., Soetatwo Hadiwigeno, 1991, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.

Jam Datun Kejaksaan Agung RI, 1994, *Tindak Lanjut Raker 1993/1994*, Kejaksaan Agung RI.

....., *Penguasaan Tanah Negara dan Pengelolaan Tanah Pemerintah*, Badan Pertanahan Pemerintah, Direktorat Pengadaan Instansi Pemerintah, 1994

## **B. MAKALAH**

Bintoro, SH, *Perlunya Penegasan Lembaga Kejaksaan Sebagai Kantor Pengacara Negara*, Makalah disampaikan pada Seminar Penegasan Lembaga Kejaksaan Tinggi sebagai Kantor Pengacara Negara, tanggal 23 Agustus 1997, Semarang : Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Fred Tumbuan SH, *Pengertian Umum dan Pengajuan Perkara Kepailitan*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Yoseph Suardi Sada, SH, LL.M. *Prosedur permohonan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, *Peranan Hukum Kepailitan dalam rangka pemulihan Ekonomi*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober - 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Subardi, SH, *Sejarah dan Peranan Pengadilan Niaga dan Peran Kejaksaan Agung RI*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Luhut Panggaribuan, *Prosedur Permohonan Kepailitan dan penundaan pembayaran*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, *Masalah Prosedur Yang Timbul Dalam Pengadilan Niaga Dalam Teori dan Praktek*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Eljana Tansah, SH, *Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam perkara Kepailitan*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober - Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred Tumbuan, SH, *Masalah Hukum kepailitan dan perdata yang timbul dalam praktek pengadilan niaga dalam teori dan praktek*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred Tumbuan, *Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Pelaksanaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Niaga*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, *Tindakan Sementara, Sita Jaminan, paksa Badan, Pelaksanaan serta merta*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Luhut Pangaribuan, SH, *Aspek Hukum Pidana Dalam Kepailitan*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred Tumbuan, SH, *Kepailitan dan Perseroan Terbatas*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober - Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred Tumbuan, SH, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred Tumbuan, SH, *Tanggung Jawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred b.G. Tumbuan, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Kepailitan dan Hukum Pada Umumnya – Prespektif Indonesia*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober - 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred. B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu No. 1/1998*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.

Fred B.G. Tumbuan, *Ciri-ciri Utama PKPU sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepailitan*, Makalah dalam Program Latihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan, 11 Oktober – 3 Nopember 2000, Gedung JAM DATUN, Jakarta.



Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH, *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah*, Makalah dalam Manajemen Kredit Bermasalah, 23 Desember 1994, Jakarta.

Prof. Soehardjo, SS, SH *Mengantisipasi Permasalahan Peranan Kejaksaan dalam statusnya Sebagai Kantor Pengacara Negara*, Makalah disampaikan pada Seminar Penegasan Lembaga Kejaksaan Tinggi sebagai Kantor Pengacara Negara, tanggal 23 Agustus 1997, Semarang : Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Prof. Kusnadi Hardjosoemantri, *The Environmental Management Act : The Legal Contest for Dispute Management*, Makalah dalam Seminar Eksekutif Pengelolaan Lingkungan Hidup, 24 April 1995, Kantor Lingkungan Hidup, Jakarta.

Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, *Aplikasi/Operasionalisasi Peran Kejaksaan Sehubungan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1995*, Makalah dalam Diskusi Ilmiah mengenai Peranan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH, *Menata Posisi, Fungsi, serta Prospek Kantor Pengacara Negara*, Makalah dalam Diskusi Ilmiah mengenai Penegasan Lembaga Kejaksaan Sebagai Kantor Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 1997

Suhadibroto, *Aspek-aspek Hukum Dalam rangka Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah pada Seminar ADR, Lembaga

Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golongan Karya Pusat, 22 Agustus 1995, Jakarta.

JR Abubakar, SH, *Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Makalah dalam Ceramah Ilmiah Persaja, tanggal 11 Nopember 1994, Jakarta.

W.H. Jacob Rahim Saleh, SH, *Perkembangan dan Penyelesaian Kerugian Negara dan Tuntutan Perdata*, Makalah dalam Ceramah Ilmiah Persaja, tanggal 8 September 1999, Jakarta.

Suhadibroto, SH, *Masalah Ambivalensi dalam melaksanakan tugas JAM DATUN*, Makalah dalam Ceramah Ilmiah Persaja, tanggal 8 September 1999, Jakarta.

Suhadibroto, SH, *Gugatan Ganti Kerugian dan biaya Pemulihan lingkungan hidup*, Makalah dalam Ceramah Ilmiah Persaja, tanggal 8 September 1999, Jakarta.

Suhadibroto, SH, *Peranan Kejaksaan dalam keanggotaan PUPN*, Makalah dalam Ceramah Ilmiah Persaja, tanggal 8 September 1999, Jakarta.

### C. ARTIKEL DALAM JURNAL/MAJALAH/ KORAN

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Aplikasi/Operasionalisasi Peran Kejaksaan sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Medikom Adhyaksa, 23 Oktober 1995

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, *Peranan Kejaksaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Medikom Adhyaksa, 23 Oktober 1995.

M. Ramli, *Peranan Arbitrase Dagang Internasional Pasca /APEC*, Kompas, Selasa, 13 Desember 2001.

Suhadibroto, *Penyelesaian Kasus Kedung Ombo Oleh JPN Kejari Semarang*, Majalah Caraka Adhyaksa No. 2 September 1994.

Normin S. Pakpahan, *Pembangunan Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi*, Suara Pembaharuan, Januari 2001.

Prof. Dr. H. Priyatna Abdulrasyid, SH, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Majalah Pengembangan Perbankan, Mei 2001.

....., *Sistem Penyelesaian Perkara Secara Damai*, Varia Peradilan NO. 121, Nopember 1999

M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara*, Varia Peradilan No. 121, Nopember 1999

Munir Fuady, *Persyaratan Teknis yang perlu dikuasai "Business Lawyer"*, Bisnis Indonesia, 12 Januari 1994.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan pailit untuk kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI nomor : Kep-035/J.A/3/1992 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/JA/10/1999 tentang Sunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Ins-001/Q/12/1992 Tentang Tata Laksana Penegakan Hukum Perdata.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Ins-002/Q/12/1992 Tentang Tata Laksana Bantuan Hukum Perdata.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Ins-003/Q/12/1993 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Ins-009/J.A/6/1993 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ikhtisar Ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI), 1982, Tentang Kegiatan dan Usaha Bank, Jilid I, Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perbankan 1992, 1993, Penerbit Eko Jaya, Jakarta.